

711.4  
PRI  
u

**KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI  
PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP  
RENCANA PEMINDAHAN KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Kota

Oleh :

**AGUS PRIONO**  
L4D 002 112



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2004**

**UPT-PUSTAK-UNDAI**

**KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI  
PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP  
RENCANA PEMINDAHAN KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :

**AGUS PRIONO**  
L4D002112

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 17 Juni 2004

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 21 Juni 2004

Pembimbing Pendamping



Ir. Retno Susanti, MT.

Pembimbing Utama



Dr. Ari Pradhanawati, MS.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

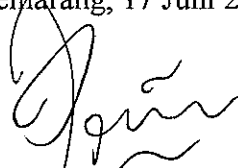


Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA.

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 17 Juni 2004



AGUS PRIONO  
NIM L4D 002 112

*Sesungguhnya*

*Hidup itu sudah ada 'Master Program-nya' yang dibuat Allah SWT  
dan tidak dapat diubah, namun didalamnya, terdapat ruang gerak bagi kita  
untuk selalu dapat berikhtiar lebih baik, Jadi, untuk mendapatkan sesuatu,  
kenapa harus menghalalkan segala cara ?*

*-Salahuddin Wahid-*

**Tesis ini kupersembahkan untuk :**  
**Nanik Dwi Handayani/istri dan Hajid Abiyu Muyassar/anak-ku**  
**para orang tua-ku**  
**seluruh keluarga-ku [medan-jogjakarta-cepu-semarang]**  
**para orang yang ku-tua-kan**  
**para pimpinan-ku**  
**karib kerabat-ku**

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur ke Hadirat Allah SWT dan kepada Junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW yang tiada hentinya, oleh karena Anugerah dan Hidayah-Nya, penulis diijabahi kemampuan untuk dapat menyelesaikan tesis ini, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Teknik [MT] pada program studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota di Universitas Diponegoro Semarang. Tesis ini berjudul : *“Kajian Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan ke Taman di Tuk Buntung Kota Cepu”*.

Taman kota Cepu yang resmi difungsikan pemanfaatannya pada bulan Desember 2002 lalu adalah sebagai fasilitas rekreasi skala lokal bagi warga masyarakat, namun saat ini telah ditempati oleh pedagang kaki lima (PKL) khususnya mulai sore hari sampai larut malam. Keberadaan PKL di lokasi taman kota ternyata tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) kota Cepu. Namun demikian, pemerintah kabupaten Blora memahami pentingnya perdagangan kaki lima di kota Cepu sebagai solusi alternatif guna menekan angka pengangguran warga masyarakatnya. Pemerintah kabupaten Blora memberikan respon positif dengan merencanakan pemindahan aktivitas para PKL taman kota ke taman di Tuk Buntung yang telah dianggap sesuai dan layak sebagai lokasi berdagang khusus bagi para PKL taman kota. Realisasi pembangunan taman di Tuk Buntung paling cepat dilaksanakan pada akhir tahun 2004 mendatang. Namun belum jelasnya kesediaan PKL taman kota untuk pindah ke taman di Tuk Buntung merupakan satu persoalan penting yang coba diungkap oleh penulis melalui kajian empiris terhadap persepsi dan preferensi mereka dalam merespon rencana pemindahan tersebut.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ir. Binsar Situmorang, M.Si., selaku Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Medan [d/h BAPEDALDA Kota Medan], yang telah memberikan motivasi dan kesempatan kepada penulis mulai dari mengikuti tes masuk beasiswa Departemen KIMPRASWIL RI ini sampai akhirnya lulus dan dapat menyelesaikan pendidikan pada

program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota (MPPWK) di Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya juga ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ibu Dr. Ari Pradhanawati, MS., selaku *pembimbing utama*, dan Ibu Ir. Retno Susanti, MT., selaku *pembimbing pendamping*, yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembahas maupun penguji yang telah banyak memberi kritik dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini, terima kasih juga kepada seluruh dosen dan karyawan program MPPWK, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa se-angkatan yang semua keberadaannya telah memberikan motivasi besar bagi penulis untuk dapat dengan tepat waktu menyelesaikan penyusunan tesis ini. Atas kesempatan yang diberikan oleh pihak Departemen Kimpraswil RI melalui BPSDM, PUSDIKTEK, dan Balai Kerjasama Pendidikan Diploma dan Magister Wilayah Semarang, untuk melanjutkan jenjang pendidikan Magister ini dengan beasiswa, penulis banyak mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir namun tak terlupakan, adalah rasa syukur dan terima kasih penulis selalu kepada Allah SWT, karena telah memberikan Nikmat yang besar— baik berupa kehadiran seorang istri dan anak maupun seluruh keluarga di Medan, Jogjakarta, Cepu dan Semarang— yang selalu setia mendampingi dengan penuh perhatian serta memberikan dukungan dan semangat bagi penyelesaian tugas-tugas penulis selama masa pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri bagi saran-saran perbaikan agar karya tesis ini dapat menjadi lebih baik dan terutama lagi agar karya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Juni 2004  
**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5.1 Ruang lingkup substansi .....	6
1.5.2 Ruang lingkup wilayah .....	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Pendekatan dan Metodologi Penelitian.....	13
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	13
1.7.2 Metodologi Penelitian .....	13
1.7.2.1 <u>Teknik pengumpulan data</u> .....	14
1.7.2.2 <u>Teknik pengolahan dan penyajian data</u> .....	15
1.7.2.3 <u>Metode analisis data</u> .....	20
1.7.2.4 <u>Teknik <i>sampling</i></u> .....	23
1.8 Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PERSEPSI DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN .....</b>	<b>28</b>
2.1 Tinjauan Persepsi dan Preferensi .....	28
2.2 Tinjauan Sektor Informal .....	29
2.2.1 Pengertian.....	29
2.2.2 Peran sektor informal di kota .....	31
2.2.3 Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal .....	32

2.3	Tinjauan Taman Kota sebagai Ruang Publik.....	35
2.4	Tinjauan Kebijakan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Cepu .....	37
2.4.1	Fungsi taman kota Cepu sebagai fasilitas rekreasi skala lokal.....	38
2.4.2	Fungsi jalan kolektor primer yang mengelilingi taman kota Cepu .....	38
2.5	Tinjauan Rencana Pemindahan.....	39
2.5.1	Pengertian rencana .....	39
2.5.2	Rencana pemindahan.....	40
2.6	Tinjauan Faktual Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima terhadap Rencana Pemindahan .....	41
2.7	Definisi Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan .....	44
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU .....</b>	<b>48</b>
3.1	Gambaran Umum Kota Cepu .....	48
3.1.1	Arah dan perkembangan .....	61
3.1.2	Kebijakan umum .....	61
3.1.2.1	<u>Program</u> .....	62
3.1.2.2	<u>Kebijakan</u> .....	64
3.2	Gambaran Umum Taman Kota Cepu .....	66
3.2.1	Kondisi fisik .....	66
3.2.2	Potensi dan masalah .....	68
3.3	Gambaran Umum Kawasan Tuk Buntung .....	69
3.3.1	Kondisi fisik .....	69
3.3.2	Potensi dan masalah .....	70
3.4	Gambaran Umum Rencana Pemindahan Pedagang Kaki Lima Taman Kota ke Taman di Tuk Buntung Kota Cepu .....	72
3.4.1	Karakteristik dan aktivitas pedagang kaki lima taman kota Cepu .....	72
3.4.2	Rencana pemindahan pedagang kaki lima taman kota ke taman di Tuk Buntung kota Cepu .....	79
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU .....</b>	<b>80</b>
4.1	Analisis Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota Cepu .....	80
4.1.1	Persepsi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan .....	80

4.1.2	Preferensi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan .....	84
4.2	Analisis Hubungan antara Ketersediaan PKL Taman Kota Cepu Pindah ke Taman di Tuk Buntung dengan Karakteristik dan Aktivasnya .....	94
4.3	Analisis Hubungan antara Teori dengan Hasil Penelitian.....	102
4.4	Pembahasan.....	103
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	105
5.1	Kesimpulan .....	105
5.2	Rekomendasi .....	106
5.3	Usul Penelitian Lanjut.....	107
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xvi
	<b>LAMPIRAN</b> .....	xx

## DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Kebutuhan Data .....	18
TABEL I.2	: Tabulasi Silang.....	22
TABEL I.3	: Variabel-Variabel Analisis Tabulasi Silang.....	23
TABEL I.4	: Rincian Jumlah Sampel yang Diperlukan pada Populasi PKL Taman Kota Cepu .....	26
TABEL II.1	: Variabel Penelitian.....	46
TABEL III.1	: Luas Wilayah Kota Cepu.....	50
TABEL III.2	: Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Cepu Tahun 1996 – 2000.....	52
TABEL III.3	: Jumlah Penduduk Kota Cepu menurut Mata Pencaharian Tahun 2000 .....	53
TABEL III.4	: Jumlah Penduduk Kota Cepu menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2000 .....	53
TABEL III.5	: Penggunaan Lahan di Kota Cepu Tahun 2001 .....	55
TABEL III.6	: Cuplikan Indikasi Program Pembangunan RUTR Kota Cepu Tahun 2003 – 2012 .....	64
TABEL III.7	: Jenis dan Jumlah Fasilitas Penunjang di Taman Kota Cepu.....	68
TABEL III.8	: Persentase Asal Responden.....	72
TABEL III.9	: Jumlah PKL Taman Kota Cepu berdasarkan Kategori Jenis Dagangan .....	73
TABEL III.10	: Jumlah PKL Taman Kota Cepu berdasarkan Kategori Sarana Fisik Dagangan .....	73
TABEL III.11	: Waktu Berdagang Responden.....	78
TABEL IV.1	: Informasi Rencana Pindahan Responden.....	81
TABEL IV.2	: Alasan Pemerintah Kabupaten Blora terhadap Rencana Pindahan menurut Responden.....	82
TABEL IV.3	: Perlunya Rencana Pindahan bagi Responden .....	83
TABEL IV.4	: Pendapat Responden terhadap Perlu Tidaknya Mereka Dipindahkan.....	84
TABEL IV.5	: Kesiediaan Responden Pindah ke Taman di Tuk Buntung.....	85
TABEL IV.6	: Pertimbangan atas Keberatan Responden terhadap Rencana Pindahan.....	86
TABEL IV.7	: Pertimbangan atas Tidak Keberatan Responden terhadap Rencana Pindahan.....	87
TABEL IV.8	: Pentingnya Rencana Pindahan bagi Responden .....	88
TABEL IV.9	: Rincian Klasifikasi Usulan Responden.....	89
TABEL IV.10	: Jumlah Pelanggan Responden.....	90
TABEL IV.11	: Kondisi dan Situasi Taman Kota Cepu bagi Responden .....	90

TABEL IV.12 :	Lokasi Berdagang Paling Layak, Paling Strategis, dan Menjadi Pilihan/Prioritas bagi Responden.....	92
TABEL IV.13 :	Alasan Responden Memilih Lokasi Taman Kota Cepu sebagai Tempat Berdagang.....	93
TABEL IV.14 :	Karakteristik dan Aktivitas Responden .....	95
TABEL IV.15 :	Resume Hasil Tes <i>Chi-Square</i> dan <i>Contingency Coefficient</i> .....	96
TABEL IV.16 :	Kontingensi Hubungan antara Kesiediaan Responden untuk Pindah ke Taman di Tuk Buntung dengan Karakteristik dan Aktivitasnya .....	101

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Lingkup Wilayah Penelitian .....	8
GAMBAR 1.2	: Denah Lokasi Penelitian.....	9
GAMBAR 1.3	: Kerangka Pemikiran .....	12
GAMBAR 3.1	: Peta Batas-Batas Kota Cepu.....	49
GAMBAR 3.2	: Peta Administrasi Kota Cepu .....	51
GAMBAR 3.3	: Peta Rencana Guna Lahan Kota Cepu.....	58
GAMBAR 3.4	: Peta Fungsi-Fungsi Jaringan Jalan di Kota Cepu .....	60
GAMBAR 3.5	: Kondisi Eksisting Taman Kota Cepu dan Kawasan Tuk Buntung .....	71
GAMBAR 3.6	: Klasifikasi PKL Taman Kota Cepu Berdasarkan Sarana Fisik Dagangan.....	75
GAMBAR 3.7	: Denah Sebaran PKL Taman Kota Cepu Berdasarkan Sarana Fisik Dagangan.....	76
GAMBAR 4.1	: Diagram Kesiediaan Responden PKL Taman Kota Cepu Pindah ke Taman di Tuk Buntung.....	85
GAMBAR 4.2	: Grafik Hasil Tes <i>Contingency Coefficient</i> .....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	: Kuesioner untuk Responden PKL Taman Kota Cepu .....	xxi
LAMPIRAN 2	: Wawancara untuk Instansi Terkait Rencana Pemindahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora .....	xxvii
LAMPIRAN 3	: Tabel Data Responden.....	xxviii
LAMPIRAN 4	: Hasil Perhitungan Tes <i>Chi-Square</i> dan <i>Contingency Coefficient</i> .....	xxx
LAMPIRAN 5	: Indikasi Program Pembangunan RUTR Kota Cepu Tahun 2003-2012.....	xxxvii
LAMPIRAN 6	: Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora .....	xxxviii

## ABSTRAK

Taman yang terletak pada jalur jalan kolektor sekunder di kawasan Tuk Buntung, kota Cepu, telah direncanakan pembangunannya oleh pemerintah kabupaten Blora pada akhir tahun 2004 mendatang. Pembangunan taman di Tuk Buntung merupakan rangkaian pembangunan taman tahap ketiga di kota Cepu yang rencananya akan menjadi tempat pemindahan bagi para PKL yang saat ini masih menempati taman kota Cepu dalam kerangka besar penataan kawasan. Beberapa alasan utama rencana pemindahan tersebut adalah untuk menghindari terlalu besarnya beban aktivitas pada jalur jalan kolektor primer yang melintasi taman kota Cepu, agar tidak menyimpang dari fungsi taman kota Cepu sebagai fasilitas rekreasi dan olahraga skala lokal, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora. Sehingga perlu terlebih dahulu mengetahui dan memahami kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke lokasi taman di Tuk Buntung melalui persepsi dan preferensinya, serta hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu guna melihat kesediaan mereka pindah ke lokasi taman di Tuk Buntung, dan mengetahui hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya. Sasaran penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya untuk melakukan identifikasi kondisi eksisting taman kota Cepu, identifikasi kondisi eksisting kawasan Tuk Buntung, identifikasi karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu, analisis persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu, serta analisis hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

Penelitian deskriptif kualitatif ini mengambil 84 responden sebagai sampel proporsional mewakili populasi PKL taman kota Cepu berdasarkan jenis sarana fisik dagangannya. Metode analisis distribusi frekwensi dipakai untuk mengetahui persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu serta metode analisis tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

Lebih dari 75% responden hasil penelitian memilih/memprioritaskan taman kota Cepu sebagai tempat yang paling layak dan strategis untuk berdagang. Sebanyak 48 responden (57,14%) tidak bersedia pindah ke taman di Tuk Buntung, 30 responden (35,72%) bersedia, dan 6 responden (07,14%) tidak menjawab/kosong. Lebih lanjut diketahui bahwa tidak adanya kepastian hubungan yang dapat menjelaskan keterkaitan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya melalui keseluruhan nilai koefisien kontingensi yang mendekati nol ( $Cc \approx 0$  atau  $0 < Cc < 1$ ) sebagai indikator. Namun ternyata hampir sebagian dari mereka juga tahu kalau kehadirannya yang tidak tertata dan terkelola dengan baik lambat laun akan menjadi biang kesemrawutan wajah taman kota Cepu dan mengancam kelancaran arus lalu lintas pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU. Akhirnya PKL taman kota Cepu harus menyadari bahwa keberadaan mereka di lokasi taman kota Cepu tidaklah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Cepu yang berlaku secara normatif, sehingga harus selalu siap bila suatu saat dipindahkan ke lokasi taman di Tuk Buntung.

## ABSTRACT

*Downtown Park as a public space in Cepu City was planning to build at the secondary collection road class of Tuk Buntung region by district government of Blora, Central Java province, at the coming end of the year 2004. As a 3<sup>rd</sup> stage park building in Cepu City, Tuk Buntung Park will be a new place for all hawkers moving from downtown first stage park, in the framework of Tuk Buntung region plan. The main reasons why they were planned to move is because the district government willing to manage and organize them at Tuk Buntung Park in order to avoid the overload activity at the primary collection road class surround it. And then to keep the downtown first stage park as its local facility for community recreation and sport function at Cepu City, also as its to keep not to infringe the district law # 6/1990 for Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora. It is very important to know and to understand the hawkers' willingness to move starting from their perception and preference, and so do to the correlation between willingness with character and activity of them.*

*These research goals are to find out the hawkers' perception and preference in order to see their willingness of moving, and to find out the correlation between their willingness with characteristics and activities. The research objectives are to identify the existing of Downtown Park of Cepu City, to identify the existing of Tuk Buntung region, to identify both characteristics and activities of the hawkers, analysis of perception and preference of the hawkers, and analysis of the correlation between the hawkers' willingness with their characteristics and activities.*

*This qualitative descriptive research took 84 respondents as its sample represented proportionally to the entire hawkers at the downtown first stage park onto its specification of merchandise physical structure. Distribution frequency analysis used to find out their perception and preference, so that the cross-tabulation analysis method used to search the correlation between their willingness to move with characteristics and activities.*

*More than 75% of respondents' priority choice for the downtown first stage park as a very eligible and strategic place for merchandising. Moreover, 48 respondents (57.14%) willing not to move, 30 respondents (35.72%) willingly to move, and 6 respondents (07.14%) have no answer/blank. And so far as to know that there are no correlation can explained an inter-connection between respondents' willingness to move with their character and activity, which indicated by the entire of contingency coefficient point close to null ( $Cc \approx 0$  or  $0 < Cc < 1$ ). The finding, almost part of them known as the fact that their existing without organized would gradually being a bad view at the Downtown Park and a bad traffic factor at the primary collection road class of Cepu-Randublatung/RSU. Finally, all the hawkers at the Downtown Park have to be conscious that their existing in Downtown Park, by the law, is out of plan. In addition, they always have to be ready to move anytime when the local government plans for moving all of their activities to the Park of Tuk Buntung.*

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Taman kota Cepu sebagai ruang publik telah memberikan tempat berinteraksi bagi masyarakatnya secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Taman yang memiliki potensi wisata ini telah resmi difungsikan sebagai tempat rekreasi bagi warga masyarakatnya oleh pemerintah kabupaten Blora pada bulan Desember 2002 yang lalu, dan merupakan rangkaian pembangunan taman tahap pertama di kota Cepu. Sedangkan pembangunan taman tahap kedua yang dijadwalkan pelaksanaannya mulai bulan Oktober 2003 telah pula selesai dan secara resmi difungsikan. Kedua taman tersebut dibangun dengan mengambil lokasi pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU melingkari arealnya yang berbentuk elipsoidal.

Dalam perkembangannya, keberadaan taman tahap pertama telah menjadi pusat keramaian pada malam hari bagi warga masyarakat kota Cepu dan sekitarnya, terutama sekali pada waktu libur umum tiba. Menangkap adanya peluang dari kondisi tersebut, maka secara alamiah keberadaan pedagang kaki lima (PKL) telah mewakili aktivitas sektor informal di taman kota Cepu yang tumbuh dan terus berkembang seiring dengan semakin sulitnya warga masyarakat mendapatkan pekerjaan pada sektor formal.

Menurut Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Blora, sesungguhnya taman kota Cepu sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dibangun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas olahraga dan rekreasi skala lokal di kota Cepu, jadi bukan semata-mata dibangun dengan tujuan agar para PKL dapat beraktivitas didalamnya. Sedangkan lokasi taman kota

Cepu berada pada jalur jalan kolektor primer, sebagai koridor utama jaringan transportasi dari dan ke arah kota Cepu yang harus tetap terjaga kelancarannya. Pertimbangan mendasar lainnya yang menjadi alasan adalah bahwa pengaturan tempat atau lokasi berdagang PKL dalam wilayah kabupaten Blora, sepenuhnya menjadi wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menetapkannya, dengan memperhatikan aspek-aspek kondisi, situasi, dan lingkungan, sebagaimana bunyi pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 terlampir. Meskipun demikian, pemerintah kabupaten Blora dapat memahami pentingnya pertumbuhan aktivitas sektor informal di kota Cepu sebagai solusi alternatif guna menekan angka pengangguran warga masyarakatnya.

Bagi pemerintah kabupaten Blora, tumbuh-kembangnya PKL di taman kota Cepu saat ini perlu segera direspon secara positif dengan merencanakan pembangunan taman baru yang secara resmi akan menjadi pusat hiburan warga masyarakatnya di tengah kota, dan sekaligus berfungsi sebagai tempat berdagang khusus bagi para PKL dengan jarak lokasi yang tidak jauh dari taman kota, serta tidak berada pada jalur jalan kolektor primer yang sangat beresiko terhadap terjadinya kemacetan lalu-lintas. Dengan kata lain, pemerintah kabupaten Blora berkeinginan bahwa setelah taman baru tersebut dibangun dan resmi difungsikan nantinya, maka para PKL taman kota Cepu diharapkan akan bersedia pindah ke lokasi baru yang telah khusus disediakan bagi mereka untuk berdagang.

Dalam upaya menyediakan tempat berdagang khusus bagi para PKL di tengah kota dengan jarak lokasi yang tidak jauh dari taman kota Cepu tersebut, maka pada akhir tahun 2004 mendatang pemerintah kabupaten Blora telah merencanakan pembangunan taman tahap ketiga di kawasan Tuk Buntung yang hanya berjarak 200 m dari taman kota Cepu, dan berada pada jalur jalan kolektor sekunder di sebelah selatan lokasi taman tahap kedua yang baru saja

resmi difungsikan. Tuk Buntung merupakan sebuah nama kawasan yang sebagian besar masuk dalam wilayah administratif kelurahan Cepu. Oleh pemerintah kabupaten Blora, lokasi ini telah direncanakan sebagai tempat khusus untuk pemindahan lokasi berdagang PKL taman kota Cepu dalam suatu kerangka besar penataan kawasan. Rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung, dalam RUTR Kota Cepu Tahun 2002, merupakan rangkaian program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas perdagangan dalam kegiatan penataan pedagang kaki lima untuk wilayah kelurahan Balun dan kelurahan Cepu yang menjadi bagian dari pusat kota Cepu.

Namun demikian, dalam rencana pembangunan taman tahap ketiga di Tuk Buntung tersebut, pemerintah kabupaten Blora perlu terlebih dahulu mengetahui dan memahami berbagai hal yang melandasi kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah melalui persepsi dan preferensinya. Upaya tersebut dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan suatu rencana pemindahan PKL taman kota ke taman di Tuk Buntung yang partisipatif, agar dapat menjembatani kebutuhan dan menembus batas kemampuan berbagai pihak yang berkepentingan. Sehingga taman di Tuk Buntung yang akan dibangun nantinya diharapkan benar-benar dapat bermanfaat bagi PKL taman kota sebagai tempat berdagang, dan sekaligus dapat menjadi pusat hiburan di tengah kota yang tentunya juga dengan harapan akan lebih ramai dikunjungi warga masyarakat kota Cepu dan sekitarnya.

Karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu yang spesifik memiliki peluang untuk mempengaruhi kesediaan mereka pindah ke taman di Tuk Buntung. Bagaimana sebenarnya persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu dalam merespon rencana pemindahan tersebut merupakan hal utama yang sangat menarik untuk dikaji lebih jauh guna melihat kesediaan mereka pindah ke taman di Tuk Buntung nantinya. Disamping itu perlu pula

dikaji bagaimana hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Menurut Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Blora, sesungguhnya taman kota Cepu sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dibangun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas olahraga dan rekreasi skala lokal di kota Cepu, jadi bukan semata-mata dibangun dengan tujuan agar para PKL dapat beraktivitas didalamnya;
2. Keberadaan PKL taman kota Cepu sangat beresiko terhadap keindahan taman kota dan kelancaran arus lalu-lintas, dikarenakan lokasi taman kota yang berada pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU sebagai urat nadi jaringan transportasi utama dari dan ke arah kota Cepu;
3. Taman yang berlokasi di kawasan Tuk Buntung sedianya akan dibangun oleh pemerintah kabupaten Blora sebagai tempat khusus untuk memindahkan lokasi berdagang PKL taman kota Cepu dalam kerangka besar penataan kawasan; serta
4. Belum jelasnya kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke lokasi taman di kawasan Tuk Buntung yang akan dibangun nantinya.

Sehingga dari rumusan masalah diatas akan timbul beberapa hal yang penting untuk dipertanyakan dalam penelitian ini (*research questions*), yaitu :

1. Bagaimana kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung ?  
dan

2. Bagaimana hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya ?

### **1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian**

Menilik latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu untuk melihat kesediaannya pindah ke lokasi taman di Tuk Buntung; dan
2. Mengetahui hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

Sasaran penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya untuk melakukan :

1. Identifikasi kondisi eksisting taman kota Cepu;
2. Identifikasi kondisi eksisting kawasan Tuk Buntung;
3. Identifikasi karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu;
4. Analisis persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu; serta
5. Analisis hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat kota Cepu, hasil penelitian ini dapat merangsang cakrawala berpikir kritis yang responsif, juga menjadi sarana pendidikan yang objektif agar tetap selalu tanggap dalam merespon setiap rencana pembangunan di kota Cepu;

2. Bagi pemerintah kabupaten Blora, hasil penelitian yang berupa peninjauan persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu ini nantinya dapat memberikan rekomendasi sebagai masukan bagi upaya mewujudkan perencanaan pembangunan taman di kawasan Tuk Buntung yang partisipatif melalui pendekatan "*community driven planning*", disamping juga sebagai bahan bagi penyusunan program dasar pembangunan partisipatif (PDPP), agar dalam setiap proyek pembangunan yang akan direalisasikan nanti tentunya benar-benar selalu dapat merepresentasikan aspirasi warga masyarakatnya; dan
3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur yang bernilai guna mengupas berbagai kajian lebih lanjut tentang persepsi dan preferensi PKL dalam merespon rencana pemerintah memindahkan aktivitasnya, dimana upaya untuk menelusuri persepsi dan preferensi PKL merupakan hal yang idealnya wajib dipahami sebelum upaya pemindahan direncanakan.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua bagian berdasarkan substansi dan wilayah studi dengan maksud untuk memperjelas permasalahan yang disintesa, yaitu :

### **1.5.1 Ruang Lingkup Substansi**

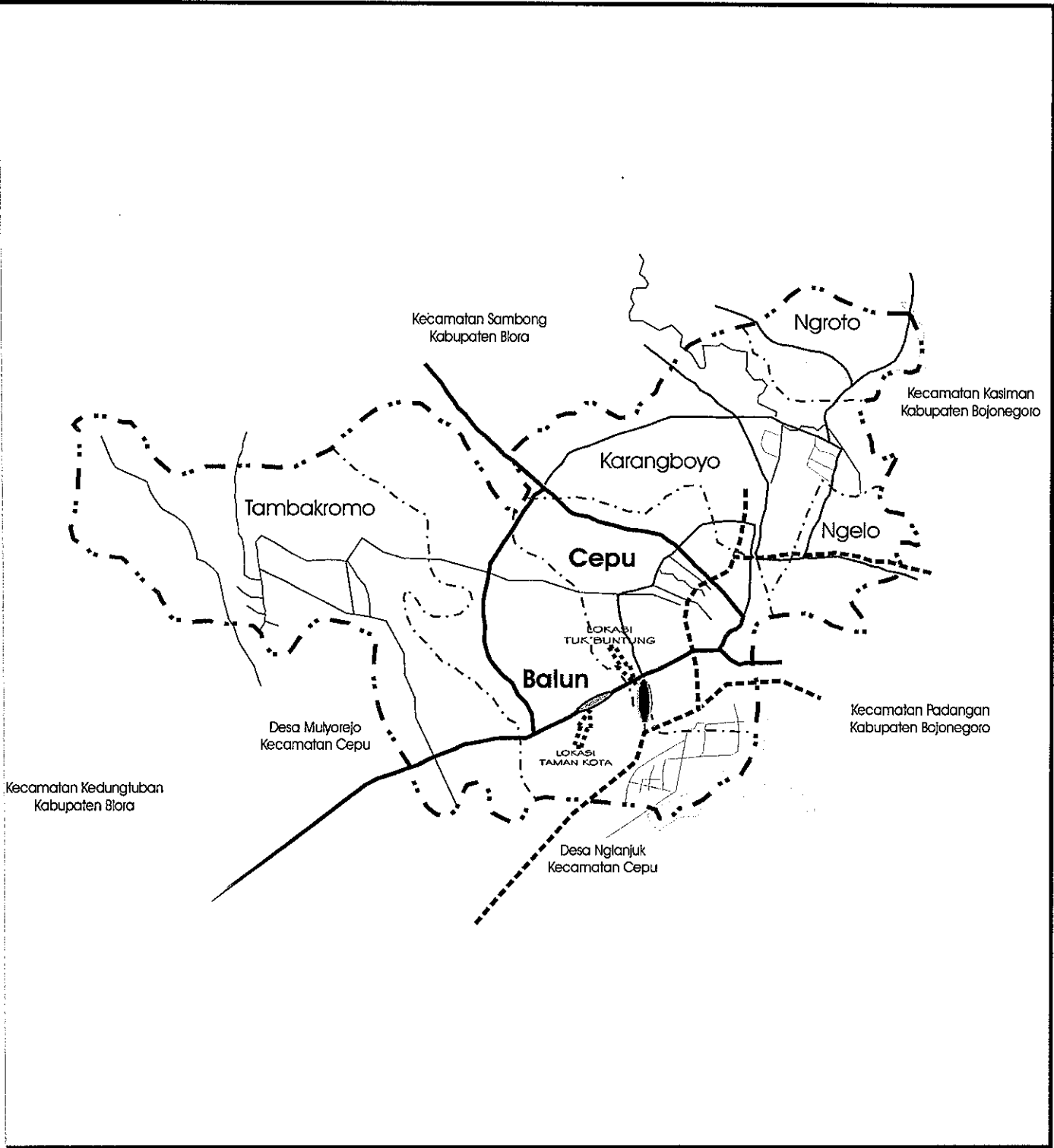
Ruang lingkup substansi penelitian merupakan penjabaran dari sasaran penelitian yang mencakup pokok-pokok bahasan sebagai berikut :



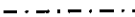











1. Kondisi eksisting taman kota Cepu, meliputi batas administrasi, karakteristik fisik alamiah, tata guna lahan, pemanfaatan ruang, serta potensi dan permasalahan;
2. Kondisi eksisting kawasan Tuk Buntung, meliputi batas administrasi, karakteristik fisik alamiah, tata guna lahan, pemanfaatan ruang, serta potensi dan permasalahan;

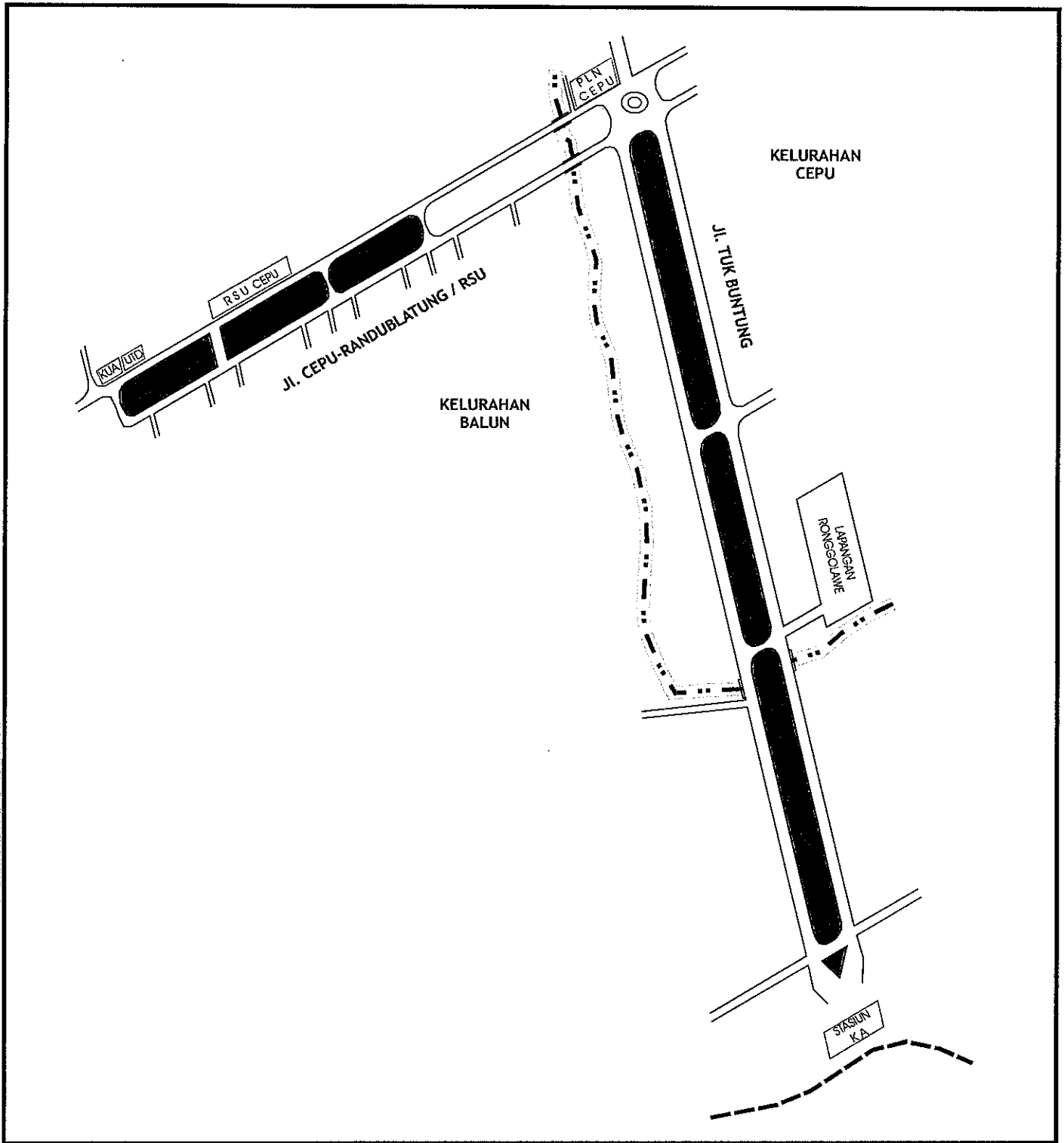
3. Karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu, meliputi kondisi sosial-ekonomi, asal, jumlah, modal, jenis dagangan, sarana fisik dagangan, sebaran berdasarkan sarana fisik dagangan, luasan tempat berdagang, waktu berdagang dan pola pelayanannya;
4. Persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu, meliputi pemahaman/penafsirannya dalam merespon rencana pemindahan lokasi aktivitasnya ke taman di Tuk Buntung maupun kecenderungannya memilih lokasi berdagang yang diprioritaskan dengan indikator respon kesediaan mereka berupa pernyataan keberatan ataupun tidak keberatan; dan
5. Hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya, meliputi ada atau tidak adanya hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitas para PKL, yaitu usia, pendidikan, pendapatan, modal, lama berdagang, dan luasan tempat berdagang.




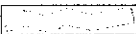
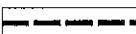

#### **1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah**

Lingkup wilayah penelitian ini dibatasi pada taman kota Cepu di kelurahan Balun dan Tuk Buntung yang sebagian besar terletak di wilayah administrasi kelurahan Cepu, kecamatan Cepu, kabupaten Blora, propinsi Jawa Tengah. Pemilihan wilayah ini berdasarkan adanya permasalahan spasial tentang tidak jelasnya kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dalam menyikapi rencana pemerintah kabupaten Blora memindahkan lokasi berdagang mereka yang dikaji melalui persepsi dan preferensinya. Untuk lebih detail lingkup wilayah penelitian beserta denah lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 berikut.



 <p><b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH &amp; KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>	<p><b>LEGENDA :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Batas Kota</li> <li> Batas Kelurahan</li> <li> Jalan Kolektor Primer</li> <li> Jalan Kolektor Sekunder</li> <li> Jalan Lokal Primer</li> <li> Jalan Lingkungan</li> <li> Rel Kereta Api</li> <li> Sungai Bengawan Solo</li> <li> Taman Kota</li> <li> Tuk Buntung</li> </ul>	<p>UTARA</p> 			
<p><b>TESIS</b></p> <p>KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU</p> <p><b>PETA</b></p>		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>NO. GAMBAR</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>SKALA</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>1.1</b></td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	<b>NO. GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>	<b>1.1</b>
<b>NO. GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>				
<b>1.1</b>					
<p><b>LINGKUP WILAYAH PENELITIAN</b></p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>NOMOR HALAMAN</b></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>8</b></td> </tr> </table>	<b>NOMOR HALAMAN</b>	<b>8</b>	<p><b>SUMBER</b></p> <p><b>BAPPEDA KABUPATEN BLORA</b></p>	
<b>NOMOR HALAMAN</b>	<b>8</b>				



 <b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> <b>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH &amp; KOTA</b> <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>LEGENDA :</b>  Lokasi Penelitian  Batas Kelurahan  Sungai  Rel Kereta Api		<b>UTARA</b> 	
	<b>TESIS</b> <b>KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI</b> <b>PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA</b> <b>TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN</b> <b>KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU</b>	<b>NO. GAMBAR</b> <b>1.2</b>		<b>SKALA</b> <b>TANPA SKALA</b>
<b>DENAH</b> <b>DENAH LOKASI PENELITIAN</b>	<b>NOMOR HALAMAN</b>	<b>9</b>		<b>SUMBER</b> <b>OBSERVASI LAPANGAN</b>

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Pembangunan taman tahap pertama di kota Cepu yang telah resmi difungsikan sejak Desember 2002 telah menjadi pusat keramaian pada malam hari bagi warga masyarakat kota Cepu dan sekitarnya, terutama sekali pada waktu libur umum tiba. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di taman kota Cepu tersebut telah mewakili aktivitas sektor informal yang tumbuh dan terus berkembang seiring dengan semakin sulitnya warga masyarakat mendapatkan pekerjaan pada sektor formal.

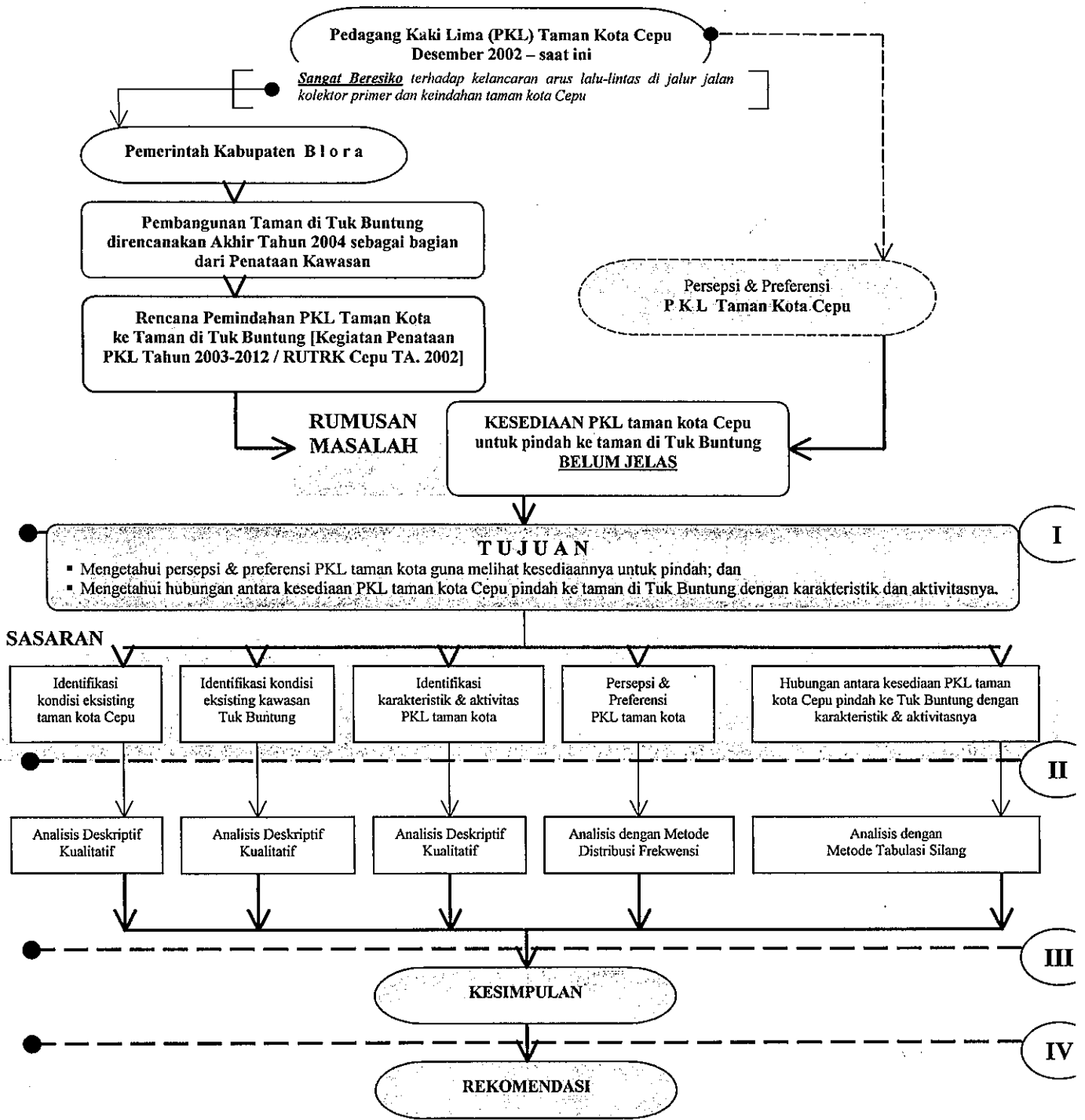
Menurut Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) Kabupaten Blora, sesungguhnya taman kota Cepu sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dibangun untuk memenuhi kebutuhan fasilitas olahraga dan rekreasi skala lokal di kota Cepu, jadi bukan semata-mata dibangun dengan tujuan agar para PKL dapat beraktivitas didalamnya. Sedangkan pengaturan tempat atau lokasi berdagang PKL dalam wilayah kabupaten Blora, sepenuhnya menjadi wewenang Bupati sebagai Kepala Daerah untuk menetapkannya, dengan memperhatikan aspek-aspek kondisi, situasi, dan lingkungan. Alasan lain yang mendasarinya adalah karena taman kota Cepu berada pada jalur jalan kolektor primer yang menjadi koridor utama jaringan transportasi dari dan ke arah kota Cepu yang harus tetap terjaga kelancarannya.

Meskipun demikian, pemerintah kabupaten Blora dapat memahami pentingnya pertumbuhan aktivitas sektor informal di kota Cepu sebagai solusi alternatif guna menekan angka pengangguran warga masyarakatnya. Sehingga perlu segera direspon secara positif dengan merencanakan pembangunan taman tahap ketiga di kawasan Tuk Buntung sebagai lokasi khusus bagi pemindahan PKL taman kota Cepu. Rencana tersebut termasuk dalam kerangka besar penataan kawasan Tuk Buntung yang berada pada jalur jalan kolektor sekunder di sebelah selatan lokasi taman tahap kedua yang baru saja resmi difungsikan pada

bulan Januari 2004. Dalam RUTR Kota Cepu Tahun 2002, rencana pemindahan tersebut juga merupakan rangkaian program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas dalam kegiatan penataan pedagang kaki lima untuk wilayah kelurahan Balun dan kelurahan Cepu yang menjadi bagian dari pusat kota Cepu.

Bagi pemerintah kabupaten Blora penting untuk terlebih dahulu mengetahui kesediaan PKL taman kota Cepu melalui persepsi dan preferensinya, dan sekaligus melihat hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mewujudkan suatu rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung yang partisipatif, dengan harapan agar pembangunan taman di Tuk Buntung nantinya benar-benar dapat bermanfaat bagi PKL taman kota sebagai lokasi berdagang yang baru.

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada upaya-upaya untuk melakukan identifikasi kondisi eksisting taman kota Cepu, identifikasi kondisi eksisting kawasan Tuk Buntung, identifikasi karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu, analisis persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu, serta analisis hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya. Selanjutnya setiap sasaran dianalisis secara deskriptif kualitatif baik dengan bantuan metode analisis distribusi frekwensi maupun tabulasi silang (*crosstab analysis*) sebagai data masukan dalam proses analisisnya untuk mendapatkan jawaban dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. Lebih lanjut, hasil akhir dari penelitian ini akan terfokus pada suatu kesimpulan yang dapat dijadikan dasar perumusan rekomendasi sebagai masukan bagi berbagai pihak sejalan dengan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini.



GAMBAR 1.3  
KERANGKA PEMIKIRAN

## **1.7 Pendekatan dan Metodologi Penelitian**

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) dengan maksud untuk mengetahui permasalahan serta mendapatkan informasi-informasi dan data yang ada di lokasi penelitian. Namun penelitian ini tidak pula mengesampingkan penelaahan pustaka (*literature study*), terutama sekali pada penyusunan landasan teori dan metodologi penelitian. Penelitian ini dapat pula dijelaskan formatnya melalui pendekatan yang digunakan maupun metodologinya.

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mengukur secara cermat persepsi dan preferensi pedagang kaki lima (PKL) taman kota Cepu dengan mengembangkan konsep, menghimpun fakta, dan tanpa melakukan pengujian hipotesa, yang menjadi sifat analisisnya. Selanjutnya, dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu, maka pada data kuantitatif hasil penelitian ditambahkan pula informasi kualitatif, sehingga dengan demikian pendekatan dalam penelitian ini dapat pula dikatakan sebagai pendekatan deskriptif kualitatif.

### **1.7.2 Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai yang mengambil sampel PKL taman kota Cepu dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang sangat pokok disamping juga dilakukannya wawancara dan observasi kepada PKL taman kota Cepu yang menjadi unit analisisnya maupun kepada beberapa instansi pemerintah kabupaten Blora terkait. PKL taman kota Cepu yang menjadi responden dalam penelitian penulis adalah PKL yang telah terdaftar menjadi anggota paguyuban dan hanya yang bersedia secara sukarela memberikan jawaban pertanyaan kuesioner yang diberikan.

### 1.7.2.1 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui :

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka. Dalam penelitian ini dipakai kuesioner bersifat tertutup dan terbuka, kuesioner tertutup dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner telah tersedia dan responden tinggal memilih beberapa alternatif yang telah disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka dimaksud adalah bahwa jawaban kuesioner tidak tersedia dan responden diminta bebas untuk menuliskan jawaban kuesioner yang menurutnya paling sesuai guna memperoleh informasi lebih mendalam. Skala yang dipakai untuk menentukan jumlah alternatif jawaban pada data yang sifatnya ordinal dipakai skala *Likert*. Skala *Likert* menggunakan metode penilaian terakhir. Biasanya responden memberi tanda pada skala 1 sampai dengan 5, dimana setengah dari jawaban soal positif dan setengahnya lagi negatif. Namun banyak peneliti yang memberikan penekanan pada kecenderungan responden untuk “mengamankan” dan untuk menempatkan jawaban mereka di tengah sebagai angka netral. Ini disebut pengaruh “kecenderungan sentral”. Sehingga beberapa peneliti berusaha menghapuskan sama sekali dengan menghilangkan angka netral dan mengurangi skala menjadi 4 angka (Sevilla, *et al*, 1993 : 225).

Dari pengertian diatas, maka pada penelitian ini dipakai skala 1 sampai dengan 4 untuk data yang sifatnya ordinal. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2002 : 63) yang menyatakan bahwa dalam penggunaan skala *Likert* tidak terdapat aturan baku untuk menentukan jumlah pilihan/alternatif jawaban, jumlah pernyataan, dan jumlah populasi, dimana dalam hal ini dapat dipakai dengan jumlah ganjil atau genap yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan peneliti. Dalam pengolahan datanya, setiap jawaban

responden pada kuesioner yang sifatnya terbuka diklasifikasikan sesuai pertimbangan peneliti guna memudahkan penyajian distribusi frekwensinya.

2. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan dengan beberapa nara sumber yang dianggap mampu dan mengetahui permasalahan. Teknik ini dipakai secara simultan dan sebagai cara utama untuk memperoleh data secara mendalam yang tidak diperoleh dengan data dokumentasi, menanyakan hal-hal yang belum ada atau belum jelas yang mungkin terdapat dalam data dokumentasi.
3. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan hal-hal yang penting berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, sehingga peneliti mampu menggambarkan secara nyata kondisi di lapangan dalam karya tulisannya. Hasil dari pengamatan tersebut ditulis secara deskriptif dan direkam dengan kamera foto.

#### **1.7.2.2 Teknik pengolahan dan penyajian data**

Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan (Wahid, 2003 : 4). Jadi data merupakan gambaran tentang suatu keadaan, peristiwa atau persoalan yang berhubungan dengan tempat dan waktu, yang merupakan dasar suatu perencanaan dan merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan. Data juga memiliki jenis-jenis yang berkaitan dengan sumber perolehannya. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini beserta masing-masing teknik pengolahan maupun penyajiannya, yaitu :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama— baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara maupun hasil pengisian kuesioner— yang biasa

dilakukan oleh peneliti (Sugiarto, *et al*, 2001 : 16-17). Data primer yang akan diolah dalam penelitian ini diperoleh melalui pengisian kuesioner responden, wawancara mendalam kepada nara sumber, dan observasi lapangan, dimana untuk selengkapnya telah disajikan sesuai kebutuhan data pada tabel I.1. Selanjutnya data primer yang diperoleh nanti akan diolah dan disajikan melalui proses *editing*, *coding*, dan *tabulating*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan data yang benar-benar *valid*, *reliable*, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian. Sebagaimana diuraikan oleh Nasution (2002 : 61-62) bahwa proses *editing* merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, tidak sesuai, dan sebagainya. Dalam proses *coding* akan diberikan tanda, simbol, ataupun kode— baik dalam bentuk angka maupun huruf— pada setiap data yang masuk dalam kelompok yang sama. Pengkodean atas jawaban responden diberi dengan menggunakan angka 1 sampai dengan 4, dimana untuk jawaban a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, dan angka 0 hanya diberikan untuk nilai pertanyaan atas jawaban responden yang tidak terjawab atau kosong. Sedangkan *tabulating* merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Sehingga hasil dari jawaban kuesioner seluruh responden yang telah diberi kode berupa angka 1 sampai dengan 4 tadi dapat ditampilkan seluruhnya dalam bentuk tabel data responden. Jawaban responden pada kuesioner yang bersifat terbuka diolah oleh peneliti dengan cara membuat suatu pertimbangan klasifikasi atas seluruh jawaban responden mulai dari yang paling lemah sampai dengan yang paling kuat/dominan untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi dan selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai bahan acuan bagi analisis deskriptif yang dipakai. Penyajian data kuesioner hasil penelitian— baik yang bersifat tertutup maupun

terbuka— juga dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi, gambar, diagram, dan grafik.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan— baik oleh pengumpul data primer maupun oleh pihak lain— yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel, diagram-diagram, maupun peta-peta. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan/pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut (Sugiarto, *et al*, 2001 : 19). Dalam hal ini data sekunder diperoleh misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Dalam penyajiannya, data sekunder yang tersajikan secara sistematis tidak perlu lagi diolah lebih lanjut, namun perlu disesuaikan dengan analisis yang dilakukan. Selanjutnya data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini telah disajikan pula sesuai kebutuhan data pada tabel I.1.

TABEL I.I  
KEBUTUHAN DATA

No.	Tujuan	Analisis	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
1.	Mengetahui kondisi eksisting taman kota Cepu	Analisis kondisi eksisting taman kota Cepu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi taman kota Cepu</li> <li>▪ Kebijakan pembangunan taman kota Cepu dan rencana pemindahan PKL ke taman di Tuk Bunting</li> <li>▪ Lokasi kawasan Tuk Bunting</li> <li>▪ Kebijakan tentang pembangunan taman di kawasan Tuk Bunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letak taman</li> <li>- Status &amp; fungsi taman</li> <li>- Pemanfaatan taman</li> <li>- Bentuk taman</li> <li>- Luas taman</li> <li>- Jenis &amp; jumlah fasilitas pendukung taman</li> <li>- RENSTRADA</li> <li>- RUTR kabupaten Blora</li> <li>- RUTRK Cepu</li> <li>- Peraturan lain yang terkait</li> </ul>	Data Primer & Data Sekunder dengan Wawancara [ Model - B ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> <li>- Kantor Kebersihan &amp; Pertamanan (KKP)</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Kantor Kebersihan &amp; Pertamanan (KKP)</li> <li>- BAPPEDA</li> </ul>	Deskriptif Kualitatif
2.	Mengetahui kondisi eksisting Tuk Bunting	Analisis kondisi eksisting Tuk Bunting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lokasi kawasan Tuk Bunting</li> <li>▪ Kebijakan tentang pembangunan taman di kawasan Tuk Bunting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Letak Tuk Bunting</li> <li>- Status &amp; fungsi Tuk Bunting</li> <li>- Pemanfaatan Tuk Bunting</li> <li>- Bentuk Tuk Bunting</li> <li>- Luas Tuk Bunting</li> <li>- RENSTRADA</li> <li>- RUTR kabupaten Blora</li> <li>- RUTRK Cepu</li> <li>- Peraturan lain yang terkait</li> </ul>	Data Primer & Data Sekunder dengan Wawancara [ Model - B ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> <li>- Kantor Kebersihan &amp; Pertamanan (KKP)</li> <li>- BAPPEDA</li> <li>- Kantor Kebersihan &amp; Pertamanan (KKP)</li> <li>- BAPPEDA</li> </ul>	Deskriptif Kualitatif
3.	Mengetahui karakteristik aktivitas taman kota Cepu	Analisis karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik PKL taman kota Cepu</li> <li>▪ Aktivitas PKL taman kota Cepu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi sosial-ekonomi</li> <li>- Asal</li> <li>- Jumlah</li> <li>- Modal</li> <li>- Jenis dagangan</li> <li>- Sarana fisik dagangan &amp; sebaran</li> <li>- Luasan tempat berdagang</li> <li>- Waktu berdagang</li> <li>- Pola pelayanan</li> </ul>	Data Primer dengan Kuesioner [ Model - A ]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> <li>- Responden PKL taman kota Cepu</li> <li>- Dinas Perindagkop</li> <li>- Kantor Kesbanglinmas</li> <li>- idem</li> </ul>	Deskriptif Kualitatif

Lanjutan Tabel I.1

No.	Tujuan	Analisis	Variabel	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Metode Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Mengetahui persepsi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan maupun preferensinya terhadap kecenderungan pemilihan lokasi berdagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Analisis persepsi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan</li> <li>o Analisis preferensi mereka terhadap kecenderungan pemilihan lokasi untuk beraktivitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penafsiran pemahaman PKL taman kota Cepu terhadap perlu maupun pentingnya rencana pemindahan</li> <li>▪ Penilaian kecenderungan mereka untuk memilih lokasi yang layak maupun lebih disenangi untuk berdagang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase jumlah mereka yang menafsirkan perlunya rencana pemindahan</li> <li>- Persentase jumlah mereka yang memahami pentingnya rencana pemindahan</li> <li>- Persentase jumlah mereka yang menilai layak lokasi untuk PKL beraktivitas</li> <li>- Persentase jumlah mereka kecenderungan memilih lokasi yang lebih disenangi untuk berdagang</li> </ul>	Data Primer dengan Kuesioner [dalam Model-A]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> <li>- Responden PKL taman kota Cepu</li> </ul> <p>idem</p> <p>idem</p>	Deskriptif Kualitatif dengan Distribusi Frekwensi
5.	Mengetahui hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Analisis hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesiadaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung</li> <li>▪ Karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah PKL taman kota Cepu yang menyatakan bersedia maupun tidak untuk pindah ke taman di Tuk Buntung</li> <li>- Usia</li> <li>- Pendidikan</li> <li>- Pendapatan</li> <li>- Modal</li> <li>- Lama berdagang</li> <li>- Luasan tempat berdagang</li> </ul>	Data Primer dengan Kuesioner [dalam Model-A]	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan</li> <li>- Responden PKL taman kota Cepu</li> </ul> <p>idem</p>	Tabulasi Silang

Sumber : Hasil kajian teori, 2003

### 1.7.2.3 Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah dengan distribusi frekwensi dan tabulasi silang (*cross tabulation*) yang secara kuantitatif menjadi data masukan (*entry data*) dalam proses analisisnya.

Secara lebih detail perihal masing-masing metode analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting taman kota Cepu dan kawasan Tuk Buntung, yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan kondisi terkini— baik taman kota Cepu maupun Tuk Buntung— dari hasil observasi di lapangan;
2. Untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu, yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif agar dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi dan berbagai dinamika yang melekat pada PKL taman kota Cepu saat ini melalui pengisian kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan;
3. Untuk mengetahui persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahannya ke taman di Tuk Buntung pada waktu yang akan datang, yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode distribusi frekwensi agar dapat dilihat perihal kesediaan PKL taman kota untuk pindah ke taman di Tuk Buntung melalui hasil pengisian kuesioner dan wawancara, dengan indikator respon kesediaan PKL taman kota Cepu berupa pernyataan keberatan ataupun tidak keberatan mereka terhadap rencana pemerintah kabupaten Blora untuk memindahkan lokasi aktivitas usahanya; serta

4. Untuk mengetahui hubungan antara keberadaan PKL taman kota Cepu dengan faktor-faktor yang mempengaruhi rencana pemindahannya, yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode tabulasi silang (*crosstab method*) agar dapat diperoleh informasi perihal ada atau tidak adanya hubungan yang sempurna antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitas para PKL yang meliputi usia, pendidikan, pendapatan, modal, lama berdagang, dan luasan tempat berdagang.

Prosedur tabulasi silang diaplikasikan untuk menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda dari dua variabel atau lebih, dengan menghitung harga-harga statistik beserta ujinya. Data-data dari setiap variabel tersebut dikelompokkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kategori diberi skor untuk mempermudah perhitungannya. Kemudian variabel-variabel yang akan diidentifikasi hubungannya disusun dalam baris dan kolom. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien kontingensi (*contingency coefficient*) untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan yang sempurna diantara dua variabel.

Metode analisis tabulasi silang akan mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks, hasil tabulasi silang disajikan dalam bentuk suatu tabel dengan variabel-variabel yang tersusun sebagai kolom dan baris tabel tersebut. Untuk mengamati dan menganalisis variabel-variabel tersebut lebih mudah dengan memakai tabel dua dimensi ( $i \times j$ ).

TABEL I.2  
TABULASI SILANG

	1	2	....	j	....	k	
1	C <sub>11</sub>	C <sub>12</sub>	....	C <sub>1j</sub>	....	C <sub>1k</sub>	n <sub>1</sub>
2	C <sub>21</sub>	C <sub>22</sub>	....	C <sub>2j</sub>	....	C <sub>2k</sub>	n <sub>2</sub>
....	....	....	....	....	....	....	....
i	C <sub>i1</sub>	C <sub>i2</sub>	....	C <sub>ij</sub>	....	C <sub>ik</sub>	n <sub>i</sub>
....	....	....	....	....	....	....	....
r	C <sub>r1</sub>	C <sub>r2</sub>	....	C <sub>rj</sub>	....	C <sub>rk</sub>	n <sub>r</sub>
∑	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	....	n <sub>j</sub>	....	n <sub>k</sub>	n

Sumber : Nasir, 1999

Menurut Nasir (1999 : 480-481) pengujian yang dilakukan bersifat pendekatan dan frekwensi yang diharapkan terjadi akan dinyatakan dengan  $e_{ij}$ , dengan formula berikut :

$$e_{ij} = \frac{(n_i) \cdot (n_j)}{n} \quad (2)$$

dimana :  $n_i$  = jumlah baris ke-i

$n_j$  = jumlah baris ke-j

Berdasarkan formulasi tersebut diperoleh :

$$e_{11} = \frac{(n_1) \cdot (n_1)}{n} \quad e_{21} = \frac{(n_2) \cdot (n_1)}{n} \quad e_{23} = \frac{(n_2) \cdot (n_3)}{n}$$

dan seterusnya.....

maka :  $n = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_r) = (n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k)$

Selanjutnya dicari besaran  $\chi^2$  (dibaca *chi-kuadrat*) dengan memakai rumus berikut :

$$\chi^2 = \sum_i \sum_j \frac{(c_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} \quad (3)$$

Setelah  $\chi^2$  diketahui, maka besarnya *contingency coefficient* ( $C_c$ ) dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut :

$$C_c = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}} \quad (4)$$

Besarnya  $C_c$  pada rentang skala antara 0 sampai 1 atau  $0 < C_c < 1$ , dimana :

bila  $C_c = 0$ , berarti tidak ada hubungan, dan

$C_c = 1$ , berarti ada hubungan sempurna.

Dalam hal ini semakin mendekati angka 1, maka hubungan yang terjadi semakin kuat dan semakin mendekati angka 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam analisis tabulasi silang ini ditampilkan dalam tabel I.3 berikut.

TABEL I.3  
VARIABEL-VARIABEL ANALISIS TABULASI SILANG (*CROSSTAB ANALYSIS*)

Analisis	Variabel Terikat	Variabel Bebas
Hubungan antara kesiediaan dengan karakteristik dan aktivitas pedagang kaki lima taman kota Cepu	Kesiediaan [Keberatan/Tidak Keberatan]	Karakteristik dan aktivitas [Usia, Pendidikan, Pendapatan, Modal, Lama Berdagang, dan Luasan Tempat Berdagang]

Sumber : Hasil analisis, 2003

#### 1.7.2.4 Teknik sampling

Sebelum sampel diambil terlebih dahulu harus ditentukan populasinya. Populasi atau *universe* menurut Singarimbun eds. (1995 : 152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi

berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nasir, 1999 : 327). Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan individu, gejala, ataupun peristiwa yang akan diselidiki dan memiliki karakteristik spesifik sebagai sumber data dan sebagai batasan generalisasi dari hasil penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah PKL taman kota Cepu.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampel menurut Hadi (2000 : 70) adalah sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi. Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki. Nasir (1999 : 325) berpendapat bahwa sampel adalah wakil dari populasi yang dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang akan diambil harus dapat mewakili populasi, dimana semakin besar populasi akan semakin besar pula sampelnya. Dalam penelitian ini sejumlah responden diambil dari jumlah populasi yang ada sebagai sampel.

Secara umum, jumlah ukuran sampel yang dibutuhkan dapat dihitung dengan rumus Sevilla, *et al* (1993 : 161) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2} = \frac{240}{1 + 240 \cdot (0,1)^2} \approx 71 \quad (1)$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan, yaitu sebesar 10% (Sevilla, *et al.*, 1993 : 163)

Teknik *sampling* yang dipilih untuk menentukan sampel terhadap populasi PKL taman kota Cepu dalam penelitian ini adalah *stratified random sampling* atau sampel acakan dengan stratifikasi yang menggabungkan antara *proportionate stratified random sampling* dan

*disproportionate stratified random sampling*. Dipilihnya teknik *stratified random sampling* dimaksudkan agar sampel yang akan diambil secara acak nantinya dapat membentuk sub populasi yang mempunyai homogenitas tertentu dan benar-benar dapat mewakili kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebagaimana telah dikemukakan Marzuki (2000 : 47) bahwa dalam teknik *stratified random sampling*, pengambilan sampel dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi sub-sub populasi yang disebut sebagai strata, lapisan, atau kelompok yang lebih kecil. *Proportionate* disini dimaksudkan agar diperolehnya sampel representatif dengan jumlah yang sama bagi setiap kategori dan lebih menggambarkan keadaan populasi yang sesungguhnya, karena telah memperhitungkan ciri-ciri tertentu. Sedangkan pemaduannya dengan *disproportionate* didasarkan atas pertimbangan proporsi yang dianggap peneliti lebih representatif atau juga atas kesengajaan peneliti untuk memperbesar proporsi kategori tertentu yang sangat kecil jumlahnya agar lebih mungkin atau lebih dapat mewakili dibandingkan dengan kategori lainnya (Nasution, 2002 : 91-94). Sehingga dengan cara menggabungkan kedua teknik *sampling* tersebut diharapkan proporsi yang sebenarnya dari setiap kategori menurut populasi PKL taman kota Cepu tidak akan terganggu. Senada dengan hal tersebut, bahwa menurut Arikunto (1998 : 126-127) ada saat dimana banyaknya subjek yang terdapat pada setiap strata atau setiap wilayah tidak sama, oleh karenanya, untuk memperoleh sampel yang representatif, ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya subjek dalam masing-masing wilayah.

Jumlah sampel yang diperlukan terhadap populasi PKL taman kota dapat dirinci sesuai kategori jenis sarana fisik yang digunakan PKL untuk berdagang ataupun menawarkan jasanya pada tabel I.4 berikut.

TABEL I.4  
RINCIAN JUMLAH SAMPEL YANG DIPERLUKAN  
PADA POPULASI PKL TAMAN KOTA CEPU

Kategori	Jenis Sarana Fisik Dagangan PKL Taman Kota Cepu	Jumlah	Ukuran Sampel yang Dibutuhkan [Rumus Sevilla]	Proporsi	Proporsi tiap Kategori	Sampel Proporsional Representatif dengan $\Sigma$ sama tiap Kategori	Sampel Disproporsional Representatif yang lebih Mewakili
1	Gelaran	122	71	122/240 =	0,51x71 =	36	38
2	Warung Semi Permanen	71		71/240 =	0,30x71 =	21	23
3	Gerobak	18		18/240 =	0,07x71 =	5	7
4	Mobil-Mobilan	10		10/240 =	0,04x71 =	3	5
5	Kereta-Keretaan	3		3/240 =	0,01x71 =	1	3
6	Warung Non Permanen	11		11/240 =	0,04x71 =	3	5
7	Potongan Bambu/Kayu Tegakan	5		5/240 =	0,02x71 =	1	3
<b>JUMLAH</b>		240	[ N ]		0,99	70	84

Sumber : Hasil analisis, 2003

Dengan demikian, dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang nantinya diperlukan adalah sebanyak 84 responden yang lebih realistis dapat mewakili populasi PKL taman kota Cepu. Penggunaan teknik *sampling* disproporsional disini dimaksudkan untuk memperbesar proporsi kategori dari jenis sarana kereta-keretaan yang sangat kecil jumlahnya, yaitu hanya 3 (tiga).

Setelah jumlah sampel pada populasi PKL taman kota Cepu diketahui, maka untuk teknis pelaksanaannya akan dipakai teknik *random sampling* atau pengambilan sampel secara acak. Namun dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nantinya, pembagian kuesioner pada masing-masing sampel di setiap populasi yang ingin diselidiki hanya akan diberikan kepada responden yang benar-benar bersedia menjadi sampel atas kemauan sendiri. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengendalikan pengembalian kuesioner yang telah diisi secara optimal.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang disusun sesuai dengan judul dan isi tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

- BAB I      Pendahuluan, memuat latar belakang dilaksanakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah penelitian secara substansi maupun wilayah, kerangka pemikiran, pendekatan dan metodologi penelitian, serta sistematika penulisan;
- BAB II      Tinjauan Persepsi Dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota Terhadap Rencana Pemindahan, berisi berbagai teori yang akan digunakan sebagai variabel-variabel masukan dalam analisis pendekatan;
- BAB III     Gambaran Umum Rencana Pemindahan Pedagang Kaki Lima Taman Kota Ke Taman Di Tuk Buntung Kota Cepu, menginformasikan tentang gambaran umum kota Cepu, gambaran umum taman kota, gambaran umum kawasan Tuk Buntung, serta gambaran umum rencana pemindahan pedagang kaki lima taman kota ke taman di Tuk Buntung;
- BAB IV     Analisis Persepsi Dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota Terhadap Rencana Pemindahan Ke Taman Di Tuk Buntung Kota Cepu, berisi tentang analisis persepsi dan preferensi pedagang kaki lima taman kota Cepu, analisis hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya, analisis hubungan antara teori dengan hasil penelitian, dan pembahasan; serta
- BAB V      Penutup, menyampaikan perihal kesimpulan, rekomendasi, dan usul penelitian lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN PERSEPSI DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN

#### 2.1 Tinjauan Persepsi dan Preferensi

Persepsi menurut Wojowasito (1980 : 143) merupakan istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *perceive* yang dapat diartikan sebagai melihat atau mengamati. Sedangkan Mahyong (1982 : 189) mengemukakan bahwa persepsi berasal dari kata dasar bahasa Inggris *perceive* yang dapat diartikan merasa, mengerti, juga memahami. Pengertian persepsi di atas didukung oleh pengertian persepsi dalam Kamus Tata Ruang yang menyebutkan bahwa persepsi merupakan tanggapan/pengertian yang terbentuk langsung dari suatu peristiwa/pembicaraan atau pengertian yang terbentuk lewat proses yang diperoleh melalui panca indera. Persepsi merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 863) diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Pada dasarnya perilaku seseorang atau apa yang dilakukan seseorang selalu bersumber dari persepsinya terhadap sesuatu dalam menilai diri dan lingkungannya. Perilaku bermula dari penginderaan yang ditafsirkan, kemudian muncul perasaan/emosi yang menimbulkan harapan dan akhirnya menghasilkan tindakan. Sedangkan Gibson, *et al* (1996 : 134) memaknai persepsi sebagai proses kognitif yang dipergunakan oleh seseorang untuk menafsirkan dan memahami lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan penelitian ini, maka persepsi dapat diartikan sebagai hal yang dirasakan/dimengerti oleh subjek (PKL taman kota) terhadap suatu objek (rencana pemindahan PKL taman kota ke taman di Tuk Buntung) yang dirasakan/dimengerti/diamati. Demikian selanjutnya dalam penelitian ini, persepsi PKL taman kota dapat diartikan sebagai

proses kognitif yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami rencana pemindahan yang dirasakan/dimengerti/diamati saat ini.

Preferensi menurut Wojowasito (1980 : 157) merupakan istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *preference* yang dapat diartikan sebagai lebih memilih/suka. Sedangkan preferensi yang dinukil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 894) memiliki arti kecenderungan terhadap suatu hal atau pilihan yang lebih disenangi (prioritas). Preferensi dalam Kamus Lengkap Psikologi diartikan lebih menyukai sesuatu benda daripada benda lainnya (Chaplin, 2002 : 379). Berkaitan dengan penelitian ini, maka preferensi dapat diartikan sebagai pilihan/perlakuan yang lebih disenangi oleh subjek (PKL taman kota) terhadap suatu objek (lokasi aktivitas PKL di taman kota atau taman di Tuk Buntung) yang dirasakan/dimengerti/diamati. Demikian selanjutnya dalam penelitian ini, preferensi PKL taman kota dapat diartikan sebagai kecenderungan/prioritas yang menjadi pilihan lokasi rencana pemindahan aktivitas mereka ke taman di Tuk Buntung yang lebih disenangi.

## **2.2 Tinjauan Sektor Informal**

### **2.2.1 Pengertian**

Menurut Daldjoeni (1998 : 224) pengertian sektor informal secara operasional memang sulit untuk dibakukan karena ada beragam tergantung sudut pandang ilmu yang dipakai. Sektor informal dari sudut pandang ekonomi menunjuk kepada aktivitas ekonomi berskala kecil, padat karya, tidak mementingkan kualifikasi formal, kental dengan rasa kekeluargaan, fleksibilitas tinggi, tidak stabil dan tidak teratur, upah rendah, dan barangkali bebas proteksi.

Studi yang lebih intens dilakukan oleh Hans-Dieter Evers yang menganalogikan sektor ini sebagai sebuah bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan yang digambarkan ini merupakan bentuk berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan yang bergerak dalam unit-unit kecil, sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat sub sistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang ada pada lingkungan sektor informal (Rachbini, 1994 : 3).

Karakteristik sektor informal di Indonesia menurut Hidayat (1987 : 8) secara kualitatif meliputi :

1. Kegiatan yang tidak terorganisasi dengan baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas yang tersedia di sektor formal;
2. Pada umumnya unit usaha tersebut tidak memiliki ijin usaha;
3. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. Unit usaha mudah keluar-masuk dari satu sub sektor ke sub sektor lainnya;
6. Teknologi yang digunakan bersifat tradisional;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil;
8. Tidak perlu pendidikan formal dalam menjalankan usaha, karena pendidikan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja; dan
9. Pada umumnya unit usaha termasuk "*Oneman Enterprise*" dan bila mempekerjakan buruh, dari kalangan sendiri.

Sebelumnya pada tahun 1972 ILO (*International Labour Organization*) mengemukakan tujuh ciri-ciri sektor informal, yaitu kegiatan usaha keluarga, bentuknya kecil-kecilan, bersifat intensif kerja, menggunakan terutama material pribumi, mudah didapatkan oleh konsumen, menggunakan teknologi tepat guna (*appropriate technology*), keterampilan dari yang bersangkutan bukan hasil pendidikan sekolah, usaha pasaran yang tak diatur. Lebih lanjut Sethuraman meringkaskan pengertian sektor informal dari ciri-ciri yang dikemukakan ILO diatas sebagai sektor yang meliputi segala kegiatan komersial yang tak diatur dan kegiatan non-komersial, yang sama-sama tak memiliki struktur organisasi dan operasional. Termasuk didalam sektor informal juga; pasar gelap, pelacuran, babu, koki, serta pembantu serabutan di rumah-rumah (Daldjoeni, 1998 : 222-223). Sedangkan menurut Herlianto (1997 : 64) sektor informal memiliki karakteristik antara lain menggunakan sumberdaya lokal dan tidak memiliki ijin usaha resmi, sehingga usaha sektor informal memiliki keragaman seperti tukang becak, pengangkut sampah, pedagang kaki lima, pengasong rokok dan surat kabar, gerobak jalan, pedagang pikulan, dan sebagainya.

### **2.2.2 Peran sektor informal di kota**

Kegiatan ekonomi di kota oleh Jayadinata (1999 : 146-149) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

1. *Sektor Formal* (perusahaan); yang bentuknya terorganisasi, cara kerjanya teratur, pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dengan upah, dan sebagainya; serta
2. *Sektor Informal*; yang bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri), cara kerja tidak teratur, biaya sendiri atau sumber tidak resmi, dan dikerjakan oleh anggota keluarga.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa di kota-kota beberapa negara berkembang yang bernafkah di sektor informal sebesar 20% sampai 70% atau dapat dikatakan rata-rata 50%. Peran sektor informal di kota adalah sebagai alternatif terdekat atau penolong yang mampu mengatasi masalah pengangguran di wilayah perkotaan. Sektor informal ini pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa dengan skala kecil yang berkembang secara embrional dan kurang atau bahkan tidak terarah. Secara makro kegiatan sektor informal di kota-kota Indonesia dalam pembangunan nasional terutama mengatasi masalah pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan cukup besar manfaatnya, maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk menciptakan suatu suasana/iklim yang kondusif, dengan memperkecil tingkat permasalahan terhadap tata ruang lingkungan kawasan maupun kota.

### **2.2.3 Pedagang kaki lima sebagai bagian dari sektor informal**

Penelitian di Jawa pada tahun 1980 merinci proporsi tenaga kerja informal di kota-kota, yaitu perdagangan 50%, jasa 20%, industri 15%, transportasi 10%, dan konstruksi 5%. Dari situ dapat dilihat bahwa sub sektor *perdagangan* menampung separuh dari seluruh tenaga kerja, disinilah pentingnya *perdagangan kaki lima*. Maka setiap tindakan dari pemerintah yang kurang bijaksana terhadap sub sektor perdagangan tersebut pasti akan menimbulkan semakin parahnya pengangguran di kota (Daldjoeni, 1998 : 225).

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan sebuah istilah yang berasal dari jaman Raffles yaitu "5 (*five*) *feets*", yang menunjuk pada arti sebuah jalur pejalan kaki (*pedestrian*) yang terletak dipinggir jalan selebar lima kaki (Pius Heru Priyanto). Menurut Purwanto (1994 : 14-16) PKL adalah suatu bentuk aktivitas perdagangan yang tidak menetap dan biasanya berlokasi di area jalur pejalan kaki. Area pejalan kaki tersebut lama-kelamaan dipaksa untuk area berjualan pedagang kecil seperti bakso, mie goreng, warung kelontong, tambal ban, penjual

obat, sepatu, mainan, warung makan, dan sebagainya. Di Amerika pedagang semacam ini disebut dengan *Hawkers*, karena kegiatannya yang hinggap dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih menarik dan lebih menguntungkan.

PKL memiliki pengertian yang sama dengan '*Hawkers*', yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar (Mc. Gee dan Yeung, 1977 : 25). Secara mendasar karakteristik PKL adalah sebagai berikut :

1. Tidak terorganisir dan tidak mempunyai ijin;
2. Tidak memiliki tempat usaha yang permanen;
3. Tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus;
4. Modal dan perputaran usahanya berskala relatif kecil; serta
5. Sarana berdagang bersifat *moveable* (mudah dipindahkan).

Karena merupakan bagian dari sektor informal, maka secara garis besar karakteristik PKL tidak ada bedanya dengan karakteristik sektor informal, yaitu :

1. Pola penyebarannya secara embrional tumbuh pada tepi jalan yang mempunyai potensi konsentrasi masyarakat dengan jenis dagangan mulai dari jumlah dan jenis yang minimal hingga berkembang dalam skala yang lebih besar.
2. Waktu berdagang biasanya mulai jam 08.00 WIB hingga jam 16.00 WIB, disamping itu ada pula yang mulai membuka dagangannya pada sore hari sekitar jam 18.00 WIB hingga malam hari, malahan ada yang nyaris semalam suntuk;
3. Pola pelayanannya dengan cara langsung mendasarkan dagangannya sehingga konsumen dapat langsung memilih, menawar, dan bertransaksi. Adapun yang berupa warung makan

terkadang pembeli duduk pada area badan jalan yang merupakan perluasan dari trotoar; serta

4. Sarana fisik PKL dalam menjajakan barang dagangannya menggunakan material yang relatif sederhana biasanya menggunakan barang bekas (seperti spanduk, iklan dan sebagainya). Adapun bentuk sarana dagangan berupa : gerobak, meja, tenda, kios, gelaran dan lain-lain.

Mc. Gee dan Yeung (1977 : 40-44) menyatakan bahwa aktivitas '*hawkers*' menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan tata ruang, karena umumnya perdagangan sektor informal berlokasi pada fasilitas umum, seperti trotoar, ruang terbuka, halte, maupun badan jalan yang mengakibatkan ketidakteraturan wajah kota. Ketidakteraturan wajah kota yang sering kita dapati di kota-kota sekarang ini dengan adanya kehadiran PKL diantaranya adalah :

1. Banyaknya kawasan kumuh yang seringkali dijumpai di daerah-daerah pinggiran sungai;
2. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan kawasan; dan
3. Terhambatnya proses penataan ruang kota yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah mengingat masih banyaknya para pedagang yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian selanjutnya dalam penelitian ini dapat dipahami, bahwa pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang pada umumnya memiliki kesamaan karakteristik dengan sektor informal berupa aktivitas ekonomi berskala kecil, padat karya, tidak mementingkan kualifikasi formal, kental dengan rasa kekeluargaan, fleksibilitas tinggi, tidak stabil dan tidak teratur, upah rendah, serta kemungkinan bebas proteksi, disamping

mempunyai peranan sebagai alternatif terdekat atau penolong yang mampu mengatasi masalah pengangguran di wilayah perkotaan.

### 2.3 Tinjauan Taman Kota sebagai Ruang Publik

Ruang terbuka umum merupakan keseluruhan *landscape* dan *hardscape* (jalan, trotoar dan materi sejenisnya), taman, dan tempat rekreatif dalam suatu lahan kota. Elemen utama ruang terbuka umum terdiri dari taman dan alun-alun serta ruang hijau kota (Shirvani, 1985 : 5). Jenis ruang terbuka umum yang biasanya digunakan oleh aktivitas PKL menurut Manning (1996 : 238) umumnya memiliki karakteristik fisik yang menguntungkan bagi PKL, yaitu ruang terbuka umum yang memiliki aksesibilitas tinggi, sehingga banyak orang yang mengunjungi. Adapun jenis ruang terbuka umum yang biasa digunakan sebagai lokasi aktivitas PKL adalah ruang terbuka aktif, yaitu ruang terbuka umum yang mengundang unsur-unsur kegiatan didalamnya, antara lain bermain, olahraga, upacara, berkomunikasi, berjalan-jalan, tempat bermain, penghijauan di tepi sungai sebagai tempat rekreatif, dan lain-lain (Hakim, 1993 : 17).

Taman (*park*) adalah area yang disediakan untuk penggunaan estetik, pendidikan, rekreatif atau budaya. Sistem taman kota pada prinsipnya terkait dengan kebutuhan rekreatif aktif, termasuk taman kecil nan indah dan taman kota nan lebih besar yang umumnya bersifat alami (Rapuano, 1964 : 28-29).

Didalam bab I Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (2002 : 1) ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya

perbedaan kemampuan, kepentingan, dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

Ruang publik menurut Carr (1992 : 21) merupakan tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas. Ruang publik meliputi jalan, *taman*, dan ruang-ruang terbuka lainnya merupakan ruang dinamis yang potensial untuk memenuhi kebutuhan pergerakan, komunikasi, dan *rekreasi* bagi warga kotanya. Ruang-ruang publik merupakan tempat warga kota dapat saling bertemu untuk melakukan aktivitas fungsional maupun ritual. Karenanya ruang publik biasanya bersifat terbuka, dapat dijangkau oleh siapa saja, secara berkelompok maupun perorangan. Pemanfaatan ruang-ruang publik adalah sebagai ruang pergerakan (koridor pergerakan) maupun ruang untuk aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi.

Selanjutnya menurut Darmawan (2003 : 2) keberadaan ruang publik juga diharapkan mampu memenuhi beberapa kriteria, seperti bermakna (*meaningful*) bagi masyarakat setempat baik individu maupun kelompok, tanggap (*responsive*) terhadap semua keinginan pengguna dan dapat mengakomodir kegiatan yang ada pada ruang publik tersebut, serta dapat menerima berbagai lapisan masyarakat dengan bebas (*democratic*) tanpa ada diskriminasi.

Demikian selanjutnya dalam penelitian ini, taman kota dapat diartikan sebagai ruang publik yang menjadi tempat berkumpulnya warga kota untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat memperkuat ikatan sebagai suatu komunitas, sehingga perlu dipelihara guna menjaga keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap warga kota dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.

## 2.4 Tinjauan Kebijakan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Taman Kota Cepu

Dalam bab III Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Cepu (2002 : 11) disebutkan, bahwa struktur ruang fungsional di kota Cepu memiliki kecenderungan untuk berkembang sebagai daerah kombinasi antara wilayah dengan kegiatan komersial yang berkembang di pusat kota dan secara linear di jalan-jalan utama, kawasan pendidikan dan penelitian, serta kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kota Cepu. Kecenderungan-kecenderungan tersebut dikarenakan struktur fisik kota Cepu terbentuk melalui sumbu-sumbu utama berupa jalan-jalan besar yang berfungsi sebagai koridor utama.

Guna mengantisipasi kecenderungan perkembangan diatas, maka pada bab VI RUTR Kota Cepu (2002 : 1) juga disebutkan bahwa perlunya upaya pengendalian agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Hal tersebut senada dengan bunyi pasal 17 Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Untuk tingkat kabupaten/kota penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perijinan.

Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora mengatur bahwa tempat/lokasi PKL dan sejenisnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan memperhatikan aspek-aspek kondisi, situasi, dan lingkungan. Selanjutnya pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan dan kelestarian taman-taman kota.

Atas pertimbangan tersebut, sebagai tambahan, maka kebijakan lokasi PKL yang menempati taman kota Cepu penting untuk ditinjau baik dari sisi fungsi taman kota sebagai fasilitas rekreasi skala lokal maupun fungsi jalan kolektor primer yang mengelilinginya. Agar para *stakeholder* dapat memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari rencana pemindahan yang semata-mata adalah untuk kepentingan bersama.

#### **2.4.1 Fungsi taman kota Cepu sebagai fasilitas rekreasi skala lokal**

Dalam bab V RUTR Kota Cepu (2002 : 9-10) dinyatakan bahwa pembangunan taman kota tersebut masuk dalam kategori rencana pemenuhan kebutuhan fasilitas olah raga dan rekreasi skala lokal di kota Cepu. Pada bab III RUTR Kota Cepu (2002 : 20) sebelumnya telah dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan fasilitas olahraga dan rekreasi adalah suatu tempat atau bangunan yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan olahraga dan rekreasi berupa lapangan, gedung olahraga, gedung kesenian, gedung serba guna, dan lain-lain, serta dapat difungsikan sebagai tempat bermain anak, pengembangan hobi olahraga bagi masyarakat, dan taman yang dapat membantu menetralsir polusi udara.

#### **2.4.2 Fungsi jalan kolektor primer yang mengelilingi taman kota Cepu**

Taman kota Cepu sebagai ruang publik yang berada pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU telah resmi difungsikan pada Desember 2002. Sesuai peranannya sebagai jalan kolektor, maka jalan Cepu-Randublatung/RSU merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Sesuai sistem jaringannya, pada bab V RUTR Kota Cepu (2002 : 11) telah dijelaskan pula bahwa jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU memiliki fungsi utama sebagai jaringan jalan yang menghubungkan antar kota dengan suatu wilayah kabupaten yang direncanakan dengan kecepatan terendah 40

km/jam dan akses bebas. Disamping itu, dalam bab III Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Ibukota Kecamatan Cepu (1991 : 23) dijelaskan pula bahwa pada jalan kolektor tidak diperbolehkan adanya parkir di sisi jalan (*on street parking*), dan oleh karenanya, sarana parkir khusus (*off street parking*) mutlak diperlukan.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka para PKL yang saat ini telah memanfaatkan lokasi taman kota Cepu sebagai tempat berdagang dan menawarkan jasa pada hakekatnya tidak sesuai dengan RUTR Kota Cepu, serta sangat beresiko baik terhadap keindahan taman kota Cepu maupun kelancaran arus lalu-lintas pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU.

## **2.5 Tinjauan Rencana Pemindahan**

### **2.5.1 Pengertian rencana**

Pengertian rencana (*plan*) menurut Soefaat, *et al.* (1997 : 91) adalah produk dari perencanaan (*planning*), yang merupakan susunan langkah-langkah secara sistematis atau teratur untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah, dapat berbentuk grafis atau visual atau gambar bangunan dan lingkungannya atau dapat juga verbal berupa rangkaian kata-kata. Rencana menurut Perform (2003 : 10) adalah hasil seleksi dari berbagai pilihan alternatif yang diperoleh dari proses peramalan sebelumnya melalui proses analisis dengan berbagai pendekatan.

Sedangkan perencanaan berarti bertindak sekarang untuk yang akan datang atau juga merupakan serangkaian upaya terorganisir dalam memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Bagi Conyers (1984 : 4) perencanaan pada hakekatnya merupakan usaha

secara sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif untuk mencapai sasaran tertentu di masa mendatang.

Perencanaan menurut Glasson (1978 : 19) adalah terutama suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, perencanaan adalah terutama berorientasi kepada masa datang, sangat berkenaan dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijaksanaan dan program yang menyeluruh. Bilamana cara berpikir ini diterapkan, maka dapat dikatakan bahwa perencanaan sedang dilaksanakan.

### **2.5.2 Rencana pemindahan**

Pemindahan atau *removal* menurut Mc. Gee dan Yeung (1977 : 42-50) merupakan salah satu pola pengelolaan aktivitas pedagang kaki lima berdasarkan jenis kebijakan pemerintah secara lokasional (sesuai lokasi rencana tata kota) yang dimaksudkan untuk memindahkan pedagang kaki lima ke satu lokasi lain yang ditentukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Pemindahan ke lokasi tetap ini dapat berupa pasar resmi atau sebuah lokasi khusus yang ditetapkan sebagai lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan istilah relokasi merupakan bentuk pemindahan/pemugaran suatu lokasi baik untuk dijadikan suatu bentuk fungsional baru yang berbeda dari semula maupun perbaikan kondisi yang telah ada. Rencana pemindahan PKL taman kota Cepu, dalam RUTR Kota Cepu Tahun 2002, merupakan rangkaian program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas perdagangan dalam kegiatan penataan PKL tahun 2003-2012 untuk wilayah kelurahan Balun dan kelurahan Cepu yang menjadi bagian dari pusat kota. Rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung juga termasuk dalam kerangka besar skenario penataan kawasan Tuk Buntung.

Dengan demikian selanjutnya dalam penelitian ini dapat dikatakan, bahwa rencana pemindahan PKL taman kota Cepu merupakan salah satu kebijakan pemerintah kabupaten

Blora dalam mengelola aktivitas PKL taman kota secara lokasional sesuai dengan lokasi rencana umum tata ruang kota Cepu tahun 2002, dimana penentuannya didasarkan pada suatu mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif melalui pendekatan “*community driven planning*” dalam Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP).

## **2.6 Tinjauan Faktual Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima terhadap Rencana Pemindahan**

Dalam sub bab ini akan ditinjau fakta-fakta yang berkaitan dengan persepsi dan preferensi pedagang kaki lima terhadap rencana pemindahan berdasarkan aksi-aksi sebagai manifestasi dari aspirasi PKL melalui penelitian-penelitian ataupun kasus-kasus yang relevan. Tinjauan faktual ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai variabel penelitian, menentukan kedudukan penelitian, dan hal-hal terkait yang penting untuk dipahami.

Ahmadi Widodo pada tahun 2000 meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Kota Semarang)”, dengan kesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pemilihan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jenis dagangan, sarana transportasi, modal, pendidikan, umur, jarak dengan tempat keramaian, serta jarak ke tempat tinggal. Hasil penelitian diatas lebih pada upaya menjustifikasi bahwa lokasi usaha para PKL akan sangat mempengaruhi kesediaan mereka untuk pindah demikian juga pentingnya untuk mengetahui faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pemilihan lokasi usaha bagi para PKL.

Dewi S. Julianingsih dalam penelitiannya tahun 2001 menyimpulkan bahwa

meskipun dalam menjalankan usahanya para PKL yang berlokasi di Jalan Thamrin, kota Semarang, dibayang-bayangi dengan peraturan-peraturan yang sewaktu-waktu mengancam eksistensinya, namun para PKL tetap bertekad mempertahankan lokasinya, karena mata pencaharian sebagai PKL adalah merupakan usaha pokok. Para PKL bersedia untuk ditata, tetapi tidak bersedia apabila dipindahkan dari lokasi yang ada sekarang. Hasil penelitian diatas merefleksikan kerasnya upaya rekonsiliasi bagi suatu rencana pemindahan PKL terutama bagi mereka yang telah lama menempati lokasi yang mereka sendiri sebenarnya menyadari akan adanya larangan dan pertentangan hukum yang dihadapi.

Kasus di kota Surakarta, sebanyak tujuh paguyuban pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan Banjarsari dan tergabung dalam Paguyuban Panca Manunggal menganggap tempatnya yang sekarang sangat strategis dan mereka telah memiliki banyak pelanggan. Sehingga mereka dengan tegas menolak rencana pemindahan ke kawasan Semanggi, Silir, bekas resosialisasi WTS Silir yang sudah ditutup (Harian Suara Merdeka, Jumat, 5 Juli 2002). Pada kasus pemindahan aktivitas PKL di kota Surakarta tersebut dapat dijadikan pelajaran yang maknawi bagi pihak pemerintah kabupaten Blora bahwa dalam menyediakan lokasi pindah bagi PKL taman kota Cepu sangat perlu diupayakan suatu lokasi yang dapat menjembatani tuntutan kebutuhan para PKL agar mereka tidak merasa diasingkan pada suatu tempat yang minim akan akses terhadap para konsumen maupun pelanggannya terutama sekali yang berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

Laporan kasus dari kota Malang, di tengah wacana penolakan rencana pemindahan dari sebagian PKL sekitar Pasar Kebalen, ternyata ada puluhan PKL yang berebut kavling di los-los baru Pasar Kedungkandang menandai kavling-kavling strategis pilihannya dengan memasang tali rafia. Ternyata di balik ulah puluhan PKL di Pasar Kedungkandang itu tak lain

menunjukkan bahwa di antara PKL itu justru ada yang senang dipindahkan. Sebab, mereka mendapatkan tempat jualan permanen di tempat yang baru (Harian Surya, Kamis, 18 September 2003). Dari laporan kasus tersebut terlihat nyata bahwa tidak sedikit para PKL yang ingin mendapatkan tempat beraktivitas permanen dan memiliki legalisasi yang sah dari pemerintah di daerah.

Berdasarkan landasan faktual pada hasil penelitian diatas dan sejumlah kasus tentang rencana pemindahan aktivitas pedagang kaki lima yang telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia, dapat disimpulkan suatu fakta bahwa rencana pemindahan aktivitas pedagang kaki lima memiliki hubungan yang signifikan dengan keinginan mereka mendapatkan lokasi usaha yang strategis dan permanen. Adapun faktor-faktor kecenderungan atau prioritas pemilihan (preferensi) lokasi usaha yang mempengaruhi pedagang kaki lima adalah jenis dagangan, sarana transportasi, modal, pendidikan, umur, jarak dengan tempat keramaian, serta jarak ke tempat tinggal, yang menjadi bagian dari karakteristik dan aktivitasnya.

Kedudukan penelitian ini lebih menekankan upaya mengetahui kesediaan pedagang kaki lima taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung melalui kajian persepsi dan preferensinya, serta upaya untuk mengetahui ada ataupun tidak adanya keterkaitan hubungan antara kesediaan pedagang kaki lima taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya, dalam menyikapi rencana pemindahan aktivitasnya ke taman di Tuk Buntung pada waktu yang akan datang. Disamping itu, perbedaan kondisi eksisting taman kota Cepu dan kawasan Tuk Buntung, serta karakteristik dan aktivitas pedagang kaki lima taman kota Cepu, akan menjadi fokus identifikasi awal sebagai bahan masukan dalam proses analisisnya lebih lanjut.

## 2.7 Definisi Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan

Dari tinjauan teori diatas secara operasional dapat didefinisikan beberapa pengertian berkaitan dengan persepsi dan preferensi pedagang kaki lima taman kota terhadap rencana pemindahan, yaitu :

### 1. *Definisi Persepsi dan Preferensi*

*Persepsi* merupakan proses kognitif yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami rencana pemindahan yang dirasakan/dimengerti/diamati saat ini.

Variabel yang dipakai adalah :

- Penafsiran terhadap rencana pemindahan, merupakan persentase jumlah PKL taman kota yang menafsirkan perlunya dilakukan rencana pemindahan; dan
- Pemahaman terhadap rencana pemindahan, merupakan persentase jumlah PKL taman kota yang memahami arti pentingnya rencana pemindahan.

Sedangkan *preferensi* merupakan kecenderungan/prioritas yang menjadi pilihan dan lebih disenangi.

Variabel yang dipakai adalah :

- Penilaian terhadap lokasi taman kota dan kawasan Tuk Buntung, merupakan persentase jumlah PKL taman kota yang menilai kelayakan masing-masing lokasi sebagai tempat berdagang; dan
- Kecenderungan pemilihan antara lokasi taman kota dan kawasan Tuk Buntung yang lebih disenangi PKL taman kota Cepu sebagai responden, merupakan persentase jumlah PKL taman kota yang cenderung memilih masing-masing lokasi yang lebih disenangi sebagai tempat berdagang.

2. *Definisi Pedagang Kaki Lima Taman Kota*

*Pedagang kaki lima (PKL) taman kota* merupakan bagian dari sektor informal yang menggantungkan seluruh ataupun sebagian pemenuhan kebutuhan hidupnya pada sektor informal perkotaan dengan memilih ruang publik kota yang berupa taman sebagai lokasi untuk aktivitas berdagang maupun menawarkan jasanya.

3. *Definisi Rencana Pemindahan*

Rencana pemindahan merupakan salah satu kebijakan pemerintah kabupaten Blora dalam mengelola aktivitas pedagang kaki lima taman kota Cepu secara lokasional sesuai lokasi rencana tata ruang kota Cepu, dimana penentuannya didasarkan pada suatu mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan “*community driven planning*”.

4. *Definisi Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota terhadap Rencana Pemindahan*

Persepsi dan preferensi PKL taman kota terhadap rencana pemindahan disini merupakan kecenderungan/prioritas pemilihan lokasi aktivitas yang dirasakan/dimengerti/diamati dan lebih disenangi oleh PKL taman kota dalam merespon rencana pemindahan aktivitasnya saat ini.

Untuk lebih jelasnya mengenai penelitian ini baik komponen, definisi, variabel, dan indikatornya akan diperlihatkan pada tabel 2.1 berikut.

TABEL II.1  
VARIABEL PENELITIAN

NO.	KOMPONEN	DEFINISI	VARIABEL	INDIKATOR	KUESIONER
		3	4	5	6
1.	Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota Terhadap Rencana Pemindahan.	Kecenderungan/prioritas pemilihan lokasi aktivitas yang dirasakan/dimengerti/diamati dan lebih disenangi oleh PKL taman kota dalam merespon rencana pemindahan aktivitasnya saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecenderungan PKL taman kota dalam memilih aktivitas yang lebih disenangi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah PKL yang memilih lokasi taman kota sebagai tempat beraktivitas.</li> <li>Persentase jumlah PKL yang memilih lokasi Tuk Buntung sebagai tempat beraktivitas.</li> </ul>	<p>Untuk <b>PKL Taman Kota Cepu</b> [Model A-F-2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Antara taman kota Cepu dan taman di Tuk Buntung nantinya, lokasi mana sebenarnya yang cenderung menjadi pilihan/prioritas untuk lokasi kegiatan usaha Saudara?</li> </ul>
2.	Persepsi	Proses kognitif yang dipergunakan untuk menafsirkan dan memahami rencana pemindahan yang dirasakan/dimengerti/diamati saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penafsiran terhadap rencana pemindahan; dan</li> <li>Pemahaman terhadap rencana pemindahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase jumlah PKL taman kota yang memahami arti pentingnya rencana pemindahan.</li> </ul>	<p>Untuk <b>PKL Taman Kota Cepu</b> [Model A-C.1-9]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Saudara tahu ada rencana pembangunan taman di Tuk Buntung?</li> <li>Jika YA, sumber informasi Saudara?</li> <li>Apakah Saudara juga tahu ada rencana Pemkab Blora memindahkan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung?</li> <li>Jika YA, sumber informasi Saudara?</li> <li>Apakah Saudara tahu alasan pemindahan tersebut?</li> <li>Jika TAHU, sumber informasi Saudara?</li> <li>Jika TAHU, apa saja yang menjadi alasan Pemkab Blora?</li> <li>Menurut Saudara, seberapa perlukah rencana tersebut dilaksanakan?</li> <li>Bagaimana sebaiknya keberadaan PKL taman kota Cepu bila dikaitkan dengan rencana pemindahan ke taman di Tuk Buntung nantinya?</li> </ul> <p>Untuk <b>PKL Taman Kota Cepu</b> [Model A-D.1-5]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Saudara keberatan dengan rencana Pemkab Blora memindahkan aktivitas PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung?</li> <li>Jika <b>KEBERATAN</b>, hal-hal apa yang menjadi pertimbangan Saudara?</li> <li>Jika <b>TIDAK EBERATAN</b>, hal-hal apa yang menjadi pertimbangan Saudara?</li> <li>Menurut Saudara, seberapa pentingkah rencana pemindahan aktivitas PKL tersebut?</li> </ul>

Lanjutan Tabel II.1

NO.	KOMPONEN	DEFINISI	VARIABEL	INDIKATOR	KUESIONER
1	2	3	4	5	6
3.	Preferensi	Kecenderungan/prioritas yang menjadi pilihan dan lebih disenangi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian terhadap lokasi taman kota dan taman di Tuk Buntung; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase jumlah PKL taman kota yang menilai kelayakan masing-masing lokasi sebagai tempat beraktivitas PKL.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah ada usulan yang ingin Saudara sampaikan kepada Pemkab Blora berkaitan dengan rencana tersebut?</li> <li>▪ Jika ADA, hal-hal apa saja yang akan Saudara usulkan?</li> </ul> <p>Untuk <b>PKL taman kota Cepu</b> [Model A-E.1-7]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Apakah Saudara memiliki pelanggan?</li> <li>▪ Kalau YA, berapa jumlah pelanggan yang telah dimiliki sampai saat ini?</li> <li>▪ Bagaimana kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan taman kota <u>terutama</u> sekali jika waktu libur umum tiba?</li> <li>▪ Sebagai tempat berusaha, fasilitas apa yang menurut Saudara sangat &amp; masih perlu ditambahkan agar terlihat asri, rapi, dan nyaman?</li> <li>▪ Menurut pertimbangan Saudara, antara taman kota Cepu dan taman di Tuk Buntung nantinya, lokasi yang paling layak sebagai tempat berusaha PKL di kota Cepu?</li> </ul> <p>Untuk <b>PKL taman kota Cepu</b> [Model A-F.1-2]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menurut Saudara, antara taman kota Cepu dan taman di Tuk Buntung nantinya, lokasi mana yang paling strategis sebagai tempat berusaha?</li> <li>▪ Jadi untuk kegiatan usaha Saudara, antara taman kota Cepu dan taman di Tuk Buntung nantinya, menurut Saudara, lokasi mana sebenarnya yang cenderung menjadi pilihan/prioritas?</li> </ul>

Sumber : Hasil kajian teori, 2003

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM RENCANA PEMINDAHAN PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**

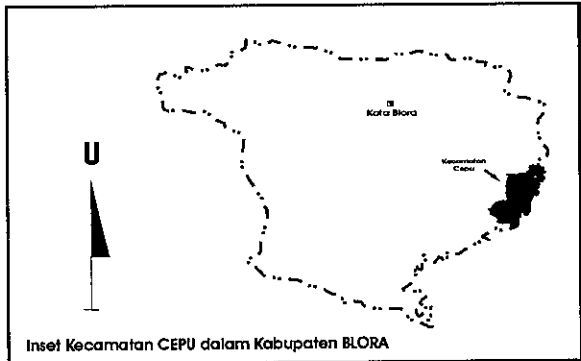
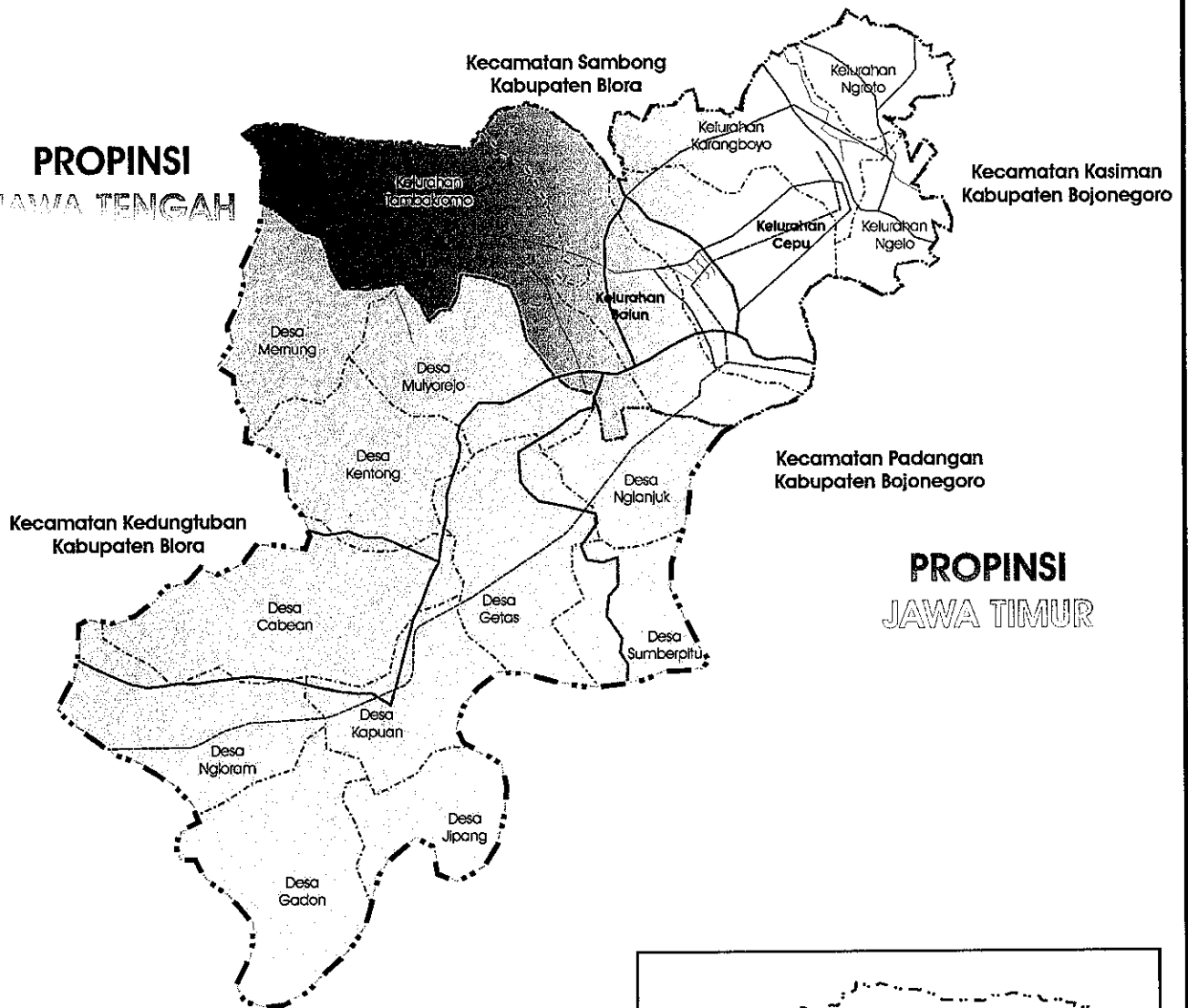
### **3.1 Gambaran Umum Kota Cepu**

Gambaran umum kota Cepu disini akan disajikan sebatas kebutuhan informasi yang berkaitan dengan arah dan pengembangan kota Cepu, serta kebijakan umumnya berupa program dan kebijakan. Kebijakan umum dimaksud adalah kebijakan yang menjadi landasan bagi ditetapkannya rencana pemindahan pedagang kaki lima taman kota ke taman di Tuk Buntung kota Cepu.

Kota Cepu sebagai wilayah penelitian terletak tepatnya di arah tenggara wilayah administrasi kabupaten Blora yang berjarak tempuh 34 km dari kota Blora dan berada di bagian utara kecamatan Cepu sebagaimana disajikan dalam peta batas-batas kota Cepu pada gambar 3.1 berikut. Secara administratif, batas-batas kota Cepu adalah sebagai berikut :

- sebelah Utara : kecamatan Sambong (kabupaten Blora, propinsi Jawa Tengah);
- sebelah Timur : kecamatan Padangan & kecamatan Kasiman (kabupaten Bojonegoro, propinsi Jawa Timur);
- sebelah Selatan : desa Nglanjuk & desa Mulyorejo (kecamatan Cepu); dan
- sebelah Barat : kecamatan Kedungtuban (kabupaten Blora, propinsi Jawa Tengah).

**PROPINSI  
JAWA TENGAH**



Inset Kecamatan CEPU dalam Kabupaten BLORA



**PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**



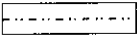

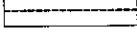
**TESIS**

**KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI  
PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA  
TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN  
KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**

**PETA**

**BATAS-BATAS KOTA CEPU**

**LEGENDA :**

-  Batas Kecamatan Cepu Terhadap Kabupaten Blora
-  Batas Kota Cepu Terhadap Kecamatan Cepu
-  Batas Kelurahan/Desa
-  Jaringan Jalan
-  Kereta Api

**UTARA**



**NO. GAMBAR**

**SKALA**

**3.1**



**SUMBER**

**BAPPEDA KABUPATEN BLORA**

**NOMOR HALAMAN**

**49**

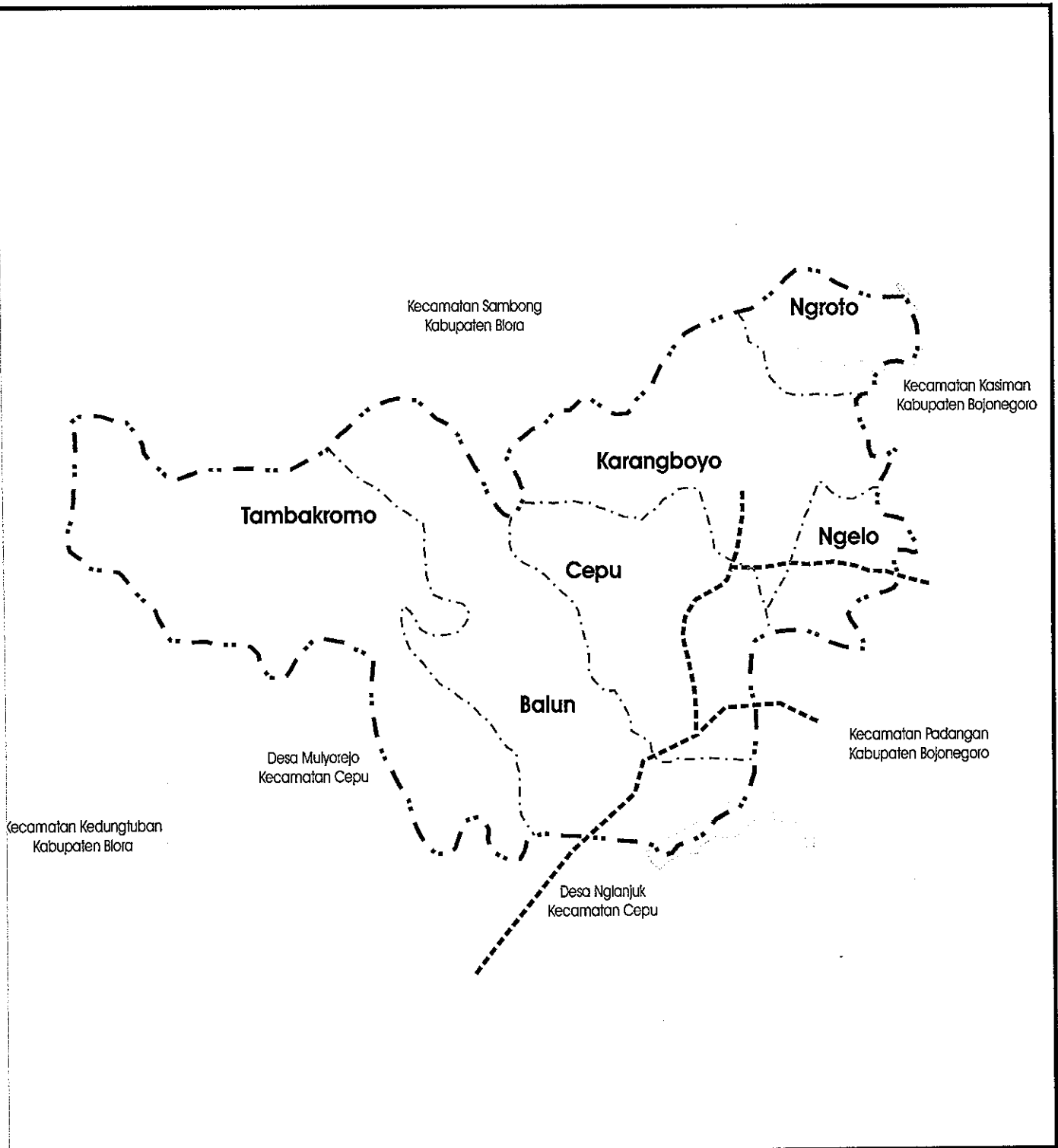
Kota Cepu terdiri dari 6 kelurahan yang bersifat kekotaan dari 17 desa/kelurahan yang ada di kecamatan Cepu sebagaimana dapat dilihat dalam peta administrasi kota Cepu pada gambar 3.2 berikut. Wilayah perencanaan kota Cepu meliputi Tambakromo, Balun, Cepu, Ngelo, Karangboyo dan Ngroto dengan luas 1.996,78 Ha (hektar). Secara lebih jelas, luas wilayah administratif masing-masing kelurahan/desa dan keseluruhan kota Cepu dapat dilihat pada tabel III.1 berikut.


TABEL III.1  
LUAS WILAYAH KOTA CEPU





No	Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Tambakromo	741,81	37,15
2.	Balun	458,75	22,97
3.	Cepu	246,56	12,35
4.	Ngelo	82,77	4,15
5.	Karangboyo	329,60	16,51
6.	Ngroto	137,29	6,88
<b>Jumlah</b>		<b>1.996,78</b>	<b>100,00</b>



Sumber : RUTR Kota Cepu Tahun 2002

Kondisi topografi kota Cepu yang meliputi 6 kelurahan secara global berupa dataran dan perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 0% - 15% dan ketinggian rata-rata 30 meter diatas permukaan air laut.



  
**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**TESIS**  
**KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI**  
**PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA**  
**TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN**  
**KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**  
**PETA**  
**ADMINISTRASI KOTA CEPU**

<b>LEGENDA :</b>	
	Batas Kota
	Batas Kelurahan
	Rel Kereta Api
	Sungai Bengawan Solo
<b>NOMOR HALAMAN</b>	<b>51</b>

<b>UTARA</b>	
	
<b>NO. GAMBAR</b>	<b>SKALA</b>
<b>3.2</b>	
<b>SUMBER</b>	
<b>BAPPEDA KABUPATEN BLORA</b>	

Penduduk kota Cepu dalam kurun waktu 1996 – 2000 mengalami peningkatan sebesar 1,29%. Sejak tahun 1996, penduduk terbesar berada di kelurahan Cepu dan Balun, sedangkan Ngroto merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk paling kecil. Tingginya jumlah penduduk di kelurahan Cepu dan Balun berkaitan lengkapnya fasilitas perkotaan yang ada di kedua kelurahan tersebut. Selain itu juga banyak terdapat kegiatan-kegiatan utama kota. Hal ini tentunya menarik penduduk untuk tinggal di kelurahan tersebut. Jumlah penduduk tahun 1996 – 2000 beserta proporsi perkembangannya di masing-masing kelurahan di kota Cepu dapat dilihat pada tabel III.2 berikut.

TABEL III.2  
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA CEPU TAHUN 1996 – 2000

No.	Kelurahan	Perkembangan Jumlah Penduduk					Pertumbuhan (%)	
		1996	1997	1998	1999	2000		
1.	Tambakromo	Jumlah	4446	4461	4463	4462	4454	0,18%
		Persentase	8,89%	8,89%	8,89%	8,86%	8,82%	
2.	Balun	Jumlah	11964	12005	12007	12004	11984	0,17%
		Persentase	23,93%	23,93%	23,92%	23,84%	23,74%	
3.	Cepu	Jumlah	18335	18398	18322	18397	18432	0,53%
		Persentase	36,68%	36,68%	36,50%	36,54%	36,51%	
4.	Ngelo	Jumlah	5200	5218	5198	5140	5190	- 0,19%
		Persentase	10,40%	10,40%	10,35%	10,21%	10,28%	
5.	Karangboyo	Jumlah	7370	7395	7507	7606	7676	4,08%
		Persentase	14,74%	14,74%	14,95%	15,11%	15,20%	
6.	Ngroto	Jumlah	2672	2681	2707	2744	2752	2,96%
		Persentase	5,35%	5,35%	5,39%	5,45%	5,45%	
<b>Jumlah</b>			49987	50158	50204	50353	50488	<b>1,29%</b>

Sumber : RUTR Kota Cepu Tahun 2002

Sebagian besar penduduk kota Cepu sesuai urutannya bekerja sebagai *pedagang*, buruh industri, *profesi lainnya*, PNS/TNI, dan buruh bangunan. Sedangkan sisanya bekerja sebagai petani, pensiunan, pengangkutan, buruh tani, pengusaha, dan nelayan. Rincian penduduk kota Cepu dilihat dari mata pencahariannya ditampilkan pada tabel III.3 dibawah ini.

**TABEL III.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA CEPU MENURUT MATA PENCAHARIAN TAHUN 2000**

No.	Kelurahan	Peta- ni	Buruh Tani	Nela- yan	Peng- usaha	Buruh Industri	Buruh Jangunar	Peda- gang	Pengang- kutan	PNS / TNI	Pen- siunan	Lain- nya
1.	Tambakromo	879	106	4	2	160	49	199	6	74	20	150
2.	Balun	26	41	2	4	2901	345	3791	190	489	426	2535
3.	Cepu	20	40	-	6	980	509	3096	200	2298	335	2700
4.	Ngelo	29	5	-	1	560	702	345	70	400	149	196
5.	Karangboyo	206	70	-	2	899	690	750	25	102	39	40
6.	Ngroto	91	45	-	3	650	90	60	50	-	-	-
<b>Jumlah</b>		1251	307	6	18	6150	2385	8241	541	3363	969	5621
<b>Persentase</b>		4,33%	1,06%	0,02%	0,06%	21,31%	8,26%	28,56%	1,87%	11,65%	3,35%	19,48%

Sumber : RUTR Kota Cepu Tahun 2002 (diolah)

Banyaknya penduduk kota Cepu yang berprofesi lainnya menunjukkan banyaknya penduduk bekerja pada sektor informal yang terkonsentrasi pada kelurahan Cepu dan Balun. Keberadaan sektor informal ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan kota Cepu sebagai pusat perdagangan bagi wilayah yang ada di sekitarnya.

Sebagian besar penduduk kota Cepu telah mengenyam pendidikan formal. Hanya sekitar 15,19% dari total penduduk yang belum mendapatkan pendidikan formal atau belum menyelesaikan pendidikan dasar sebagaimana ditampilkan pada tabel III.4 berikut.

**TABEL III.4**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA CEPU MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2000**

No.	Kelurahan	PT/ Akademi	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SD/ Sederajat	Tidak Tamat SD	Belum Tamat SD	Tidak Sekolah
1.	Tambakromo	10	229	545	1090	40	252	60
2.	Balun	1506	2845	3901	8750	150	595	90
3.	Cepu	340	1509	1750	1091	109	1400	120
4.	Ngelo	270	1350	1950	2013	91	850	89
5.	Karangboyo	75	250	695	975	85	1190	80
6.	Ngroto	0	0	0	0	79	310	90
<b>Jumlah</b>		2201	6183	8841	13919	554	5151	529
<b>Persentase</b>		5,88%	16,54%	23,65%	37,23%	1,48%	13,78%	1,41%

Sumber : RUTR Kota Cepu Tahun 2002 (diolah)

Struktur ekonomi utama kota Cepu bertumpu pada sektor perdagangan, industri dan jasa atau ekonomi non agraris. Hal ini juga ditunjukkan dari struktur mata pencaharian penduduk kota Cepu pada tabel III.3, yang sebagian besar bekerja di sektor non pertanian, yaitu sebagai pedagang dengan persentase sebesar 28,65%, sebagai buruh industri sebesar 21,31% dan bekerja di sektor jasa dengan persentase sebesar 19,48%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% penduduk kota Cepu bekerja di sektor non agraris.

Besarnya penduduk kota Cepu yang bekerja di sektor non agraris selain disebabkan karena kondisi fisik alam yang kurang mendukung kegiatan agraris juga disebabkan karena fungsi dan peran kota Cepu bagi wilayah di sekitarnya, yaitu sebagai daerah pemasaran hasil pertanian sebelum didistribusikan ke daerah lain. Dengan melihat perkembangan kota Cepu saat ini, dimungkinkan sektor ini akan semakin berkembang pesat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan wilayah yang ikut berperan dalam mendukung dan mengarahkan perkembangan kota Cepu.

Pertumbuhan ekonomi kota Cepu dihadapkan pada masalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang masih belum dapat mendukung perkembangan kota Cepu yang lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan wilayah sekitarnya. Potensi ekonomi kota Cepu adalah letak geografis yang cukup strategis berada pada jalur Blora-Cepu-Bojonegoro yang memungkinkan adanya aliran barang, orang, dan jasa antar kota-kota tersebut, sehingga sangat berpengaruh pada perkembangan perdagangan dan jasa yang ada di kota Cepu sebagai sektor ekonomi yang sangat dominan. Kontribusi dari sektor perdagangan dan jasa adalah berupa jasa pelayanan yang *inputnya* berasal dari kelompok sektor primer dan sekunder. Nilai produksi kegiatan perdagangan dan jasa dipengaruhi oleh volume industri sektor lainnya, disamping pola

konsumsi dan daya beli masyarakat. Selain letak geografis, perkembangan ekonomi kota Cepu juga didukung oleh fungsi dan peran kota Cepu terhadap wilayah sekitarnya terutama berkaitan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki kecamatan Cepu dan sekitarnya. Keberadaan kota Cepu dengan fungsi dan perannya yang sangat strategis bagi perkembangan wilayah kecamatan Cepu sudah tentu memiliki kontribusi yang tidak sedikit bagi laju pertumbuhan ekonomi kecamatan Cepu.

Penggunaan lahan di kota Cepu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berupa fisik dasar, posisi geografis, dan keragaman aktivitas kota, dimana bagian terbesar dari penggunaannya adalah untuk permukiman/perumahan sebesar 43,37% dan pertanian sebesar 39,61% dari keseluruhan luas wilayah administrasi kota Cepu yang selengkapnya disajikan pada tabel III.5 dibawah ini.

TABEL III.5  
PENGUNAAN LAHAN DI KOTA CEPU TAHUN 2001

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman/Perumahan	865,94	43,37%
2.	Perdagangan	47,79	2,39
3.	Perkantoran	11,98	0,60
4.	Pendidikan	21,17	1,06
5.	Peribadatan	5,85	0,29
6.	Kesehatan	4,00	0,20
7.	Terminal	2,27	0,11
8.	Makam	16,83	0,84
9.	Ruang Hijau	15,60	0,78
10.	Pertanian	790,99	39,61
11.	Hutan	68,70	3,44
12.	Pertamina	93,40	4,68
13.	Perhutani	34,14	1,71
14.	PT. KAI	15,72	0,79
15.	Industri Kecil	2,40	0,12
<b>Jumlah</b>		<b>1.996,78</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Evaluasi RUTRK IKK Cepu Tahun 2001

Dalam bab V RUTR kota Cepu (2002 : 24-25) disebutkan bahwa pemanfaatan ruang (*space use*) yang direncanakan telah disesuaikan dengan jenis fungsi kegiatan yang diarahkan perkembangannya di kota Cepu. Rencana pemanfaatan ruang ini merupakan rencana penggunaan lahan yang meliputi penggunaan lahan untuk perumahan, pertanian, perdagangan dan jasa, pelayanan sosial dan industri. Rencana pemanfaatan ruang juga mempertimbangkan ketersediaan lahan, keterkaitan antar kegiatan, fungsi dan peran kawasan, serta potensi dan masalah kawasan. Berdasarkan fungsi dan peran, pengembangan penduduk, rencana struktur, dan pengembangan fasilitas pelayanan, maka penggunaan lahan di kota Cepu ditentukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

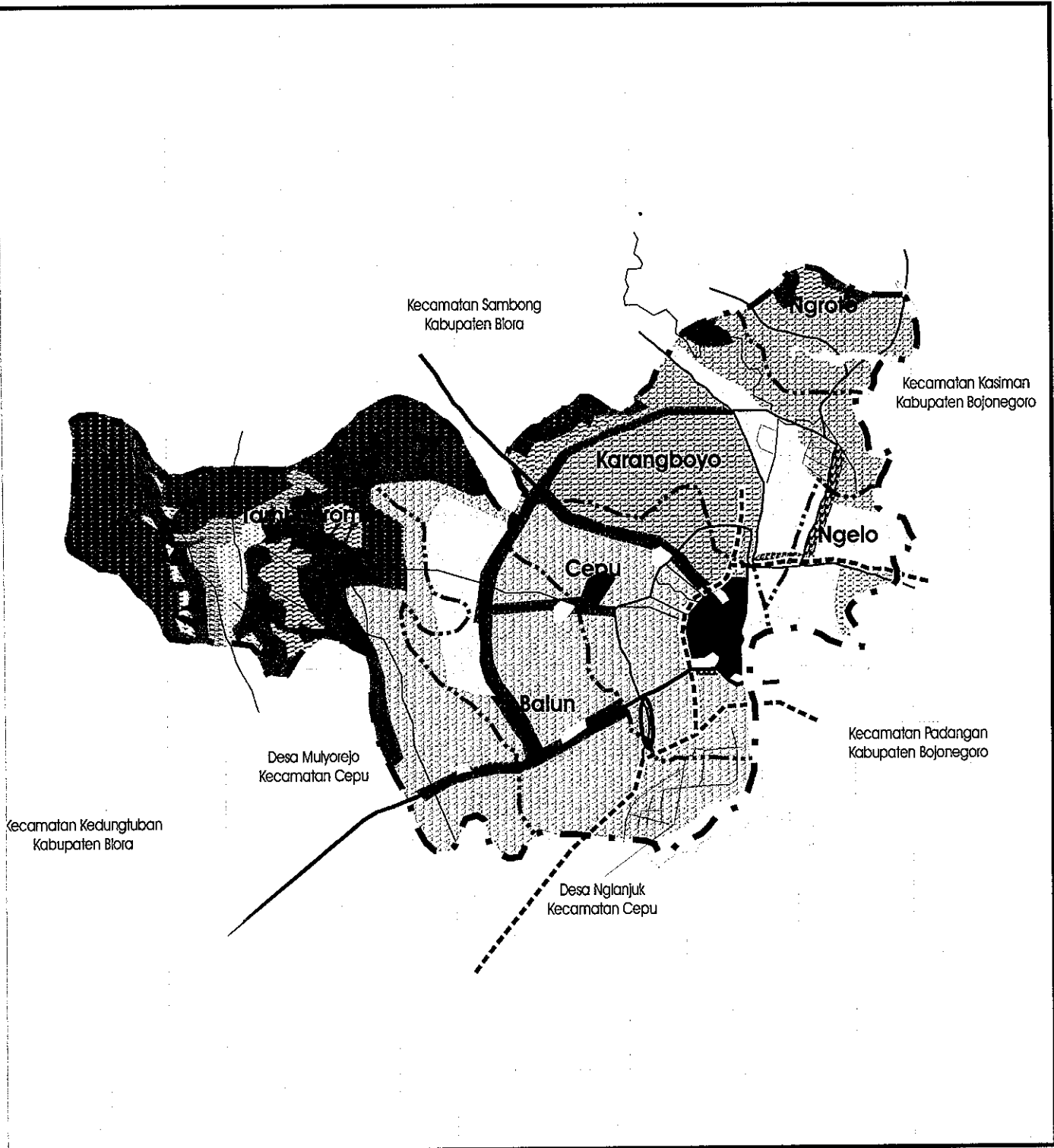
1. Potensi daya dukung lahan yang ada, dimana lahan yang kosong atau yang belum dimanfaatkan akan dikembangkan secara optimal untuk penggunaan lahan yang produktif; dan
2. Penggunaan lahan eksisting yang sudah ada, dimana sejauh tidak menyimpang dari struktur ruang yang sudah direncanakan, maka guna lahan eksisting masih dapat dipertahankan dengan penataan dan pengaturan lebih lanjut.




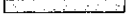










Penggunaan lahan kota Cepu diarahkan secara fungsional dalam upaya memberikan keseimbangan pada kecenderungan perkembangan kegiatan di masing-masing kawasan yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kawasan permukiman/perumahan, dengan *kepadatan sedang sampai tinggi* diarahkan pada kawasan pusat kota (kelurahan Cepu dan Balun) serta permukiman/perumahan dengan *kepadatan rendah sampai sedang* diarahkan pada kawasan pengembangan kota (kelurahan Ngroto, Karangboyo, Ngelo, dan Tambakromo);

2. Kawasan perdagangan dan jasa, diarahkan pengembangannya di sekitar pasar baru dan terminal, sedangkan untuk pusat-pusat perdagangan yang telah ada di kota Cepu saat ini, yaitu di sekitar pasar lama, perlu pengaturan lebih lanjut agar tidak semrawut dan arus lalu lintas menjadi lancar;
3. Kawasan perkantoran, pengembangannya baru diarahkan di bagian barat (kelurahan Tambakromo). Hal ini selain bertujuan untuk mengembangkan kawasan di sebelah barat juga untuk memecah pola pergerakan agar tidak terkonsentrasi di kawasan pusat kota;
4. Fasilitas umum, penempatannya disesuaikan dengan penempatan dan hierarki-hierarki pusat pelayanan. Pengembangan fasilitas umum bersifat aglomerasi (pemusatan/pengelompokan secara fisik) ini akan mempermudah warga sekitarnya dalam memanfaatkan fasilitas tersebut serta menguntungkan dalam pengadaan sarana-prasarana penunjangnya.
5. Kawasan konservasi, sesuai RTRW kabupaten Blora tetap dipertahankan keberadaannya, yaitu wilayah yang ada disepanjang aliran sungai Bengawan Solo dan kawasan hutan jati (milik PT. Perhutani). Sedangkan dalam skala kota perlu pengaturan yang lebih jelas tentang penetapan garis sempadan sungai yang melewati kawasan perkotaan Cepu.

Guna lahan kota Cepu secara fungsional untuk lebih lengkapnya telah disajikan pada gambar 3.3 berikut ini.



 <b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> <b>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH &amp; KOTA</b> <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>LEGENDA :</b> ——— Batas Kota - - - - - Batas Kelurahan - - - - - Rel Kereta Api  Sungai Bengawan Solo  Permukiman  Perkantoran  Perdagangan & Jasa  Kawasan Campuran  Sawah  Tegalan  Hutan  Olah Raga & Rekreasi		 Taman Kota  Tuk Buntung	<b>UTARA</b> 
	<b>TESIS</b> <b>KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI</b> <b>PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA</b> <b>TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN</b> <b>KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU</b>	<b>NO. GAMBAR</b> <b>3.3</b>	<b>SKALA</b> 	<b>SUMBER</b> <b>RUTRK CEPU 2002</b>
<b>PETA</b> <b>RENCANA GUNA LAHAN KOTA CEPU</b>	<b>NOMOR HALAMAN</b> <b>58</b>			

Sistem pergerakan kota Cepu banyak dipengaruhi oleh penggunaan lahan dan struktur ruang kota yang terjadi. Jumlah penduduk dan tingkat pelayanan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan juga akan mempengaruhi sistem pergerakan yang terjadi. Struktur jaringan jalan dimaksudkan untuk menghubungkan kegiatan atau fungsi yang satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan itu, fungsi jaringan jalan di kota Cepu ditetapkan dalam dua kelompok, yaitu jalan primer dan sekunder. Fungsi jalan primer meliputi :

- *Jalan Kolektor Primer*, yaitu jalan yang menghubungkan antara Blora-Cepu-Bojonegoro dan Cepu-Randublatung; dan
- *Jalan Lokal Primer*, yaitu jalan yang menghubungkan antara Sambong-Cepu dan Kasiman.

Sedangkan fungsi jalan sekunder meliputi *Jalan Kolektor Sekunder*, yaitu jalan yang menghubungkan antara pusat kota dengan kawasan pusat pengembangan yang direncanakan. Pada gambar 3.4 berikut akan lebih jelas disajikan fungsi-fungsi jaringan jalan di kota Cepu tersebut.

Beberapa permasalahan dalam sistem jaringan jalan kota Cepu adalah sebagai berikut :

1. Bercampurnya arus lalu lintas lokal, regional, dan menerus, sehingga menyebabkan volume lalu lintas di beberapa ruas jalan yang ada di kota Cepu cukup tinggi terutama pada jam-jam sibuk;
2. Terdapatnya beberapa ruas jalan dengan kondisi yang kurang baik sehingga dapat mengurangi aksesibilitas di kota Cepu;

3. Penggunaan bahu dan sebagian badan jalan terutama di pusat kota (sekitar pasar lama) untuk parkir kendaraan yang menyebabkan kapasitas jalan menjadi berkurang sehingga menjadi rawan macet; dan
4. Masih kurangnya jaringan jalan yang dapat menjangkau ke daerah belakang bagian barat kota Cepu sehingga bagian ini kurang berkembang.

### **3.1.1 Arah dan perkembangan**

Kecenderungan arah dan perkembangan kota Cepu yang sangat dominan sekali dipengaruhi oleh munculnya fasilitas perdagangan dan jasa. Penggunaan fasilitas perdagangan dan jasa masih memanfaatkan kawasan pusat kota. Kawasan di sepanjang jalan Cepu-Randublatung/RSU akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga perlu diarahkan pada suatu penataan fungsi kawasan.

### **3.1.2 Kebijakan umum**

Kebijakan umum dalam pembangunan kota Cepu menganut azas keseimbangan antara pengembangan sumberdaya manusia, pemanfaatan sumberdaya alam, dan kelestarian lingkungan. Beberapa strategi diantaranya yang digunakan dalam rangka pengembangan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Strategi penggunaan unsur-unsur ruang kota, dikaitkan dengan tujuan dalam rangka mencapai keseimbangan perkembangan ruang terbuka dengan wilayah belakangnya untuk pencapaian efisiensi dan efektifitas masing-masing fungsi dengan kriteria utama adalah hirarki ruang yang menjamin pelaksanaan fungsi utama kota secara efisien, serta kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan kriteria pendukung adalah hirarki ruang yang menjamin pelaksanaan fungsi pendukungnya secara efisien;

2. Strategi pemeliharaan aset dan hasil-hasil pembangunan, dikaitkan dengan tujuan penataan peruntukan, serta penataan geometris peruntukan lahan agar berbagai aset dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai tetap atau meningkat fungsinya, kriterianya adalah jenis-jenis peruntukan yang boleh dan tidak boleh menempati kawasan sekitar fungsi strategis; serta
3. Strategi pengembangan kawasan khusus, dikaitkan dengan usaha-usaha mengembangkan kawasan khusus, kriterianya adalah pola tata ruang di sekitar kawasan khusus.

### **3.1.2.1 Program**

Sesuai arahan RUTR kota Cepu yang tertera dalam bab III RDTRK IKK Cepu (1991 : 35), rencana pelaksanaan pembangunan kota Cepu ditetapkan menurut tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Tahap pertama : Tahun 1990/1991 – 1993/1994
- Tahap kedua : Tahun 1994/1995 – 1998/1999
- Tahap ketiga : Tahun 1999/2000 – 2003/2004
- Tahap keempat : Tahun 2004/2005 – 2008/2009
- Tahap kelima : Tahun 2009/2010

Artinya saat ini kota Cepu telah memasuki pembangunan tahap keempat, dan bahwa titik berat setiap tahap selalu diupayakan penyesuaiannya dengan materi tahapan Pelita Daerah dan Nasional, dengan tiap-tiap tahap berisikan program-program makro yang dilaksanakan secara selaras. Program-program pembangunan di kota Cepu pada setiap tahapan selalu ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan pokok dengan tujuan agar dapat ditetapkan prioritas pembangunan/pengembangan dan tahapan pelaksanaannya sampai tahun 2009 sebagai berikut :

1. Besarnya kebutuhan pembangunan, ditentukan menurut ukuran peningkatan jumlah penduduk pada setiap tahapan;
2. Adanya sektor-sektor kegiatan serta satuan-satuan bagian wilayah kota yang menonjol, sehingga perlu diprioritaskan pengembangannya, namun kegiatan pembangunannya selalu disesuaikan dengan program-program pembangunan berskala pelayanan lebih luas untuk menjamin kontinuitas program pembangunan dalam skala nasional maupun regional;
3. Adanya bagian wilayah kota yang segera membutuhkan pembangunan dikarenakan besarnya masalah yang dihadapi, sehingga memerlukan penyelesaian yang cepat; dan
4. Adanya bagian wilayah kota yang memiliki tingkat perkembangan tinggi, dalam arti dengan sentuhan investasi yang relatif kecil akan mampu membangkitkan perkembangan yang pesat.

Untuk mewujudkan pembangunan kota Cepu yang mendukung skenario pengembangan wilayah, maka didalam RUTR kota Cepu tahun 2003-2012 telah diindikasikan program pembangunan berupa pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas. Pada program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas tersebut untuk kegiatan perdagangan telah diindikasikan pengaturan sempadan jalan dan parkir kawasan perdagangan tahun 2003-3007, serta penataan pedagang kaki lima (PKL) untuk wilayah kelurahan Balun dan kelurahan Cepu tahun 2003-2012. Untuk kegiatan olahraga dan rekreasi telah pula diindikasikan pengembangan dan penataan taman kota tahun 2003-2012. Selanjutnya pada program peningkatan sistem transportasi di kota Cepu terdapat pula indikasi kegiatan program berupa penataan kawasan sekitar stasiun kereta api Balun tahun 2004-2006. Untuk lebih jelasnya, maka cuplikan indikasi program pembangunan RUTR kota Cepu tahun 2003-2012 dapat dilihat pada tabel III.6 berikut atau lebih lengkap pada lampiran 5.

**TABEL III.6**  
**CUPLIKAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN**  
**RUTR KOTA CEPU TAHUN 2003-2012**

Nc	Program	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan																
				Tahap I					Tahap II											
				2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012							
1.	Pengaturan, Pengembangan, dan Penyediaan Fasilitas	A. PERDAGANGAN																		
		▪ Pengaturan sempadan jalan dan parkir kawasan perdagangan	BWK 1 : Cepu & Balun BWK 3 : Balun																	
		▪ Penataan pedagang kaki lima (PKL)	BWK 1 : Cepu & Balun BWK 3 : Balun																	
		E. OLAHRAGA dan REKREASI																		
		▪ Pengembangan dan penataan taman kota	Seluruh Kota																	
2.	Peningkatan Sistem Transportasi	A. TRANSPORTASI DARAT																		
		▪ Penataan kawasan sekitar stasiun KA Balun	BWK 1 : Balun																	

Sumber : RUTR Kota Cepu Tahun 2002

### 3.1.2.2 Kebijakan

Sebagaimana pentingnya suatu penataan fungsi kawasan pusat kota Cepu guna mengantisipasi kecenderungan pesatnya perkembangan kawasan di sepanjang jalan Cepu-Randublatung/RSU, maka diperlukan pula suatu kebijakan yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. Untuk tingkat kabupaten/kota penyelenggaraan pengendalian

pemanfaatan ruang dilakukan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perijinan.

Di kota Cepu diberlakukan produk kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 1990 yang mengatur tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora. Dalam Perda tersebut terdapat 4 (empat) pasal yang berkaitan dan mengatur tentang aktivitas perdagangan kaki lima, yaitu pasal 12, pasal 14 ayat 2, pasal 16 ayat 2 butir a dan b, serta pasal 19 ayat 2. Pada pasal 12 diatur bahwa tempat/lokasi PKL dan sejenisnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, dengan memperhatikan aspek-aspek kondisi, situasi, dan lingkungan. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan dan kelestarian taman-taman kota. Selanjutnya pada pasal 16 ayat 2 ditetapkan bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, dilarang :

- a. menggunakan trotoar dan jalan umum untuk kegiatan yang dapat mengganggu lalu-lintas, kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.
- b. menempatkan barang-barang yang dapat mengganggu ketertiban, kelancaran lalu-lintas, kecuali mendapat ijin Bupati Kepala Daerah.

Disamping itu, dalam rangka pembinaan kebersihan, ketertiban, dan keindahan, Bupati Kepala Daerah dapat pula menetapkan pembentukan komando pengendalian sebagaimana tertera pada pasal 19 ayat 2 Perda tersebut dalam lampiran 6.

Melalui gambar 3.3 diatas dapat dilihat bahwa guna lahan kawasan yang mengelilingi taman kota Cepu direncanakan sebagai kawasan campuran dan kawasan Tuk Buntung direncanakan sebagai kawasan permukiman, dimana kedua kawasan tersebut akan dikembangkan selaras dengan arah kebijakan pengembangan wilayah kota Cepu. Kebijakan

pengembangan wilayah kota Cepu didukung oleh beberapa strategi pencapaian sebagaimana telah dijelaskan dalam kebijakan umum sebelumnya. Kebijakan untuk membangun taman kota Cepu dan taman di Tuk Buntung merupakan rangkaian program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas di dalam kegiatan pengembangan dan penataan taman kota tahun 2003-2012.

### **3.2 Gambaran Umum Taman Kota Cepu**

Sebagai ruang publik, taman kota Cepu yang mulai difungsikan pemanfaatannya oleh pemerintah kabupaten Blora bagi warga masyarakat pada bulan Desember 2002, merupakan rangkaian kebijakan perencanaan pembangunan taman tahap I di kota Cepu dari tiga tahap pembangunan taman yang telah direncanakan. Taman kota Cepu terletak pada jalur jalan kolektor primer RSU/Cepu-Randublatung selebar 4,5 m yang melingkarinya persis di depan rumah sakit umum (RSU) Cepu. Dalam bab II RTRK Cepu (1998 : 21) juga dijelaskan bahwa ruas jalan Cepu-Randublatung/RSU memiliki status sebagai jalan propinsi dengan klasifikasi fungsional sebagai jalan kolektor primer yang menghubungkan Wirosari-Kuwu-Cepu-Bojonegoro.

#### **3.2.1 Kondisi fisik**

Taman kota Cepu terbagi tiga yang masing-masing bagian berbentuk elipsoidal memanjang dari arah timur ke barat di depan RSU Cepu dengan panjang keseluruhan 320 m, termasuk jalan yang membelah tiap-tiap bagian taman untuk setiap kendaraan yang ingin berbalik arah, dan memiliki lebar keseluruhan 23 m, termasuk pembangunan saluran drainase yang mengitari pinggiran tiap bagian taman kota. Sedangkan panjang dan lebar taman menurut

catatan proyek pembangunan taman yang diinformasikan melalui Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP) kabupaten Blora adalah 292 m x 23 m.

Taman kota Cepu dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya berupa dua buah kran air bersih disetiap bagian taman masing-masing satu di sebelah timur dan barat, beberapa tong sampah, tempat pembuangan sementara (TPS), kursi beton, pot beton berisi pasir, pot beton berisi pohon palem, pohon-pohon peneduh ukuran sedang yang masih dipertahankan dipingiran jalan dan pohon-pohon yang baru ditanam sebagai penghijauan kelak, panel listrik pensuplai daya bagi gemerlap indahny lampu-lampu taman di malam hari, serta bahu jalan kolektor primer selebar 1,5 m disetiap sisi pinggir taman yang biasanya dipakai bebas oleh warga masyarakat yang ingin memarkirkan kendaraannya bila berkunjung ke taman kota. Selain itu keberadaan lampu-lampu dari salah satu sponsor produk rokok terkenal, dengan *rating* terlaris di kota Cepu, juga telah memberikan kesan seolah-olah taman kota Cepu hidup di malam hari. Total keseluruhan fasilitas fisik yang tersedia di taman kota Cepu sebanyak 196 unit. Dan untuk lebih lengkapnya rincian jenis maupun jumlah fasilitas penunjang yang tersedia di lokasi taman kota Cepu akan disajikan pada tabel III.7 berikut.

**TABEL III.7**  
**JENIS DAN JUMLAH FASILITAS PENUNJANG DI TAMAN KOTA CEPU**

Taman Kota	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas
Bagian Timur [ukuran 104 m x 23 m]	▪ lampu taman :	6 unit
	- lampu sponsor	14 unit
	- lampu bukan sponsor	10 unit
	▪ kursi beton	4 unit
	▪ pot beton pohon palem	18 unit
	▪ pot beton isi pasir	6 unit
	▪ tong sampah	1 unit
	▪ TPS	2 unit
SUB TOTAL I		61 unit
Bagian Tengah [ukuran 120 m x 23 m]	▪ lampu taman :	8 unit
	- lampu sponsor	18 unit
	- lampu bukan sponsor	12 unit
	▪ kursi beton	7 unit
	▪ pot beton pohon palem	28 unit
	▪ pot beton isi pasir	8 unit
	▪ tong sampah	2 unit
	▪ kran air	1 unit
SUB TOTAL II		84 unit
Bagian Barat [ukuran 68 m x 23 m]	▪ lampu taman :	6 unit
	- lampu sponsor	12 unit
	- lampu bukan sponsor	8 unit
	▪ kursi beton	4 unit
	▪ pot beton pohon palem	14 unit
	▪ pot beton isi pasir	4 unit
	▪ tong sampah	1 unit
	▪ TPS	2 unit
SUB TOTAL III		51 unit
Ukuran 292 m x 23 m	<b>TOTAL Jumlah Fasilitas</b>	<b>196 unit</b>

Sumber : Hasil observasi, 2003

### 3.2.2 Potensi dan masalah

Taman kota Cepu memiliki potensi wisata yang besar karena berada di sepanjang jalur jalan kolektor primer sebagai koridor utama kota Cepu. Namun demikian, agar potensi wisata yang ada dapat lebih optimal pengembangannya, maka perlu adanya pemerataan persebaran fasilitas dan peningkatan kualitas kawasan di sepanjang jalur jalan kolektor primer

Cepu-Randublatung/RSU. Disamping itu, perlu kiranya dilakukan suatu pola pengelolaan dan penataan yang benar-benar baik bagi PKL yang sudah terlanjur menempati taman kota dengan menjunjung tinggi kepentingan warga masyarakat kota Cepu secara umum diatas kepentingan berbagai pihak.

### **3.3 Gambaran Umum Kawasan Tuk Buntung**

Tuk Buntung yang telah ditetapkan sebagai lokasi rencana pembangunan taman tahap ketiga merupakan nama sebuah kawasan yang sebagian besar masuk kedalam wilayah administratif kelurahan Cepu. Lokasi Tuk Buntung berada pada jalan kolektor sekunder Tuk Buntung yang melingkarinya selebar 4 m dengan bahu jalan selebar 3 m persis berada di depan wisma PERHUTANI, antara jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU dari utara ke arah stasiun kereta api di bagian selatan kota Cepu, yang sebagian kecil masuk kedalam wilayah administrasi kelurahan Balun menurut batas aliran sungai.

#### **3.3.1 Kondisi fisik**

Kawasan Tuk Buntung yang terlihat saat ini merupakan hamparan rerumputan hijau yang tampak bila musim hujan tiba dan akan menjadi hamparan debu berterbangan bila musim kemarau melanda. Tuk Buntung bila diamati juga hampir mirip kenampakannya seperti taman kota Cepu, yaitu sama-sama berbentuk elipsoida memanjang dan terbagi tiga yang dipisahkan oleh jalan Tuk Buntung yang mengitarinya untuk berbalik arah bagi setiap kendaraan yang melintas.

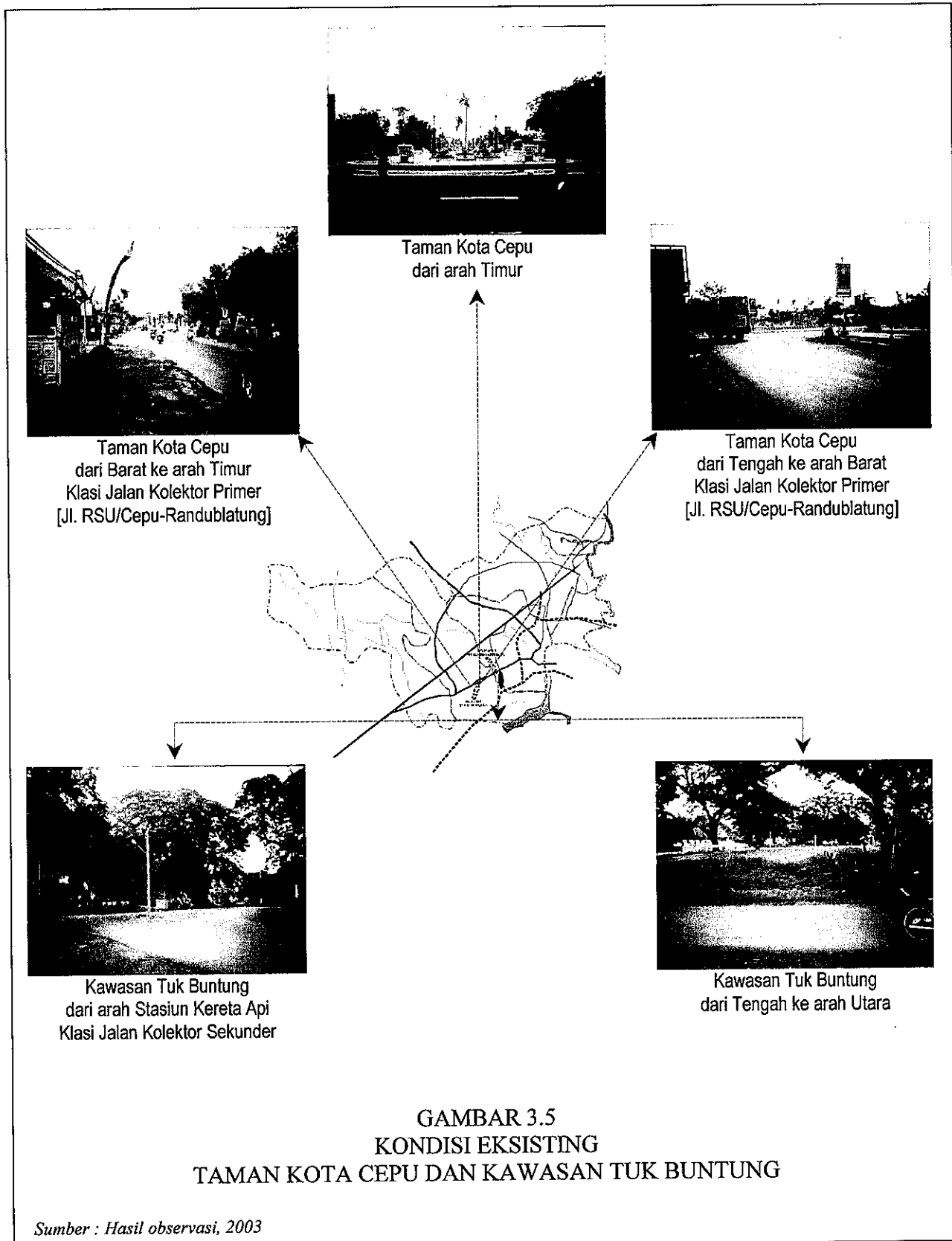
Adapun beberapa hal yang membedakan kenampakan tersebut adalah banyaknya pohon-pohon jenis trembesi ukuran besar yang sudah berusia lanjut terlihat masih kokoh menyelimutinya. Sebagai perbandingan dan gambaran saja, bahwa Tuk Buntung juga

memiliki panjang dan lebar yang lebih kurang 430 m x 27 m dan berjarak lokasi lebih kurang 200 m arah timur dari taman kota Cepu.

### 3.3.2 Potensi dan masalah

Dengan ukuran yang lebih panjang dan lebih lebar bila dibandingkan taman kota, maka menjadi hal yang wajar kalau pada tanggal 17 Agustus 2003 yang lalu lokasi Tuk Buntung dimanfaatkan oleh warga masyarakat sebagai garis *start* dan *finish* bagi aktivitas perlombaan gerak jalan seluruh tingkatan sekolah dan instansi pemerintah maupun swasta yang ada di kota Cepu. Begitu pula menjelang PEMILU Legislatif tanggal 5 April 2004 yang lalu, kawasan Tuk Buntung kerap dijadikan titik kumpul para simpatisan partai yang sedang berkampanye. Bagi para pengguna moda angkutan kereta api, Tuk Buntung yang berada di sebelah selatan jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU, dengan berjalan kaki sekitar 5 menit lurus dari depan stasiun kereta api Cepu, maka mereka akan tiba di Tuk Buntung dari arah Selatan. Potensi inilah yang sedianya akan dikembangkan dalam kerangka penataan kawasan Tuk Buntung dan khususnya pembangunan taman sebagai tempat khusus bagi pemindahan lokasi berdagang PKL taman kota Cepu.

Dalam strategi pengembangan kawasan khusus di kota Cepu diketahui, bahwa kawasan Tuk Buntung berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, disamping perannya sebagai alun-alun untuk berbagai kegiatan sosial dan kultural warga masyarakatnya. Potensi wisata rekreasi dan olahraga yang dimiliki kawasan Tuk Buntung akan dikembangkan guna mengentaskan masalah kekumuhannya. Sehingga pembangunan taman dalam rangka penataan kawasan Tuk Buntung sedapat mungkin harus mempertahankan fungsi dan peran aslinya. Gambar 3.5 berikut menampilkan kondisi eksisting taman kota Cepu dan kawasan Tuk Buntung.



### 3.4 Gambaran Umum Rencana Pemindahan Pedagang Kaki Lima Taman Kota ke Taman di Tuk Buntung Kota Cepu

Rencana pemindahan pedagang kaki lima (PKL) taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung merupakan rangkaian program kegiatan penataan pedagang kaki lima tahun 2003-2012. Rencana pemindahan ini juga akan bersamaan dan berkaitan dengan penataan kawasan sekitar stasiun kereta api Balun tahun 2004-2006 dalam program peningkatan sistem transportasi. Kawasan Tuk Buntung yang berada di sekitar stasiun kereta api Balun masuk dalam program tersebut untuk menghilangkan citra kumuh yang melekat selama ini.

#### 3.4.1 Karakteristik dan aktivitas pedagang kaki lima taman kota Cepu

Jumlah PKL taman kota Cepu yang dapat dideteksi oleh penulis saat melakukan penelitian sebanyak 240 pedagang. Dari hasil penelitian, ternyata 66,67% dari 84 sampel PKL sebagai responden yang menempati lokasi taman kota Cepu berasal dari kelurahan Balun dan Cepu. Selebihnya berasal dari luar kelurahan Balun dan Cepu serta dari luar kecamatan Cepu, sebagaimana disajikan pada tabel III.8 berikut.

TABEL III.8  
PERSENTASE ASAL RESPONDEN

Kategori	Asal Responden	$\Sigma$ PKL	%
1.	Kelurahan Balun	26	30,95
2.	Kelurahan Cepu	30	35,72
3.	Luar kelurahan Balun dan kelurahan Cepu tapi masih masuk kecamatan Cepu	13	15,47
4.	Luar kecamatan Cepu	14	16,67
5.	tidak menjawab	1	1,19
Jumlah Responden		84	100,00

Sumber : Hasil observasi, 2003

Berdasarkan jenis dagangannya, PKL taman kota Cepu dapat pula dikategorikan kedalam makanan dan minuman, non makanan dan minuman, serta jasa, sebagaimana ditampilkan pada tabel III.9 berikut.

**TABEL III.9**  
**JUMLAH PKL TAMAN KOTA**  
**BERDASARKAN KATEGORI JENIS DAGANGAN**

Kategori	Jenis Dagangan PKL Taman Kota	Jumlah Pedagang
1	Makanan dan Minuman	126
2	Non Makanan dan Minuman	97
3	Jasa	17
<b>Jumlah</b>		<b>240</b>

*Sumber : Hasil observasi, 2003*

Namun bila dikategorikan kedalam sarana fisik yang digunakan PKL untuk berdagang, maka pada tabel III.10 dapat dilihat secara lebih rinci jumlah PKL taman kota Cepu.

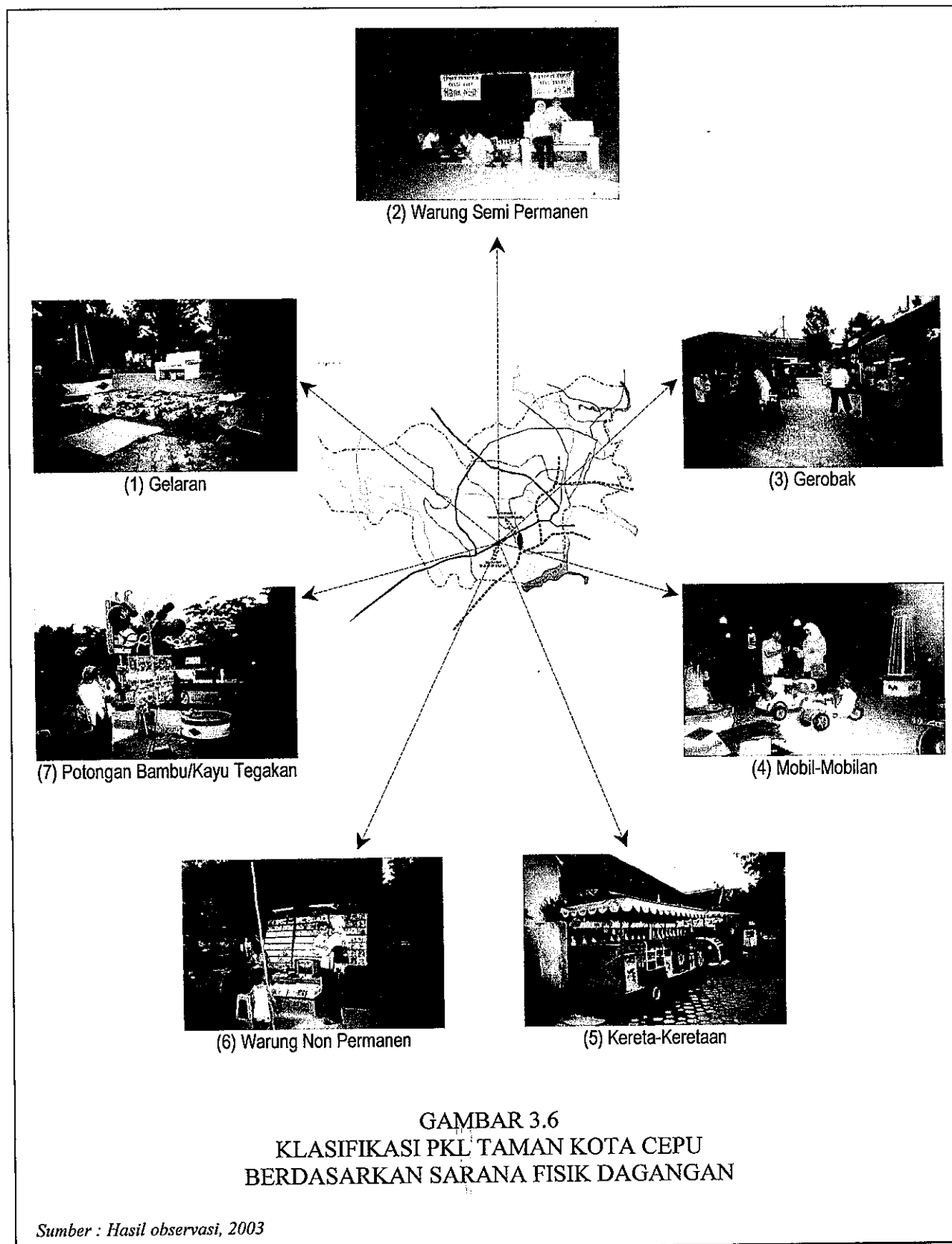
**TABEL III.10**  
**JUMLAH PKL TAMAN KOTA**  
**BERDASARKAN KATEGORI SARANA FISIK DAGANGAN**

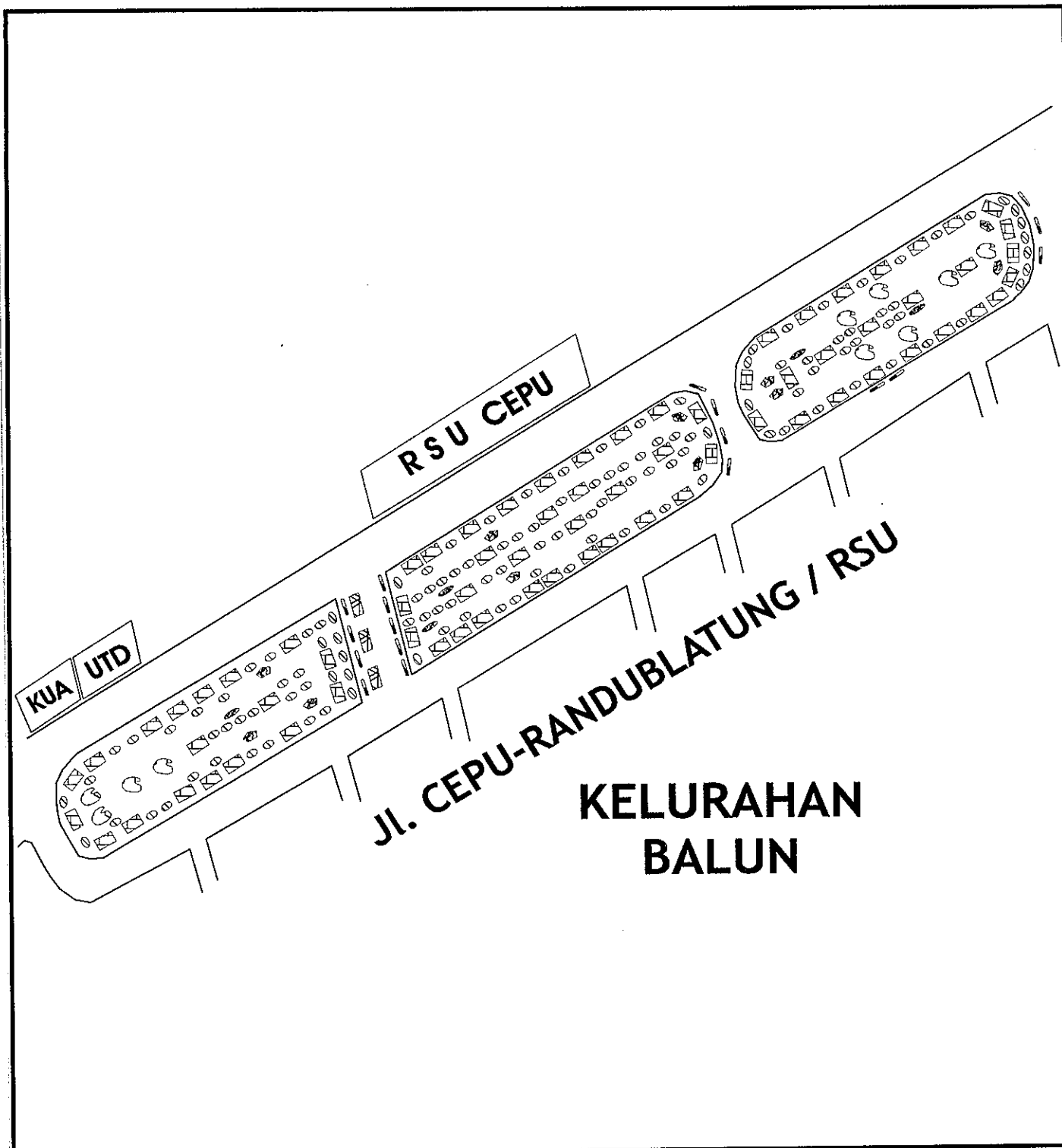
Kategori	Sarana Fisik Dagangan PKL Taman Kota	Jumlah (orang)
1	Gelaran	122
2	Warung Semi Permanen	71
3	Gerobak	18
4	Mobil-Mobilan	10
5	Kereta-Keretaan	3
6	Warung Non Permanen	11
7	Potongan Bambu/Kayu Tegakan	5
<b>Jumlah</b>		<b>240</b>



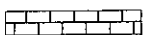

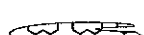

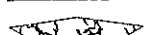


*Sumber : Hasil observasi, 2003*

Karakteristik para PKL umumnya terbanyak dari jenis sarana dagangan berupa gelaran yang menempati tengah-tengah tapak di setiap bagian taman kota Cepu. Untuk pedagang warung semi permanen terlihat selalu menata dagangannya dengan mendirikan tenda dan sarana lesehannya di pinggiran taman kota. Jasa persewaan mobil-mobilan untuk anak-anak terlihat ada yang dipinggir dan banyak pula yang memanfaatkan lokasi di tengah-tengah tapak taman kota Cepu.

Klasifikasi dan sebaran PKL taman kota Cepu berdasarkan sarana fisik dagangannya untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3.6 dan gambar 3.7 berikut.





 <b>PROGRAM PASCA SARJANA</b> <b>MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH &amp; KOTA</b> <b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>	<b>LEGENDA :</b>  Gelaran  Warung Semi Permanen  Gerobak  Mobil-Mobilan  Kereta-Keretaan  Warung Non Permanen  Potongan Bambu/Kayu Tegakan		<b>UTARA</b> 
	<b>TESIS</b> <b>KAJIAN PERSEPSI DAN PREFERENSI</b> <b>PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA</b> <b>TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN</b> <b>KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU</b>	<b>NO. GAMBAR</b> <b>3.7</b>	<b>SKALA</b> <b>TANPA SKALA</b>
<b>DENAH</b> <b>SEBARAN PKL TAMAN KOTA CEPU</b> <b>BERDASARKAN SARANA FISIK DAGANGAN</b>	<b>NOMOR HALAMAN</b> <b>76</b>	<b>SUMBER</b> <b>OBSERVASI LAPANGAN</b>	

Aktivitas PKL taman kota Cepu dilakukan hanya pada malam hari dengan pola pelayanan langsung bertransaksi kepada para konsumennya. Dari sejumlah PKL taman kota yang melakukan aktivitasnya tersebut hanya sebagian kecil saja yang biasanya berdagang 'semalam suntuk' sampai diatas pukul 01.00 WIB, dari hasil penelitian, diketahui sebanyak 78,57% PKL yang mulai berdagang di taman kota paling telat pukul 18.00 WIB dan sebanyak 82,15% PKL yang sudah menutup dagangannya paling lambat pukul 23.00 WIB. Namun bila malam libur umum tiba, sebanyak 71,76% PKL yang sudah menutup dagangannya paling lambat pukul 24.00 di lokasi taman kota Cepu. Umumnya pedagang yang acapkali berdagang semalam suntuk di taman kota Cepu adalah yang berjenis sarana dagangan berupa warung semi permanen.

Melalui hasil wawancara perihal aktivitas PKL taman kota Cepu, ternyata waktu berdagang mereka sebagian besar sangat dipengaruhi oleh cuaca dan jumlah pengunjung yang ada. Jadi, bila musim hujan tiba banyak PKL yang hanya sebentar berdagang di taman kota Cepu bahkan tidak berdagang sama sekali, atau kalau pengunjung agak sepi pada hari-hari biasa, maka para PKL taman kota Cepu cenderung akan lebih cepat menyudahi dagangannya. Aktivitas PKL taman kota yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih tersebut saat ini telah diwadahi oleh terbentuknya paguyuban yang diharapkan selalu dapat berperan sebagai kontrol kebijakan pemerintah kabupaten Blora, dimana keberadaannya wajib selalu diikutsertakan dalam setiap tahap pengelolaan maupun penataannya. Para pengurus paguyuban tidak hanya berasal dari PKL yang berlokasi di taman kota saja, tetapi ada juga yang berasal dari lokasi pasar buah depan Mustika Plaza. Tabel III.11 berikut menjabarkan lebih rinci hasil penelitian perihal waktu mulai dan waktu selesai berdagang PKL taman kota Cepu sebagai responden beserta jenis sarana fisik dagangannya.

TABEL III.11  
WAKTU BERDAGANG RESPONDEN

No.	Aktivitas Berdagang	Waktu [ WIB ]	Σ PKL	%	Σ per Sarana Fisik Dagangan						
					A	B	C	D	E	F	G
1.	Mulai	> 17.00	29	34,52	9	6	5	5	0	2	2
		17.00-18.00	37	44,05	21	9	2	0	1	3	1
		18.00-19.00	14	16,67	6	6	0	0	2	0	0
		> 19.00	4	04,76	2	2	0	0	0	0	0
		tidak menjawab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Selesai	< 21.00	26	30,95	16	0	1	4	1	2	2
		21.00-23.00	43	51,20	21	10	4	1	2	3	1
		23.00-01.00	9	10,71	0	7	2	0	0	0	0
		> 01.00	6	07,14	0	6	0	0	0	0	0
		tidak menjawab	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Selesai [Liburan]	< 22.00	35	41,67	22	0	3	5	2	2	1
		22.00-24.00	32	38,09	14	10	3	0	1	3	1
		24.00-02.00	14	16,67	1	12	1	0	0	0	0
		> 02.00	1	01,19	0	1	0	0	0	0	0
		tidak menjawab	2	02,38	1	0	0	0	0	0	1

Keterangan sarana fisik dagangan PKL taman kota Cepu :

A = Gelaran  
B = Warung Semi Permanen  
C = Gerobak  
D = Mobil-Mobilan

E = Kereta-Keretaan  
F = Warung Non Permanen  
G = Potongan Bambu/Kayu Tegakan

Sumber : Data primer diolah, 2004

Dari hasil observasi perihal aktivitas PKL taman kota Cepu, diketahui bahwa dalam melakukan aktivitasnya di lokasi taman kota Cepu saat ini para PKL tidak lagi dikenakan retribusi, sementara itu, dalam upaya menjaga kebersihan taman kota, paguyuban PKL telah memberlakukan kewajiban bagi anggotanya untuk bergotong-royong membersihkan taman satu kali dalam seminggu, disamping setiap harinya lokasi taman kota Cepu secara rutin dibersihkan dan sampahnya diangkut oleh pihak KKP Kabupaten Blora. Dalam melakukan aktivitasnya, kebutuhan daya listrik dan air bersih para PKL saat ini dipasok dari rumah-rumah penduduk yang bermukim di sekitar lokasi taman kota Cepu.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di taman kota Cepu saat ini pada hakekatnya merupakan alternatif solusi terbaik bagi masalah pengangguran yang jumlahnya bisa dikatakan cenderung terus semakin bertambah di Indonesia. Kehadiran para PKL dimanapun sangat membutuhkan sentuhan kebijakan pemerintah yang selayaknya mengutamakan kepentingan dan kebutuhan mereka tanpa merugikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

#### **3.4.2 Rencana pemindahan pedagang kaki lima taman kota ke taman di Tuk Buntung kota Cepu**

Seperti yang telah dipaparkan dalam indikasi program pembangunan RUTR kota Cepu tahun 2003-2012 dan kegiatannya terdahulu, jadi jelaslah bahwa rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung merupakan rangkaian dari program pengaturan, pengembangan, dan penyediaan fasilitas dalam kegiatan penataan pedagang kaki lima untuk wilayah administrasi kelurahan Balun dan kelurahan Cepu yang menjadi bagian dari pusat kota Cepu. Disamping itu, lokasi PKL di kota Cepu sangat terikat dengan pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, dimana pengaturannya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan aspek kondisi, situasi, dan lingkungan.

Sehingga taman kota Cepu yang berfungsi sebagai fasilitas olahraga dan rekreasi skala lokal, tanpa fasilitas parkir yang memadai, dan berada pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU yang bebas akses, menjadi justifikasi pemerintah kabupaten Blora bagi rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSEPSI DAN PREFERENSI**  
**PEDAGANG KAKI LIMA TAMAN KOTA TERHADAP RENCANA**  
**PEMINDAHAN KE TAMAN DI TUK BUNTUNG KOTA CEPU**

**4.1 Analisis Persepsi dan Preferensi Pedagang Kaki Lima Taman Kota Cepu**

Melalui tabel data responden PKL taman kota Cepu pada lampiran 2 dapat dianalisis persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahannya ke taman di Tuk Buntung. Persepsi PKL taman kota Cepu dianalisis dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi terhadap penafsirannya guna melihat perlu ataupun pentingnya rencana pemindahan bagi mereka, berikut alasan-alasan maupun pendapat yang dapat dipahaminya. Sedangkan preferensi PKL taman kota Cepu dianalisis dengan menggunakan tabel distribusi frekwensi terhadap penilaiannya guna melihat kecenderungan mereka memilih lokasi yang layak ataupun lebih disenangi untuk berdagang dan kesediaannya pindah ke taman di Tuk Buntung, berikut pertimbangan maupun usulan yang mereka kemukakan.

**4.1.1 Persepsi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan**

Persepsi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahannya ke taman di Tuk Buntung dapat dilihat melalui informasi yang mereka dapatkan mengenai rencana pembangunan taman di Tuk Buntung, rencana pemindahannya, dan alasan pemerintah kabupaten Blora perihal rencana pemindahan sebagaimana yang dapat ditafsirkannya, disajikan pada tabel IV.1 berikut.

TABEL IV.1  
INFORMASI RENCANA PEMINDAHAN RESPONDEN

	No.	Informasi	$\Sigma$	%
Rencana Pembangunan Taman Tuk Buntung	1.	Tahu	51	60,71
	2.	Tidak Tahu	33	39,29
	3.	Kosong	0	0
<b>Jumlah Responden</b>			84	100,00
Rencana Pemindahan ke Taman di Tuk Buntung	1.	Sudah Tahu	25	29,76
	2.	Belum Tahu	58	69,04
	3.	Kosong	1	01,20
<b>Jumlah Responden</b>			84	100,00
Alasan Pemkab Blora untuk Rencana Pemindahan	1.	Tahu	14	16,66
	2.	Tidak Tahu	69	82,14
	3.	Kosong	1	01,20
<b>Jumlah Responden</b>			84	100,00

*Sumber : Data primer diolah, 2004*

Data-data pada tabel diatas dapat menjelaskan bahwa sebanyak 60,71% responden PKL taman kota Cepu yang tahu akan adanya rencana pembangunan taman di Tuk Buntung, dan melalui pertanyaan C.2 lembar kuesioner pada lampiran 1, diketahui pula bahwa sebagian besar PKL taman kota Cepu yang tahu mendapatkan informasi tersebut melalui camat Cepu dan selebihnya dari masyarakat umum. Sebanyak 69,04% responden yang belum tahu kalau ada rencana pemerintah kabupaten Blora memindahkan lokasi berdagang mereka ke taman di Tuk Buntung, dan bagi mereka yang telah mengetahui rencana tersebut, sumber informasi diperoleh kebanyakan dari masyarakat umum maupun sesama PKL, bahkan ada 2 responden yang mengetahui rencana tersebut dari camat Cepu.

Ternyata informasi yang diperoleh PKL taman kota Cepu perihal rencana pembangunan taman di kawasan Tuk Buntung dan rencana pemindahan lokasi mereka ke taman di Tuk Buntung, seperti telah dijabarkan diatas, sangatlah minim. Informasi rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung baru saja diperoleh PKL taman kota Cepu lewat kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bulan Maret 2004.

Selanjutnya sebanyak 82,14% responden yang tidak mengetahui alasan pemerintah kabupaten Blora memindahkan lokasi berdagang mereka. Adapun dari 14 responden (16,66%) yang tahu alasan pemerintah kabupaten Blora memindahkan mereka ke taman di Tuk Buntung nantinya, sebanyak 64,30% yang mengatakan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan masalah ketertiban, kerapian, keindahan, dan keamanan, disamping masalah lalu-lintas sebesar 50%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kecil dari PKL taman kota Cepu telah menyadari akan kehadirannya yang kurang tertata dan terkelola dengan baik di lokasi taman kota Cepu lambat laun akan menjadi biang terjadinya kesemrawutan wajah taman kota Cepu dan lalu lintas pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU. Secara lebih rinci alasan pemerintah kabupaten Blora menurut penafsiran 14 responden adalah sebagaimana disajikan pada tabel IV.2 berikut.

TABEL IV.2  
ALASAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN MENURUT RESPONDEN

No.	Alasan Pemerintah Kabupaten Blora	$\Sigma$ Responden	%	$\Sigma$ Responden yang tahu Alasan
1.	Ketertiban, kerapian, keindahan, dan keamanan;	9	64,30	14
2.	Lalu-lintas (semrawut, mengganggu); dan	7	50,00	
3.	Lain-lain agar : - tenang; - terorganisir; - teratur; dan - dapat tempat permanen.	7	50,00	

Sumber : Data primer diolah, 2004

Dari 69 responden yang menjawab, sebanyak 37 responden PKL taman kota Cepu (44,04%) yang mengatakan tidak ataupun kurang perlunya rencana pemindahan lokasi berdagang mereka ke taman di Tuk Buntung, dan 32 responden (39,00%) yang menyatakan

perlu ataupun sangat perlu sebagaimana tertera pada tabel IV.3 berikut. Kedua angka diatas menunjukkan proporsi yang hampir sebanding mengenai perlunya rencana pemindahan bagi PKL taman kota Cepu sebagai responden. Namun demikian, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut sebelum menentukan faktor-faktor yang berpengaruh pada perolehan angka-angka diatas dalam penelitian ini. Tetapi setidaknya melalui hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap perlunya rencana pemindahan bagi responden, ditemukan bahwa belum adanya komunikasi yang harmonis perihal rencana pemindahan antara pemerintah kabupaten Blora dengan PKL taman kota Cepu merupakan salah satu faktor utama yang perlu dijadikan koreksi.

TABEL IV.3  
PERLUNYA RENCANA PEMINDAHAN BAGI RESPONDEN

No.	Perlunya Rencana Pemindahan	$\Sigma$	%
1.	Sangat Perlu	12	14,29
2.	Perlu	20	23,81
3.	Kurang Perlu	10	11,90
4.	Tidak Perlu	27	32,14
5.	Kosong	15	17,86
Jumlah Responden		84	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2004

Sebanyak 51 responden (60,71%) dari 73 responden yang memberikan pendapatnya menyatakan bahwa keberadaan PKL di lokasi taman kota Cepu saat ini tidak perlu dipindahkan, namun cukup ditata dan dikelola dengan baik sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut. Hal tersebut dapat dimaklumi, sebab dari hasil wawancara diketahui pula bahwa banyaknya responden yang menyatakan telah terlanjur berdagang di lokasi taman kota Cepu, seringkali mengungkapkan berbagai alasan yang pada intinya mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap pertimbangan untung dan ruginya rencana pemindahan.

TABEL IV.4  
PENDAPAT RESPONDEN  
TERHADAP PERLU TIDAKNYA MEREKA DIPINDAHKAN

No.	Perlunya Rencana Pemindahan	$\Sigma$	%
1.	Perlu dipindahkan, serta ditata dan dikelola dengan baik	18	21,42
2.	Tidak Perlu dipindahkan, cukup ditata dan dikelola dengan baik	51	60,71
3.	Perlu dipindahkan, <u>tanpa</u> ditata dan dikelola dengan baik	1	01,20
4.	Tidak Perlu dipindahkan, <u>apalagi</u> ditata dan dikelola dengan baik	3	03,57
5.	<i>Kosong</i>	11	13,10
Jumlah Responden		84	100,00

*Sumber : Data primer diolah, 2004*

Jadi melalui data-data primer berupa akses informasi yang diterima PKL taman kota Cepu perihal rencana pemindahan mereka ke taman di Tuk Buntung; alasan pemerintah kabupaten Blora yang coba mereka tafsirkan; perlu tidaknya rencana pemindahan; maupun pendapatnya terhadap rencana pemindahan; maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu cerminan sikap mereka yang lebih dominan menginginkan untuk tetap dapat berdagang di lokasi taman kota Cepu dengan penataan dan pengelolaan yang lebih baik.

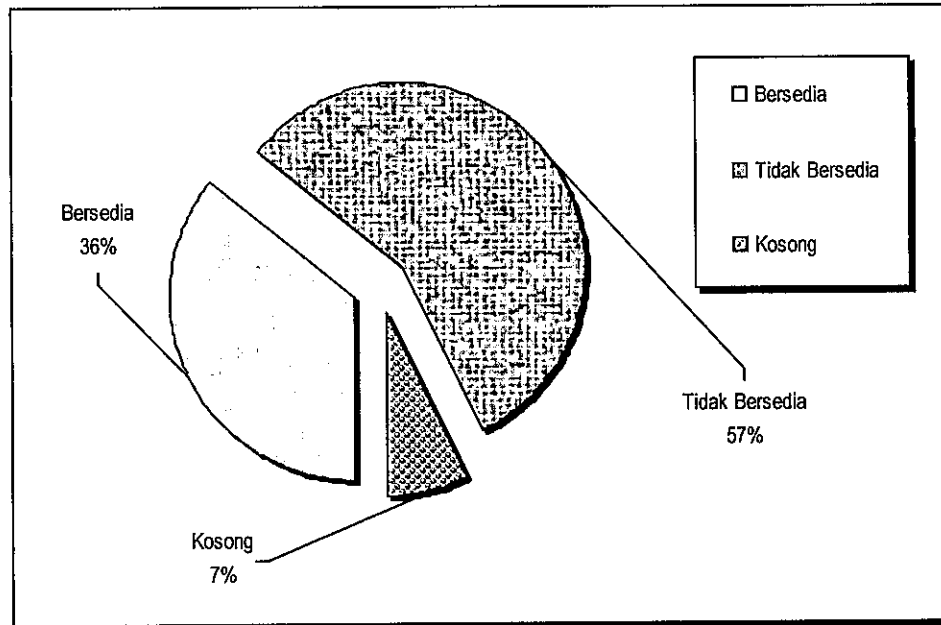
#### 4.1.2 Preferensi PKL taman kota Cepu terhadap rencana pemindahan

Preferensi PKL taman kota Cepu dapat dikaji dari sisi kesediaan (keberatan/tidak keberatan) mereka untuk pindah ke taman di Tuk Buntung beserta alasannya, pentingnya rencana pemindahan, usulan yang disampaikan untuk pemerintah kabupaten Blora berkaitan dengan rencana pemindahan sesuai pemahaman mereka. Berikut jumlah pelanggan yang telah dimiliki, kondisi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan berdagang di lokasi taman kota Cepu, serta kecenderungan mereka memilih lokasi berdagang yang layak, strategis, dan menjadi prioritas sebagaimana tertulis dalam sajian dan ulasan berikut.

TABEL IV.5  
KESEDIAAN RESPONDEN PINDAH KE TAMAN DI TUK BUNTUNG

No.	Kesediaan atas Rencana Pemindahan	$\Sigma$	%
1.	Keberatan/Tidak Bersedia	48	57,14
2.	Tidak Keberatan/Bersedia	30	35,72
3.	Kosong	6	07,14
Jumlah Responden		84	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2004



GAMBAR 4.1  
DIAGRAM KESEDIAAN RESPONDEN PKL TAMAN KOTA CEPU  
PINDAH KE TAMAN DI TUK BUNTUNG

Sumber : Hasil analisis, 2004

Dari 78 responden PKL taman kota Cepu yang menjawab, diperoleh 48 responden (57,14%) yang menyatakan keberatan atau tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dan 30 responden (35,72%) yang menyatakan tidak keberatan atau bersedia. Dan semua itu umumnya dinyatakan responden dengan pertimbangan-pertimbangan yang

disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan mereka sebagai pedagang kaki lima sebagaimana dapat diklasifikasikan dalam tabel-tabel berikut.

**TABEL IV.6**  
**PERTIMBANGAN ATAS KEBERATAN RESPONDEN**  
**TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN**

No.	Keberatan dengan Pertimbangan	$\Sigma$ Responden	%	$\Sigma$ Responden yang Keberatan
1.	Taman kota Cepu lebih strategis dari taman di Tuk Buntung;	18	37,50	48
2.	Sulit cari pelanggan baru di Tuk Buntung karena kurang ramai, sepi, jalannya sempit dan rawan banjir; dan	16	33,34	
3.	Lain-lain : - sulit cari tempat; - Tuk Buntung susah dijangkau; - Tuk Buntung untuk PKL lain saja; - Tuk Buntung tempat maksiat; dan - Taman kota sudah cocok.	17	35,41	

*Sumber : Data primer diolah, 2004*

Sebanyak 18 responden (37,50%) menyatakan bahwa taman kota Cepu lebih strategis dari taman di Tuk Buntung sebagai pertimbangan yang kuat bagi responden untuk menyatakan keberatannya atas rencana pemindahan tersebut. Strategis ataupun tidaknya kawasan Tuk Buntung masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun dari hasil wawancara dengan instansi terkait, diketahui bahwa taman yang akan dibangun di kawasan Tuk Buntung sedianya akan dikembangkan sebagai pusat hiburan warga masyarakat kota Cepu yang tentunya akan ramai dikunjungi, sehingga akan semakin strategis pula peluang yang dapat diraih PKL untuk berdagang dan menawarkan jasanya.

Selanjutnya 15 responden (50,00%) yang menyatakan tidak keberatan terhadap rencana pemindahan tersebut memiliki pertimbangan kuat agar lebih aman, bersih, nyaman, rapi, asri, dan mendapatkan tempat permanen dengan penataan dan pengelolaan yang baik.

Namun perlu dipertimbangkan bahwa rencana pembangunan taman sebagai lokasi pemindahan PKL taman kota Cepu di kawasan Tuk Buntung, secara umum, sangat rentan terhadap hilangnya fungsi dan peran kawasan Tuk Buntung sebagai ruang terbuka bagi warga masyarakat kota Cepu. Sebagai contoh, keberadaan tempat berdagang PKL yang permanen dalam pengelolaan dan penataan pasar Yaik di Semarang, sama sekali telah menghilangkan fungsi dan peran asli alun-alun sebelumnya.

**TABEL IV.7**  
**PERTIMBANGAN ATAS TIDAK KEBERATAN RESPONDEN**  
**TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN**

No.	Tidak Keberatan dengan Pertimbangan	$\Sigma$ Responden	%	$\Sigma$ Responden yang Tidak Keberatan
1.	Biar lebih aman, bersih, nyaman, rapi, asri, dan dapat tempat permanen dengan penataan dan pengelolaan yang baik;	15	50,00	30
2.	Pemkab Blora sudah memikirkan keberadaan PKL, pindah ataupun tidak bukan masalah karena untuk kepentingan bersama agar tidak dipindah-pindah lagi;	12	40,00	
3.	Tuk Buntung akan ramai karena dekat dengan stasiun KA yang lebih strategis untuk berdagang; dan	8	26,67	
4.	Lain-lain : - asal gratis; - parkir luas dan fasilitas lain yang lebih baik; - pengaturan luas kavling masing-masing usaha; - diberi SK Penempatan masing-masing kavling; - penerangan sudah terjamin; dan - rejeki sudah ada yang mengatur.	11	36,67	

*Sumber : Data primer diolah, 2004*

Disamping itu dari 77 responden PKL taman kota Cepu yang menjawab, sebanyak 57 responden (67,85%) yang menyatakan kurang ataupun tidak pentingnya rencana pemindahan mereka ke taman di Tuk Buntung, dan 20 responden lainnya (23,81%) menyatakan penting ataupun sangat pentingnya rencana pemindahan sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.8 berikut. Selisih perolehan angka yang signifikan tersebut mengindikasikan bahwa penting atau tidaknya rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung sangat bergantung pada informasi yang diperoleh PKL taman kota Cepu terhadap kawasan Tuk Buntung sebagai lokasi tujuan rencana pemindahan.

TABEL IV.8  
PENTINGNYA RENCANA PEMINDAHAN BAGI RESPONDEN

No.	Pentingnya Rencana Pemindahan	$\Sigma$	%
1.	Sangat Penting	2	02,38
2.	Penting	18	21,43
3.	Kurang Penting	26	30,95
4.	Tidak Penting	31	36,90
5.	Kosong	7	08,34
Jumlah Responden		84	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2004

Dari 84 jumlah keseluruhan responden PKL taman kota Cepu, hanya 35 responden (41,66%) yang memiliki usulan kepada pemerintah kabupaten Blora berkaitan dengan rencana pemindahan mereka. Dominannya usulan tersebut dari 15 responden (42,85%) yang meminta agar Tuk Buntung dijadikan tempat pindah yang permanen, aman, bersih, nyaman, tertib, indah, asri, dan tempat dagang dikelompokkan. Namun demikian, usulan sosialisasi terhadap rencana pemindahan merupakan hal lain yang jauh lebih bijaksana untuk segera diberikan kepada PKL taman kota Cepu saat ini guna menjangkau aspirasinya. Rincian klasifikasi usulan responden dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut.

TABEL IV.9  
RINCIAN KLASIFIKASI USULAN RESPONDEN

No.	Usulan	$\Sigma$ Responden	%	$\Sigma$ Responden yang punya Usulan
1.	Tuk Buntung dibangun dan dijadikan tempat pindah yang permanen, aman, bersih, nyaman, tertib, indah, asri, dan tempat dagang dikelompokkan;	15	42,85	35
2.	PKL taman kota Cepu tidak usah dipindah, cukup ditata dan dikelola dengan baik;	10	28,57	
3.	Dana pembangunan Tuk Buntung untuk pembangunan Prasarana-Sarana di taman kota Cepu saja;	8	22,85	
4.	Tuk Buntung untuk PKL lain saja; dan	7	20,00	
5.	Lain-lain : - sosialisasikan rencana pemindahan; - bimbingan & penyaluran kerja bagi PKL; serta - ijin & nilai pajak usaha kereta-keretaan mohon diamati langsung dan beri jalan keluarnya.	4	11,43	

Sumber : Data primer diolah, 2004

Dari 84 responden PKL taman kota Cepu, lebih banyak dari mereka yang telah memiliki kurang dari 50 pelanggan yaitu sebanyak 42 responden (50,01%). Jumlah pelanggan yang diperoleh PKL selama berdagang di lokasi taman kota Cepu tersebut, bila lokasinya dipindahkan ke taman di kawasan Tuk Buntung kelak, kemungkinan akan bertambah jumlahnya bilamana pemerintah kabupaten Blora benar-benar serius mengembangkan lokasi tersebut sebagai pusat hiburan warga masyarakatnya di pusat kota Cepu. Namun sebaliknya jumlah pelanggan PKL akan berkurang manakala pemerintah kabupaten Blora tidak benar-benar serius mewujudkan kawasan Tuk Buntung menjadi pusat hiburan warga masyarakat di pusat kota Cepu nantinya. Disamping itu, peran paguyuban PKL dalam upaya mempromosikan lokasi dan jenis dagangan PKL di Tuk Buntung juga sangat diharapkan sebagai wujud partisipasi aktifnya. Secara lebih detail jumlah pelanggan PKL selama berdagang di lokasi taman kota Cepu adalah sebagaimana disajikan pada tabel IV.10 berikut.

TABEL IV.10  
JUMLAH PELANGGAN RESPONDEN

No.	Jumlah Pelanggan	$\Sigma$	%
1.	> 75	13	15,47
2.	50 - 75	5	05,95
3.	25 - 50	14	16,67
4.	< 25	28	33,34
5.	Kosong	24	28,57
<b>Jumlah Responden</b>		<b>84</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data primer diolah, 2004

Penilaian responden PKL taman kota Cepu terhadap kondisi maupun situasi keamanan, kebersihan, dan kenyamanan berdagang di lokasi taman kota Cepu, sebagaimana telah dirasakan oleh sebagian besar PKL selama ini, adalah aman, bersih, dan nyaman, sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.11 berikut.

TABEL IV.11  
KONDISI DAN SITUASI TAMAN KOTA CEPU BAGI RESPONDEN

	No.	Informasi	$\Sigma$	%
Keamanan	1.	Sangat Aman	15	17,86
	2.	Aman	51	60,71
	3.	Kurang Aman	12	14,28
	4.	Tidak Aman	2	02,39
	5.	Kosong	4	04,76
<b><math>\Sigma</math> Responden</b>			<b>84</b>	<b>100,00</b>
Kebersihan	1.	Sangat Bersih	10	11,90
	2.	Bersih	49	58,34
	3.	Kurang Bersih	22	26,19
	4.	Tidak Bersih	0	0
	5.	Kosong	3	03,57
<b><math>\Sigma</math> Responden</b>			<b>84</b>	<b>100,00</b>
Kenyamanan	1.	Sangat Nyaman	15	17,86
	2.	Nyaman	55	65,48
	3.	Kurang Nyaman	10	11,90
	4.	Tidak Nyaman	0	0
	5.	Kosong	4	04,76
<b><math>\Sigma</math> Responden</b>			<b>84</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data primer diolah, 2004

Kondisi dan situasi keamanan yang dirasakan PKL di lokasi taman kota Cepu, dari hasil wawancara dan observasi penulis, adalah cukup kondusif walau masih ada kegiatan retribusi tidak resmi dari kalangan pemuda setempat yang membawa nama sebuah karang taruna. Namun tidak demikian halnya untuk PKL 'sakti' yang juga ikut berdagang di lokasi taman kota Cepu tetapi tidak ikut dikenakan retribusi dimaksud.

Kondisi dan situasi kebersihan di lokasi taman kota Cepu yang cukup baik sampai saat ini masih dilaksanakan dan menjadi tugas maupun tanggungjawab rutin KKP Kabupaten Blora. Disamping itu, paguyuban PKL juga telah memberlakukan kegiatan gotong-royong membersihkan lokasi taman kota Cepu satu kali dalam seminggu dengan mengenakan sanksi denda bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Kondisi dan situasi kenyamanan di lokasi taman kota Cepu yang dirasakan oleh PKL adalah cukup mendukung dan bisa dikatakan sangat relatif, dikarenakan ada sebagian PKL yang kurang senang dengan kebiasaan sebagian PKL lain yang tidak teratur dalam meletakkan barang dagangannya. Kemudian bau aneh yang sering muncul dari saluran air yang mengelilingi taman kota Cepu akibat kotoran sisa dagangan —baik berbentuk cair maupun padatan organik— yang dibuang pedagang tertentu kedalam saluran air dimaksud, belum lagi bau bekas buang air kecil yang terkadang tercium di bagian-bagian tertentu lokasi taman kota.

Setidaknya untuk saat ini, lebih dari 75% responden PKL taman kota Cepu menyatakan bahwa lokasi taman kota Cepu merupakan tempat yang paling layak, tempat yang paling strategis, dan tempat yang dapat menjadi pilihan/prioritas mereka untuk berdagang, dibandingkan dengan Tuk Buntung. Pernyataan tersebut sangat jelas disajikan melalui tabel IV.12 berikut.

Angka tersebut mungkin saja dapat berubah bilamana sosialisasi pemerintah kabupaten Blora perihal rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung telah intensif diberikan secara progresif kepada PKL taman kota Cepu. Bila sosialisasi yang diberikan tidak mengedepankan model-model perencanaan pembangunan partisipatif, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik antara PKL taman kota Cepu dengan kebijakan rencana pemindahannya kelak. Sosialisasi yang dibutuhkan oleh PKL taman kota Cepu setidaknya sama seperti saat pembangunan taman tahap kedua beberapa waktu lalu, dimana pada waktu itu para PKL dan komponen masyarakat lainnya mendapat kesempatan untuk memberi masukan bagi penyempurnaan akhir desain sebelum dilaksanakannya pembangunan taman, agar benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan penggunaanya dan bermanfaat.

**TABEL IV.12**  
**LOKASI BERDAGANG PALING LAYAK, PALING STRATEGIS,**  
**DAN MENJADI PILIHAN/PRIORITAS BAGI RESPONDEN**

	No.	Informasi	$\Sigma$	%
Lokasi paling Layak	1.	Taman Kota	65	77,38
	2.	Taman di Tuk Buntung	10	11,90
	3.	Kosong	9	10,72
$\Sigma$ Responden			84	100,00
Lokasi paling Strategis	1.	Taman Kota	67	79,76
	2.	Taman di Tuk Buntung	6	07,14
	3.	Kosong	11	13,10
$\Sigma$ Responden			84	100,00
Lokasi yang menjadi Pilihan/Prioritas	1.	Taman Kota	65	77,38
	2.	Taman di Tuk Buntung	8	09,52
	3.	Kosong	11	13,10
$\Sigma$ Responden			84	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2004

Kecenderungan responden PKL taman kota Cepu memilih taman kota sebagai lokasi berdagang yang dinilai paling layak dan paling strategis tersebut saat ini didukung pula oleh

alasan mereka sebagaimana ditampilkan pada tabel IV.13 berikut. Dari alasan-alasan berikut terlihat bahwa lokasi taman kota Cepu dipilih oleh PKL dikarenakan tidak adanya tempat lain yang menjadi gambaran lebih layak dan strategis bagi PKL untuk berdagang. PKL tidak tahu seperti apa taman di Tuk Buntung nantinya, bagaimana nasib mereka kelak di taman Tuk Buntung, apakah mereka akan dipindah lagi setelahnya atau bagaimana, dan sebagainya. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten Blora, diketahui bahwa belum ada yang berani menjamin apakah PKL taman kota Cepu tidak akan dipindahkan lagi setelahnya, dikarenakan nuansa politis yang kerap selalu mengikuti permasalahan PKL di negeri ini.

TABEL IV.13  
ALASAN RESPONDEN MEMILIH LOKASI TAMAN KOTA CEPU  
SEBAGAI TEMPAT BERDAGANG

No.	Alasan Memilih Taman Kota Cepu	$\Sigma$ Responden	%	$\Sigma$ Responden yang memberi Alasan
1.	Strategis, ramai, dan tepat/cocok untuk berdagang;	52	61,90	75
2.	Tempatnya baru, tidak ada tempat lain, dan lagipula gratis;	5	05,95	
3.	Lain-lain : - tidak mengganggu lalu-lintas; - menguntungkan; - dekat rumah; - cari nafkah/tambahan penghasilan	30	35,71	

Sumber : Data primer diolah, 2004

Jadi melalui data-data primer berupa kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung beserta berbagai pertimbangannya, penting tidaknya rencana pemindahan, usulan yang disampaikan, kondisi dan situasi taman kota Cepu sebagai lokasi berdagang, maupun kelayakan, kestrategisan, bahkan kecenderungan pemilihan/prioritas

lokasi yang coba mereka pahami, maka dapat disimpulkan bahwa besar harapan PKL taman kota Cepu kepada pemerintah kabupaten Blora agar kiranya mendapat prasarana dan sarana yang layak untuk berdagang sesuai tuntutan kebutuhan mereka sebagai PKL. Disamping itu, dari sebagian besar usulan maupun alasan PKL memilih taman kota Cepu sebagai lokasi berdagang, disimpulkan pula kenyataan bahwa ternyata mereka juga memahami pentingnya rencana pemindahan sebagai jembatan untuk mencapai berbagai tuntutan kebutuhan beserta harapan-harapannya, seperti mendapatkan tempat yang permanen, tidak semrawut dan sebagainya, melalui jalinan komunikasi dua arah antar *stakeholder* dalam bingkai pembangunan yang partisipatif.

#### **4.2 Analisis Hubungan antara Kesiediaan PKL Taman Kota Cepu Pindah ke Taman di Tuk Buntung dengan Karakteristik dan Aktivitasnya**

Hubungan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu akan dianalisis dengan menggunakan metode tabulasi silang (*crosstab analysis*) melalui tabel kontingensi, guna melihat hubungan yang sempurna antar kesediaan PKL taman kota Cepu sebagai variabel terikat dengan karakteristik dan aktivitasnya sebagai variabel bebas, yang meliputi usia, pendidikan, pendapatan, modal, lama berdagang, dan luasan tempat berdagang. Karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu ditampilkan dalam tabel distribusi frekwensi berikut.

TABEL IV.14  
KARAKTERISTIK DAN AKTIVITAS RESPONDEN

No.	Karakteristik & Aktivitas	Skala Penilaian	PKL Taman Kota Cepu	
			Frekwensi	%
1.	Usia	> 50 tahun	3	03,57
		41 – 50 tahun	8	09,52
		31 – 40 tahun	35	41,67
		< 30 tahun	37	44,04
		Kosong	1	01,20
$\Sigma$ Responden			84	100,00
2.	Pendidikan	D3/S1	3	03,57
		SMP/SMA/STM	70	83,33
		SD	7	08,33
		Tidak tamat SD	3	03,57
		Kosong	1	01,20
$\Sigma$ Responden			84	100,00
3.	Pendapatan [Rupiah/Bulan]	> 1,2 juta	2	02,39
		800 ribu – 1,2 juta	6	07,14
		400 ribu – 800 ribu	29	34,52
		< 400 ribu	44	52,38
		Kosong	3	03,57
$\Sigma$ Responden			84	100,00
4.	Modal [Rupiah]	> 1 juta	22	26,19
		500 ribu – 1 juta	19	22,61
		100 ribu – 500 ribu	32	38,10
		< 100 ribu	10	11,90
		Kosong	1	01,20
$\Sigma$ Responden			84	100,00
5.	Lama Berdagang	> 1 tahun	36	42,85
		6 bulan – 1 tahun	28	33,34
		3 bulan – 6 bulan	14	16,67
		< 3 bulan	6	07,14
		Kosong	0	0
$\Sigma$ Responden			84	100,00
6.	Luasan Tempat Berdagang	> 25 m <sup>2</sup>	10	11,90
		15 – 25 m <sup>2</sup>	5	05,95
		5 – 15 m <sup>2</sup>	15	17,86
		< 5 m <sup>2</sup>	46	54,77
		Kosong	8	09,52
$\Sigma$ Responden			84	100,00

Sumber : Data primer diolah, 2004

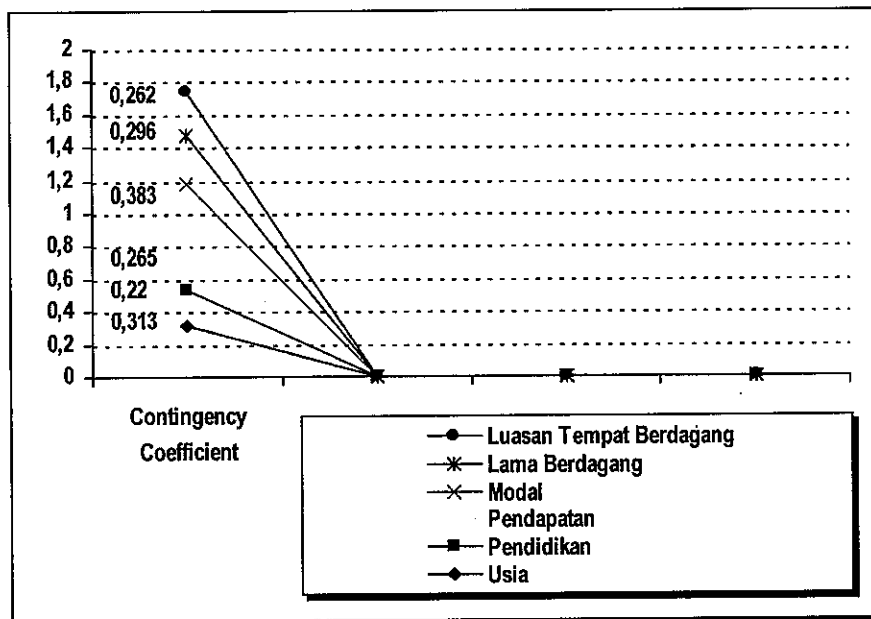
Hasil perhitungan tes *chi-square* ( $\chi^2$ ) dan *contingency coefficient* (Cc) dapat dilihat pada lampiran 3. Tabel IV.15 dan gambar IV.2 berikut ini akan menampilkan resume hasil tes tersebut.

TABEL IV.15  
RESUME HASIL TES *CHI-SQUARE* DAN *CONTINGENCY COEFFICIENT*

Kode Kuesioner	Karakteristik & Aktivitas	Kesediaan ( $\chi^2$ )	Asymp. Sig.	Kesediaan (Cc)	Approx. Sig.
A2	Usia	9,091	0,335	0,313	0,335
A5	Pendidikan	4,268	0,832	0,220	0,832
A6	Pendapatan	6,323	0,611	0,265	0,611
A7	Modal	14,434	0,071	0,383	0,071
A9	Lama Berdagang	4,933	0,552	0,296	0,552
B1	Luasan Tempat Berdagang	6,203	0,625	0,262	0,625

Sumber : Data primer diolah, 2004

Menurut Wahid (2003 : 3) bila ditentukan  $H_0$  yang diartikan bahwa tidak adanya ketergantungan/keselarasan antara kedua variabel, sedangkan  $H_1$  diberi arti pada adanya ketergantungan/keselarasan antara kedua variabel, maka dari hasil tes *chi-square* diatas, dapat diinformasikan bahwa proporsi kesediaan responden PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung terhadap variabel karakteristik dan aktivitasnya masing-masing berdiri sendiri/bebas atau tidak adanya ketergantungan/keselarasan antar frekwensi. Hal tersebut diindikasikan melalui nilai keseluruhan *asymp. sig.* > taraf nyata ( $\alpha = 0,05$ ).



GAMBAR 4.2  
GRAFIK HASIL TES *CONTINGENCY COEFFICIENT*

Sumber : Hasil analisis, 2004

Jadi dari hasil tes *chi-square* diatas pula diperoleh keseluruhan nilai koefisien kontingensi yang mengindikasikan bahwa hampir tidak ada keterkaitan hubungan sama sekali antara kesediaan responden PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya ( $Cc \approx 0$  atau  $0 < Cc < 1$ ). Hubungan antara tiap variabel dalam karakteristik dan aktivitas dengan kesediaannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Usia *versus* Kesediaan, mayoritas sebanyak 72 PKL taman kota Cepu (85,71%) yang berusia dibawah 40 tahun menjadi responden, dimana sejumlah 43 responden (57,72%) diantaranya menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Namun demikian, dari 3 responden (03,57%) yang berusia diatas 50 tahun, semuanya menyatakan bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Sementara itu, reponden dengan kisaran usia antara 41 – 50 tahun memiliki sebaran kesediaan yang hampir

merata. Hubungan antara usia responden dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sangat lemah ( $Cc = 0,313$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $Cc \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang berusia lebih muda ( $< 40$  tahun) belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang berusia lebih tua ( $> 40$  tahun) maupun sebaliknya.

2. Pendidikan *versus* Kediaan, dominannya sebanyak 70 PKL taman kota Cepu (83,33%) yang berpendidikan SMP/SMA/STM menjadi responden, dimana kesemuanya memiliki sebaran kesediaan yang hampir merata. Sebaran kesediaan PKL taman kota Cepu yang hampir merata untuk keseluruhan tingkat pendidikan ini selalu lebih banyak proporsi yang menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Hubungan antara tingkat pendidikan responden dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung juga sangat lemah ( $Cc = 0,220$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $Cc \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang berpendidikan lebih tinggi dari Sekolah Dasar (SD) belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang berpendidikan lebih rendah maupun sebaliknya.
3. Pendapatan *versus* Kediaan, sejumlah 73 PKL taman kota Cepu (86,90%) yang memiliki pendapatan kurang dari 800 ribu rupiah per bulannya telah menjadi mayoritas responden, dimana kesemuanya memiliki sebaran kesediaan yang hampir merata. Demikian pula halnya dengan responden yang memiliki kisaran pendapatan antara 800 – 1,2 juta rupiah per bulan. Namun lain halnya dengan 2 responden (02,39%) yang memiliki tingkat pendapatan lebih dari 1,2 juta per bulan, dimana semuanya menyatakan

tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Hubungan antara tingkat pendapatan responden dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sangat lemah ( $C_c = 0,265$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $C_c \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang berpendapatan lebih dari 800 ribu rupiah per bulan belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang berpendapatan kurang dari 800 ribu rupiah per bulan maupun sebaliknya.

4. Modal *versus* Kediaan, sebanyak 42 PKL taman kota Cepu (50,00%) yang memiliki modal awal kurang dari 500 ribu rupiah telah menjadi responden, dimana 27 responden (64,28%) diantaranya menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Sementara itu, sebanyak 41 responden (48,80%) bermodal awal lebih dari 500 ribu rupiah memiliki sebaran kesediaan yang hampir merata. Hubungan antara besarnya modal awal responden dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sangat lemah ( $C_c = 0,383$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $C_c \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang bermodal awal kurang dari 500 ribu rupiah belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang bermodal awal lebih dari 500 ribu rupiah maupun sebaliknya.
5. Lama Berdagang *versus* Kediaan, dari 64 PKL taman kota Cepu (76,19%) yang menjadi responden dan telah berdagang lebih dari 6 bulan di lokasi taman kota Cepu, sebanyak 38 responden (59,37%) diantaranya menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Disamping itu, responden yang telah berdagang kurang dari 6

bulan di lokasi taman kota Cepu memiliki sebaran kesediaan yang merata. Hubungan antara lamanya responden berdagang dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sangat lemah ( $C_c = 0,296$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $C_c \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang telah lebih dari 6 bulan berdagang di lokasi taman kota Cepu belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang telah berdagang kurang dari 6 bulan di lokasi tersebut maupun sebaliknya.

6. Luasan Tempat Berdagang *versus* Kesediaan, sebanyak 61 PKL taman kota Cepu (72,63%) telah dominan menjadi responden yang memiliki luasan tempat berdagang kurang dari  $15 \text{ m}^2$  di lokasi taman kota Cepu, dimana 33 responden (54,09%) diantaranya menyatakan tidak bersedia dan 23 responden lainnya (37,70%) menyatakan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung. Disamping itu, responden dengan luasan tempat berdagang lebih dari  $15 \text{ m}^2$  memiliki sebaran kesediaan yang hampir merata. Hubungan antara luasan tempat berdagang responden dengan kesediaannya untuk pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sangat lemah ( $C_c = 0,262$ ), dimana nilai kontingensi koefisien yang diketahui dari hasil kalkulasi hampir mendekati nilai nol ( $C_c \approx 0$ ). Hal itu berarti bahwa responden yang memiliki luasan tempat berdagang kurang dari  $15 \text{ m}^2$  di lokasi taman kota Cepu belum dapat dipastikan selalu menyatakan tidak bersedia untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dibandingkan responden yang memiliki luasan tempat berdagang lebih dari  $15 \text{ m}^2$  di lokasi tersebut maupun sebaliknya.

Tabel kontingensi yang telah disusun sebelumnya berikut ini disajikan untuk menjelaskan kesimpulan diatas.

TABEL IV.16  
KONTINGENSI HUBUNGAN ANTARA KESEDIAAN RESPONDEN UNTUK PINDAH KE TAMAN  
DI TUK BUNTING DENGAN KARAKTERISTIK DAN AKTIVITASNYA

No.	KESEDIAAN	Σ Responden	KARAKTERISTIK & AKTIVITAS										
			Usia	Pendidikan	Pendapatan	Modal	Lama Berdagang	Luasan Tempat Berdagang					
1.	Bersedia	30	> 50 tahun	3	D3/S1	> 1,2 juta	0	> 1 juta	11	> 1 tahun	12	> 25 m <sup>2</sup>	3
			41 - 50 tahun	3	SMP/SMA/STM	800 ribu-1,2 juta	2	500 ribu-1 juta	7	6 bulan-1 tahun	8	15-25 m <sup>2</sup>	2
			31 - 40 tahun	12	SD	400 ribu-800 ribu	13	100 ribu-500 ribu	10	3 bulan-6 bulan	8	5-15 m <sup>2</sup>	4
			< 30 tahun	11	Tidak Tamat SD	< 400 ribu	13	< 100 ribu	2	< 3 bulan	2	< 5 m <sup>2</sup>	19
			Kosong	0	Kosong	Kosong	2	Kosong	0	Kosong	0	Kosong	2
2.	Tidak Bersedia	48	> 50 tahun	0	D3/S1	> 1,2 juta	2	> 1 juta	10	> 1 tahun	21	> 25 m <sup>2</sup>	7
			41 - 50 tahun	5	SMP/SMA/STM	800 ribu-1,2 juta	4	500 ribu-1 juta	10	6 bulan-1 tahun	17	15-25 m <sup>2</sup>	3
			31 - 40 tahun	21	SD	400 ribu-800 ribu	15	100 ribu-500 ribu	22	3 bulan-6 bulan	6	5-15 m <sup>2</sup>	11
			< 30 tahun	22	Tidak Tamat SD	< 400 ribu	26	< 100 ribu	5	< 3 bulan	4	< 5 m <sup>2</sup>	22
			Kosong	0	Kosong	Kosong	1	Kosong	1	Kosong	0	Kosong	5
3.	Kosong	6	> 50 tahun	0	D3/S1	> 1,2 juta	0	> 1 juta	1	> 1 tahun	3	> 25 m <sup>2</sup>	0
			41 - 50 tahun	0	SMP/SMA/STM	800 ribu-1,2 juta	0	500 ribu-1 juta	2	6 bulan-1 tahun	3	15-25 m <sup>2</sup>	0
			31 - 40 tahun	2	SD	400 ribu-800 ribu	1	100 ribu-500 ribu	0	3 bulan-6 bulan	0	5-15 m <sup>2</sup>	0
			< 30 tahun	4	Tidak Tamat SD	< 400 ribu	5	< 100 ribu	3	< 3 bulan	0	< 5 m <sup>2</sup>	5
			Kosong	0	Kosong	Kosong	0	Kosong	0	Kosong	0	Kosong	1

Keterangan : Hubungan antara kesediaan dengan tiap karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu masing-masing berdiri sendiri/bebas atau tidak ada ketergantungan/keselarasan antar frekwensi

Sumber : Data primer diolah, 2004

#### 4.3 Analisis Hubungan antara Teori dengan Hasil Penelitian

Dalam teorinya diketahui bahwa ruang publik (*public space*), secara hukum formal, sesungguhnya adalah milik pemerintah yang sah, adapun para pedagang kaki lima yang menempati ruang-ruang publik tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan mereka pribadi (*private oriented*). Sementara itu, warga masyarakat sebagai pengguna ruang publik selama ini lebih banyak mengalah pada saat ruang publik, seperti taman kota Cepu, yang sedianya berfungsi sebagai tempat mereka bermain, olahraga, dan rekreasi, akhirnya digunakan oleh para PKL sebagai tempat mencari nafkah. Padahal kehadiran PKL cenderung menyesaki ruang publik oleh penambahan jumlahnya yang lambat laun tak terkendali, apalagi tanpa penataan dan pengelolaan yang baik. Hal ini mungkin saja terjadi karena kurangnya pemahaman dan kepedulian akan hak warga masyarakat pengguna ruang publik.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa ternyata hanya sebagian kecil dari para PKL yang menempati taman kota Cepu saat ini paham dan peduli kalau kehadiran mereka di lokasi tersebut, yang tidak tertata dan terkelola dengan baik, lambat laun akan menjadi biang kesemrawutan yang mengancam wajah taman kota Cepu dan kelancaran arus lalu lintas pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU. Sehingga berdasarkan kajian teori diatas, maka para PKL yang saat ini menempati taman kota Cepu harus benar-benar menyadari, bahwa mereka harus bersedia secara sukarela dan harus selalu siap membantu pemerintah kabupaten Blora yang sewaktu-waktu ingin memindahkannya, apalagi pemerintah kabupaten Blora telah menyediakan taman di kawasan Tuk Buntung yang akan dijadikan sebagai lokasi khusus bagi mereka untuk berdagang. Namun demikian, setidaknya para PKL masih memiliki hak untuk selalu diperlakukan secara manusiawi oleh pemerintah kabupaten Blora dalam upaya pemindahannya nanti. Sehingga tindakan yang persuasif dan komunikasi yang transparan perlu

dijalin sedini mungkin sebelum rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung terlaksana.

#### 4.4 Pembahasan

Dari hasil pengisian kuesioner, ditemukan bahwa lebih dari 75% responden PKL taman kota yang masih memprioritaskan taman kota Cepu sebagai lokasi berdagang paling layak dan strategis, serta lebih 50% yang tidak bersedia/keberatan untuk dipindahkan ke taman di Tuk Buntung. Hal tersebut mencerminkan adanya sikap PKL yang lebih dominan untuk tetap berdagang di lokasi taman kota Cepu. Meskipun mereka menyadari sepenuhnya, bahwa kehadirannya yang kurang tertata dan terkelola dengan baik lambat laun akan menjadi biang terjadinya kesemrawutan wajah taman kota Cepu dan kelancaran arus lalu lintas pada jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU. Selanjutnya, keseluruhan nilai *contingency coefficient* ( $C_c$ ) yang berkisar antara 0,220–0,383 (= hubungan sangat lemah); mengindikasikan tidak adanya kepastian hubungan yang dapat menjelaskan keterkaitan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya ( $C_c \approx 0$  atau  $0 < C_c < 1$ ).

Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan pula fakta bahwa kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung, khusus bagi yang memiliki jenis sarana fisik dagangan berupa mobil-mobilan, kereta-keretaan, warung semi permanen, dan warung non permanen, sangat tergantung dari bagaimana pihak pemerintah kabupaten Blora mengalokasikan luas taman di kawasan Tuk Buntung bagi kegiatan mereka yang lebih banyak memerlukan luasan untuk tempat berdagang. Sementara itu, untuk jenis sarana fisik dagangan berupa gelaran, gerobak, dan potongan bambu/kayu tegakan, tidak mempunyai masalah yang

serius terhadap luasan tempat berdagang dalam rencana pemindahannya. Berikut dalam upaya menyediakan tempat berdagang permanen bagi PKL nantinya perlu dipertimbangkan pula untuk selalu mempertahankan fungsi dan peran asli kawasan Tuk Buntung sebagai ruang terbuka hijau dan alun-alun bagi kegiatan sosial dan kultural warga masyarakatnya.

Namun yang penting untuk dipahami disini adalah bahwa sesungguhnya pedagang kaki lima (PKL) yang memilih lokasi berdagang di taman kota Cepu, suka ataupun tidak suka, wajib menyadari dan harus selalu siap bila suatu saat dipindahkan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten Blora sebagai pemilik taman kota Cepu yang sah, dalam perspektif hukum yang berlaku, telah membangun taman kota Cepu (*public space*) hanya untuk keperluan orang banyak (*public*) sebagai penggunaanya yang tidak lain adalah warga masyarakat kota Cepu, jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi (*private*) pedagang kaki lima. Sehingga PKL harus menyadari pula bahwa sesungguhnya mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat/hak menuntut pemerintah kabupaten Blora untuk melakukan penataan dan pengelolaan terhadap keberadaannya pada lokasi manapun di kota Cepu. Walaupun demikian, PKL taman kota Cepu masih memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, sebagai manusia, dalam rencana pemindahannya ke taman di kawasan Tuk Buntung.

## **BAB V** **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Dalam kajian ini penulis ingin mengemukakan beberapa kesimpulan berkaitan dengan persepsi dan preferensi PKL taman kota Cepu untuk melihat kesediaan mereka pindah ke taman di Tuk Buntung adalah sebagai berikut, bahwa :

1. PKL taman kota Cepu masih lebih dominan menyatakan tidak bersedia untuk pindah dan memilih lokasi taman kota Cepu sebagai tempat yang menurut mereka paling layak dan strategis untuk berdagang saat ini, walaupun sebenarnya sebagian dari mereka juga tahu kalau kehadirannya lambat laun akan mengancam keindahan taman kota Cepu dan kelancaran arus lalu lintas di jalur jalan kolektor primer Cepu-Randublatung/RSU;
2. Hampir tidak adanya hubungan yang dapat dipastikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kesediaan PKL taman kota Cepu untuk pindah ke taman di Tuk Buntung dengan karakteristik dan aktivitasnya;
3. PKL taman kota Cepu wajib menyadari bahwa keberadaan mereka di lokasi taman kota Cepu tidaklah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Cepu yang berlaku secara normatif, sehingga harus selalu siap bila suatu saat diminta oleh pemerintah kabupaten Blora untuk pindah ke lokasi taman di kawasan Tuk Buntung;
4. Membangun kearifan lokal untuk mempertahankan fungsi dan peran kawasan Tuk Buntung jauh lebih berarti dari hanya sekedar pembangunan fisik yang dilakukan; serta

5. Kebutuhan luas tempat berdagang PKL taman kota Cepu terkait erat dengan jenis sarana fisik dagangannya dan merupakan faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan pihak pemerintah kabupaten Blora sebelum rencana pemindahan dilaksanakan.

## 5.2 Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil kajian diatas penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rencana pemindahan PKL taman kota Cepu ke taman di Tuk Buntung adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah kabupaten Blora harus selalu mengedepankan tindakan persuasif dan mengembangkan komunikasi yang transparan kepada PKL taman kota Cepu dalam rencana pemindahan mereka ke taman di Tuk Buntung;
2. Pemerintah kabupaten Blora harus dengan segera memberikan sosialisasi secara intensif kepada PKL taman kota Cepu guna menjaring aspirasinya sebagai masukan bagi kesempurnaan desain pembangunan taman di kawasan Tuk Buntung dan rencana pemindahannya;
3. PKL taman kota Cepu melalui paguyubannya harus ikut aktif bersama-sama pemerintah kabupaten Blora mencari solusi terbaik dalam rencana pemindahannya agar kemudian dapat dikelola dan ditata dengan baik di taman Tuk Buntung;
4. Fungsi kawasan Tuk Buntung sebagai ruang terbuka hijau harus diupayakan kelangsungannya dengan menyediakan tempat bagi warga masyarakat untuk bermain, olahraga, dan rekreasi, berikut perannya sebagai alun-alun yang harus tetap dapat menampung kegiatan sosial kultur warga masyarakatnya; serta

5. Pentingnya mengalokasikan luas tempat berdagang PKL sesuai jenis sarana fisik dagangannya berlaku secara umum, sehingga diharapkan juga dapat menjadi pertimbangan bagi setiap pemerintahan lokal yang ingin merencanakan pemindahan PKL ke suatu lokasi ruang terbuka hijau yang berbentuk kawasan di negara ini.

### 5.3 Usul Penelitian Lanjut

Melalui kesimpulan dan rekomendasi diatas, penulis mengusulkan pentingnya untuk melakukan penelitian lanjut yang berkaitan dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melihat persepsi dan preferensi— baik warga masyarakat di sekitar taman kota Cepu dan penggunaannya maupun warga masyarakat yang bermukim di kawasan Tuk Buntung— terhadap kehadiran PKL di lokasi taman kota Cepu dan pemindahannya ke taman di Tuk Buntung;
2. Mencari desain pembangunan taman Tuk Buntung dan pola pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan aktivitas PKL taman kota Cepu bagi rencana pemindahannya ke Tuk Buntung; serta
3. Mengukur besarnya kontribusi kehadiran PKL taman kota Cepu dalam menurunkan kualitas lingkungan kawasan Tuk Buntung setelah rencana pemindahannya selesai dilaksanakan dan setidaknya PKL telah enam bulan lamanya melakukan aktivitas di lokasi taman Tuk Buntung.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Alwi, Hasan et al. 2002. "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*." Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Carr, Stephen et al. 1992. *Public Space*. New York : Cambridge University Press.
- Chaplin, James P. 2002. "*Kamus Lengkap Psikologi*." Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 379.
- Chris Manning dan Tadjudin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Conyers, Diana. 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Daldjoeni, N., 1998. *Geografi Desa dan Kota : untuk Mahasiswa dan Guru SMU*. Bandung : Alumni.
- Darmawan, Edy. 2003. *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gibson, James L. et al. 1996. *Organisasi : Perilaku-Struktur-Proses*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Edisi Kedelapan. Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara.
- Glasson, J. 1978. *An Introduction to Regional Planning*. London : Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Hakim, Rustam. 1993. *Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap*. Jakarta : Penerbit Bina Aksara.
- Herlianto, M. Th. 1997. *Urbanisasi, Pembangunan, dan Kerusakan Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.

- Hidayat. 1987. *Peran Sektor Informal dalam Struktur Perekonomian D.I. Yogyakarta*. Bandung : PPE-SDM Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.
- Jayadinata, Johara T. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah*. Bandung : ITB Press.
- Mahyong, M. dan Rudy Haryono. 1982. "*Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*." Jombang : Penerbit Lintas Media.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFE-UII.
- Mc. Gee and Y.M. Yeung. 1977. *Hawkers In Southeast Asian Cities Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa : International Development Research Centre.
- Nasir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 2002. *Metode Research*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Rachbini, Didiak dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan*. Jakarta : Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Rapuano, Michael, P.P. Pirone and Brooks E. Wigginton. 1964. *Open Space in Urban Design*. Ohio : The Cleveland Development Foundation.
- Sevilla, Consuelo et al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Terjemahan Alimuddin Tuwu. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Melbourne : Van Nostrand Reinhold Company.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi, Sofian. (eds.). 1997. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Penerbit PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soefaat et al. 1997. "*Kamus Tata Ruang*." Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum & Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI), Hal. 91.
- Sugiarto et al. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto, J. 1984. *Metode Ramalan Kuantitatif untuk Perencanaan*. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia.
- Wahid, S. 2003. *Statistik Non-Parametrik : Contoh Kasus dan Pemecahannya dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Wojowasito, S. dan Tito Wasito W. 1980. "*Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris.*" Bandung : Penerbit Hasta.

### **SKRIPSI / TESIS / DISERTASI**

Dewy, Julianingsih S. 2001. "Keberadaan Aktivitas PKL pada Ruang Publik Jalan Thamrin Semarang." Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Widodo, Ahmadi. 2000. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Kota Semarang)." Tesis tidak diterbitkan, Program Magister Teknik Pembangunan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

### **MAKALAH SEMINAR / LOKAKARYA / PELATIHAN**

*Bahan Bacaan Bagi Para Peserta Pelatihan : Perencanaan Pembangunan Yang Bertumpu Pada Masyarakat.* 2003. Performance Oriented Regional Management (PERFORM). Jakarta : Perform Project Central Java.

Witoelar, Erna. 2001. "Keikutsertaan Masyarakat Dalam Rencana Penyusunan Pengembangan Wilayah Dan Kota Sebagai Peluang Untuk Mewujudkan Lingkungan Kehidupan Yang Ideal : Kritik Terhadap Proses Penyusunan Rencana Dengan Sistem Top-Down." Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Participatory Planning, Institut Teknologi Bandung, 24 Maret 2001.

### **TERBITAN TERBATAS**

Haryanto, Ragil. 2002. *Proses Perencanaan Pembangunan Kota Dalam Menghadapi Pelaksanaan Otonomi Daerah.* Bahan Kuliah. Semarang : Magister Teknik Perencanaan Pembangunan Wilayah & Kota (MPPWK) UNDIP.

### **HASIL PENELITIAN**

Edy Purwanto et al. 1994. *Kecenderungan Penggunaan Konsep Mall pada Bangunan Pusat Perbelanjaan.* Semarang : Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

### **SURAT KABAR / MAJALAH**

*Suara Merdeka*, Jumat, 5 Juli 2002.

Surya, Kamis, 18 September 2003.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / BUKU DATA**

*Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota IKK Cepu Tahun 2001.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2002.

*Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora,* Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1990.

*Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah.* Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri Nomor 9 Tahun 1982.

*Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.* Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, Kepmen Kimpraswil Nomor 327 Tahun 2002.

*Pendapatan Regional Kabupaten Blora Tahun 2001.* Kerjasama Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2002.

*Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP).* Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 050/1307/II/Bangda tanggal 11 Agustus 2003.

*Rencana Detail Tata Ruang Ibukota Kecamatan Cepu Tahun 1991.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 1991.

*Rencana Umum Tata Ruang Kota Cepu Tahun 2002.* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, 2002.